



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2018 -2023

**Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Malang**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 - 2023

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan mendorong perkembangan daerah dalam konteks memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang SPPN tersebut, mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 serta Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dalam penyusunannya mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang didalamnya berisi analisis gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah dan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Perangkat Daerah berdasarkan program dan pagu indikatif dalam RPJMD.

Peran pembangunan infrastruktur dasar bagi sebuah kota, sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar bagi kehidupan masyarakat seperti halnya pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing dari sebuah kota. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan di bidang pertanahan berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan di Kota Malang seperti yang sudah digariskan dalam RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan upaya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan secara seimbang dan sinergis dalam memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan tetap memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan yang baik, seperti halnya yang telah disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia yang telah meratifikasinya dalam kesepakatan internasional tentang *Sustainability Development Goal's*. Dengan demikian, dalam setiap penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, harus selalu berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan agar hasil pembangunan selain dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang juga dapat diwariskan pada generasi mendatang.

Selanjutnya, Pengarusutamaan Gender (PUG) diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki, perempuan dan kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur) serta kaum difabel agar memiliki kesetaraan akses, kontrol dan partisipasi dalam pembangunan yang pada akhirnya dapat memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan, karenanya penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diharapkan dapat terintegrasi dengan aspek gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan

secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik dapat menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang lebih aman, nyaman, meningkat kesejahteraannya, serta dapat mengekspresikan dirinya secara maksimal. Lebih jauh, diharapkan pelayanan publik yang baik dapat memfasilitasi dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat ikut memacu peningkatan kapasitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah guna mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga kinerja terukur dari program kerja sampai dengan detail aktivitas dengan mempertimbangan asas efektivitas, efisiensi, dan ekonomis melalui penetapan tolok ukur dan target kinerja yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah guna memberikan kontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik Pemerintah Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada saat penyusunan Rencana Kerja DPUPRPKP TA 2021 telah dilakukan pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 5 Oktober 2020, maka DPUPRPKP telah melakukan pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Adapun pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dimaksud, terdapat program yang tidak dapat dipetakan indikator programnya karena jumlah program sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 lebih banyak dibandingkan jumlah program pada

Renstra 2018-2023, sehingga diperlukan perubahan rencana strategis tahun 2022-2023 guna mencapai tujuan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban dokumen perencanaan pembangunan.

Seiring disusunnya perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, maka pada level Perangkat Daerah juga melakukan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renstra DPUPRPKP, diharapkan dapat menjadi arah dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen organisasi perangkat daerah DPUPRPKP dan *stakeholder* dalam menentukan prioritas program tahun 2022 – 2023 maupun dalam menerjemahkan rencana jangka menengah ini kedalam rencana kerja tahunan DPUPRPKP.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis DPUPRPKP Tahun 2022 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah, penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Kota Malang Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen perencanaan DPUPRPKP untuk periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang disusun dengan maksud :

- a. Memberikan arah sekaligus acuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Malang yang telah disepakati pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2022 – 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2022 – 2023 bertujuan untuk :

1. Memberikan arah dalam penetapan strategi dan kebijakan teknis penyediaan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan;
2. Menjabarkan RPJMD Kota Malang sesuai dengan struktur organisasi ke dokumen yang lebih operasional;

3. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen DPUPRPKP Kota Malang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan DPUPRPKP Kota Malang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2023;
5. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas DPUPRPKP Kota Malang secara keseluruhan;
6. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPUPRPKP pada tahun sebelumnya;
7. Merumuskan tujuan dan sasaran DPUPRPKP tahun 2022-2023;
8. Merencanakan program dan kegiatan DPUPRPKP Kota Malang tahun 2022-2023;
9. Sarana untuk memberikan arah dalam penetapan strategi dan kebijakan teknis penataan dan pemanfaatan ruang serta penyediaan sarana prasana perkotaan, guna mengantisipasi pertumbuhan kawasan kota termasuk pengembangan kebutuhan infrastruktur perkotaan dan permukiman, untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang terintegrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2022 - 2023 menggunakan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.4. Telaahan rencana tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka kedudukan DPUPRPKP sebagai berikut :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi DPUPRPKP sebagai berikut :

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - c. pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) kota;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kota;
 - f. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam kota;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam kota;
 - h. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kota;
 - i. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kota;
 - j. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di kota;
 - k. Penyelenggaraan jalan kota;
 - l. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - m. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan kota;
 - n. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - o. Penyelenggaraan penataan ruang kota;
 - p. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - q. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - r. pengelolaan UPT.

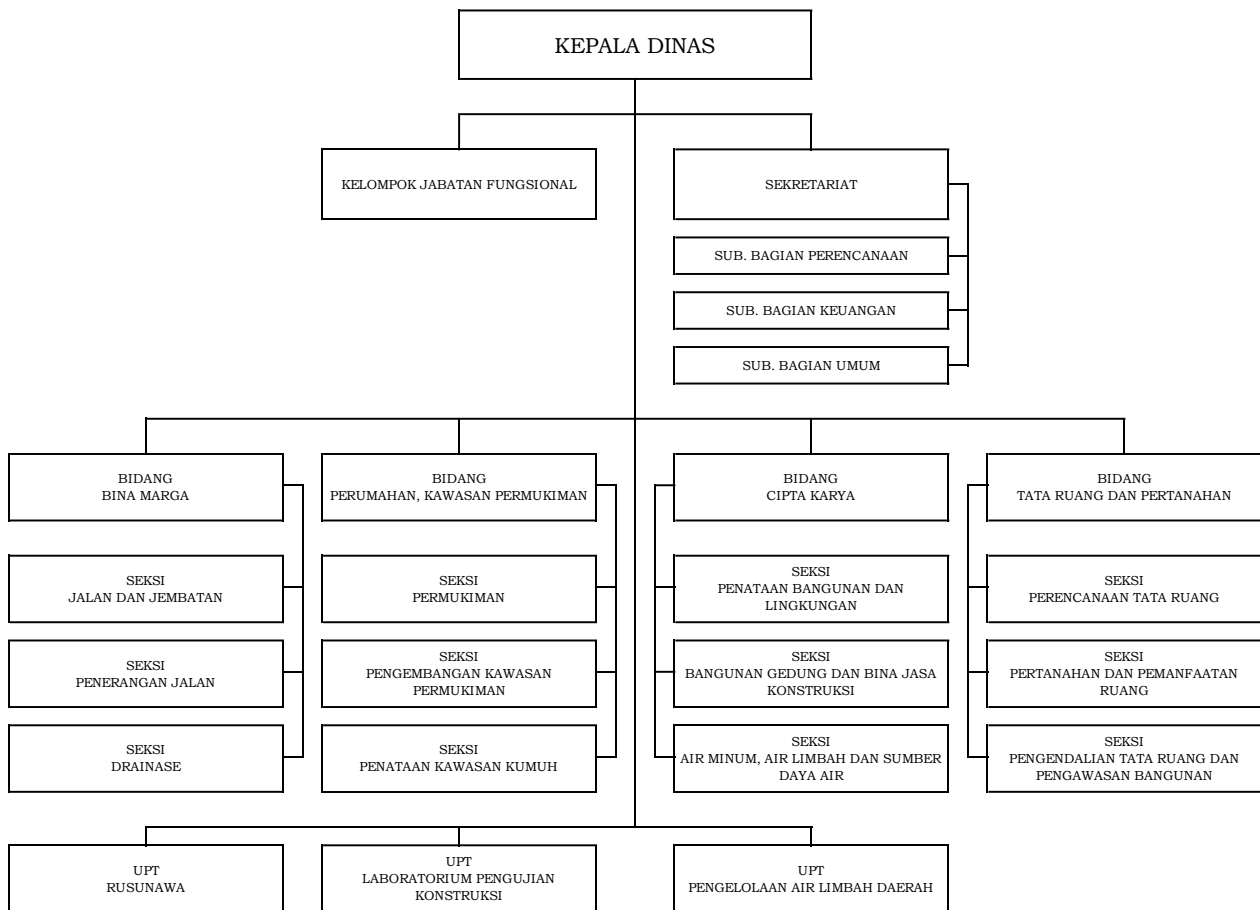
- s. pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur organisasi menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan;
 - 3) Seksi Drainase.
- d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perumahan;
 - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - 3) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 2) Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
 - 3) Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - 3) Seksi Pengendalian Tata Ruang.
- g. UPT;
 - 1) UPT Pengolahan Air Limbah Daerah;
 - 2) UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - 3) UPT Rusunawa.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun unit-unit kerja yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang kita kenal dengan istilah struktur organisasi selengkapnya tergambar dalam gambar berikut.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi



Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja dibawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan Strategis Dinas;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan program Sekretariat Dinas;
- d. pelaksanaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat;
- f. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- g. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(2) Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat Dinas;
- b. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Subbagian Perencanaan;
- c. pelaksanaan pengumpulan rencana kegiatan dan anggaran, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Capaian Kinerja di lingkungan Dinas;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat Dinas;
- b. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Subbagian Keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(4) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat Dinas;
- b. penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Bina Marga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Marga;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Bina Marga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Bina Marga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (2) Seksi Jalan dan Jembatan

Seksi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis, pemantauan di bidang Jalan dan Jembatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Jalan dan Jembatan;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Jaringan Jalan dan Jembatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan sinkronisasi Seksi Jalan dan Jembatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Jalan dan Jembatan;
- e. penyiapan bahan penetapan status, kelas dan fungsi jalan dan jembatan;
- f. penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan dan pengujian mutu konstruksi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Jalan dan Jembatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Penerangan Jalan

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan pelaksanaan urusan di bidang Penerangan Jalan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penerangan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penerangan Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Penerangan Jalan;
- c. penyiapan bahan sinkronisasi Seksi Penerangan Jalan;
- d. penyiapan bahan penyusunan penyelenggaraan Penerangan Jalan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan sarana prasarana penerangan jalan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis dan penyuluhan bidang penerangan jalan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknis ijin penerangan jalan;
- h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang Penerangan Jalan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penerangan Jalan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(4) Seksi Drainase

Seksi Drainase mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis drainase.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Drainase menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Drainase;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Drainase;
- c. penyiapan bahan sinkronisasi Seksi Drainase;
- d. penyiapan bahan konsep pembangunan dan pemeliharaan drainase;

- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Drainase;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Drainase; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan penataan dan pengembangan pelayanan perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur pelayanan perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (2) Seksi Perumahan

Seksi Perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan bidang Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perumahan;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Perumahan;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan perumahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan pengembangan perumahan swadaya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi supervisi dan penetapan lokasi pengembangan perumahan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi izin bagi pengembang perumahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perumahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
- Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan Pengembangan Kawasan Permukiman.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - d. penyiapan bahan sinkronisasi Pengembangan Kawasan Permukiman;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
- (4) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas
- Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - d. penyiapan bahan sinkronisasi Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - e. penyiapan bahan survei dan pendataan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kumuh;
 - f. penyiapan bahan penyusunan konsep Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - g. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.
5. Bidang Cipta Karya
- (1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan di bidang Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Cipta Karya;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Cipta Karya;
- d. pelaksanaan program di bidang Cipta Karya;
- e. pengendalian dan pemantauan kegiatan di bidang Cipta Karya;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Cipta Karya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi

Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pengembangan Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
- c. penyiapan bahan pembinaan bidang Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Bangunan Gedung dan Bina Jasa Konstruksi; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(4) Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air

Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan bidang Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Air Minum, Air Limbah dan Sumber Daya Air; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

(1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- d. pelaksanaan pembinaan di bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang Tata Ruang dan Pertanahan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- c. penyiapan bahan pembinaan di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- d. penyiapan konsep kebijakan di bidang tata ruang;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang kota;
- f. penyiapan bahan penyusunan peraturan zonasi sebagai penjabaran dari rencana detail tata ruang;
- g. penyiapan bahan legislasi untuk produk rencana tata ruang;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

(3) Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penatausahaan di bidang pertanahan;
- e. penyiapan bahan fasilitasi pemanfaatan pertanahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
- g. penyiapan bahan konsep Surat Keterangan Rencana Kota yang mengatur tentang penggunaan lahan, intensitas ruang (koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan) dan ketentuan lainnya;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan identifikasi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana kota;
- i. penyediaan bahan pelayanan peta rencana tata ruang;
- j. penyediaan bahan penyusunan legalisasi produk-produk pemanfaatan ruang;
- k. penyiapan bahan Penyusunan pemetaan pemanfaatan ruang;
- l. penyiapan bahan penyusunan panduan teknis tentang pemanfaatan ruang kota;
- m. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pertanahan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

4) Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Tata Ruang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Tata Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang Pengendalian Tata Ruang;
- c. penyiapan bahan pembinaan bidang Pengendalian Tata Ruang;
- d. penyediaan bahan penyusunan legalisasi produk-produk pengendalian ruang;
- e. penyiapan bahan penyusunan panduan teknis tentang pengendalian ruang kota;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Pada tanggal 17 Februari 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka proses pengajuan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dialihkan ke Disnaker PMPTSP, sehingga diperlukan revisi target capaian kinerja.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah personil di DPUPRPKP Kota Malang saat ini sebanyak 286 orang, terdiri dari 130 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 156 orang TPOK (Tenaga Pembantu Operasional Kegiatan) dengan komposisi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1

Komposisi Personil ASN DPUPRPKP Berdasarkan Pangkat/Golongan

PANGKAT	GOL. RUANG	JUMLAH	TOTAL	%
Pembina Utama Madya	IV/D	0	10	7,70%
Pembina Utama Muda	IV/C	1		
Pembina Tingkat I	IV/B	2		
Pembina	IV/A	7		
Penata Tingkat I	III/D	16	61	46,92%
Penata	III/C	12		
Penata Muda Tingkat I	III/B	12		
Penata Muda	III/A	21		
Pengatur Tingkat I	II/D	23	56	43,08%
Pengatur	II/C	17		
Pengatur Muda Tingkat I	II/B	12		
Pengatur Muda	II/A	4		
Juru Tingkat I	I/D	0	3	2,30%
Juru	I/C	3		
Juru Muda Tingkat I	I/B	0		
Juru Muda	I/A	0		
TOTAL			130	100,00%

Berdasarkan data pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa sebagian besar ASN DPUPRPKP Kota Malang pada golongan III (46,92%) diikuti golongan II (43,08%) dan golongan IV (7,70%) dan terakhir golongan I (2,30%).

Tabel 2.2

Komposisi Personil ASN DPUPRPKP Berdasarkan Pendidikan

TPOK		L	P	JML	PENDIDIKAN						
					SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2
BIDANG	SEKRETARIAT	11	7	18	0	0	7	0	0	8	3
	BINA MARGA	30	6	36	0	0	21	0	1	12	2
	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	10	8	18	0	0	4	0	0	10	4
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10	1	11	0	0	7	0	0	3	1
	CIPTA KARYA	13	5	18	0	0	8	0	0	8	2
UPT	LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	9	-	9	0	2	4	0	0	2	1
	RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	9	2	11	0	5	3	0	1	2	0
	PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	8	1	9	1	3	3	0	1	0	1
TOTAL		100	30	130	1	10	57	0	3	45	14

Sumber : data Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3

Komposisi Personil TPOK DPUPRPKP Berdasarkan Pendidikan

TPOK		L	P	JML	PENDIDIKAN								
					SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2
BIDANG	SEKRETARIAT	41	9	50	0	3	38	0	0	1	0	8	0
	BINA MARGA	33	6	39	3	2	21	1	1	2	0	9	0
	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	3	3	6	0	0	3	0	0	1	0	2	0
	CIPTA KARYA	2	6	8	1	0	0	0	0	2	0	4	1
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	7	10	0	0	0	0	0	0	1	9	0
UPT	LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI	3	1	4	0	0	2	0	0	0	0	2	0
	RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	31	6	37	0	3	24	0	0	0	2	8	0
	PENGOLAHAN AIR LIMBAH DAERAH	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
TOTAL		117	39	156	4	9	89	1	1	6	3	42	1

Tabel 2.4

Perbandingan ASN dan TPOK DPUPRPKP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	ASN		TPOK	
		JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	SARJANA STRATA 3 (S3)	0	0%	0	0,00%
2	SARJANA STRATA 2 (S2)	14	10,77%	1	0,64%
3	SARJANA STRATA 1 (S1)	45	34,62%	42	26,92%
4	DIPLOMA	3	2,31%	11	7,05%
5	SMA	57	43,85%	89	57,05%
6	SMP	10	7,69%	9	5,77%
8.	SD	1	0,77%	4	2,56%
	JUMLAH	130	100,00%	156	100,00%

Pada tabel 2.4 dapat dilihat tingkat pendidikan ASN pada DPUPRPKP yang terbanyak adalah ASN yang berpendidikan SMA/ sederajat yaitu sebesar 43,85%, peringkat kedua adalah ASN yang berpendidikan S1 sebesar 34,62%, peringkat ketiga dengan ASN dengan pendidikan S2 sebesar 10,77%, peringkat keempat adalah ASN yang berpendidikan SMP/ sederajat yaitu sebesar 7,69%, peringkat kelima adalah ASN yang berpendidikan Diploma yaitu sebesar 2,31% dan peringkat terakhir adalah ASN yang berpendidikan SD/ sederajat sebesar 0,77%.

Sedangkan untuk TPOK DPUPRPKP, apabila dilihat dari tingkat pendidikan TPOK berpendidikan SMA menduduki peringkat yang paling besar yaitu sebesar 57.05%, peringkat kedua dengan pendidikan S1 sebesar 26,92%, peringkat ketiga dengan pendidikan Diploma sebesar 7,05%, peringkat keempat dengan pendidikan SMP/ sederajat sebesar 5,77%, peringkat kelima dengan pendidikan SD/ sederajat sebesar 2,56% dan peringkat terakhir sebanyak 0,64% dengan pendidikan S2.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di dukung peralatan dan perlengkapan penunjang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Tupoksi DPUPRPKP

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	A.C. Sentral	5	
2	A.C. Split	5	
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	115	
4	Alat Pemadam/Portable	1	
5	Alat Pembantu Kebakaran	2	
6	Alat Pembantu Kebakaran	2	
7	Alat Pemotong Kertas	1	
8	Alat Pengaman / Sinyal	10	
9	Alat Penghancur Kertas	5	
10	Arit	12	
11	Blade Shovel (Sekop Pemadam)	6	
12	Borgol	22	
13	Camera Conference	1	
14	Camera Video	1	
15	CCTV - Camera Control Television System	1	
16	Cent-Cram	1	
17	Centrifuge Extractor	1	
18	Compaction Test Set	2	
19	Compressor	2	
20	Distometer	5	
21	Drill Machine	1	
22	Electric Seave Seker	1	
23	Eskavator	1	
24	Facsimile	1	
25	Fire Tool (Garu Pacul/ Cangkul)	4	
26	Ganco	1	
27	Gerobak Dorong	3	
28	Hand Fallet	2	
29	Handy Talky (HT)	18	
30	Handycam	1	
31	Hummer Test	2	
32	Jack Hammer	2	
33	Kamera Digital	5	
34	Karpet	3	
35	Kipas Angin	10	
36	Komputer	105	
37	Kursi Lipat	40	
38	Kursi Putar	26	
39	Kursi Rapat	20	
40	Lampu Natrium	1.650	
41	LCD Monitor	2	
42	LCD Projector	3	
43	Lemari Kaca	15	
44	Linggis	5	
45	Loudspeaker	2	
46	Marshall Test	1	

VI.II-16

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
47	Meja Gambar	3	
48	Meja Kerja Kayu	13	
49	Meja Rapat	5	
50	Mesin Absensi	2	
51	Mesin Bor Beton	2	
52	Mesin Bor Tanah	1	
53	Mesin Gergaji	1	
54	Mesin Pemotong Rumput	2	
55	Mesin Potong Rumput	2	
56	Meteran Glinding	10	
57	Meteran Roll	10	
58	Note Book	31	
59	Open	1	
60	Overhead Projector	2	
61	Penggaruk	18	
62	PH Meter (Alat Ukur Universal)	1	
63	Pisau Belati	8	
64	Pompa Portable	3	
65	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	
66	Printer	90	
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	
68	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	6	
69	Rak Besi	1	
70	Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan	1	
71	Sarung Tangan Kulit	23	
72	Scanner	10	
73	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	
74	Sent Cone Test	1	
75	Sepatu Boot	23	
76	Slum Test	2	
77	Sofa	2	
78	Solution Balance	1	
79	Soundir Unit	1	
80	Specific Gravity	1	
81	Tangga	1	
82	Tangga Aluminium	2	
83	Televisi	2	
84	Testing Machine	1	
85	Theodolit	1	
86	Thermometer Badan	8	
87	Tool Kit Set	1	
88	Toolkit Perbengkelan	2	
89	Uninterruptible Power Supply (UPS)	43	
90	Universal Test Machine (Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi)	1	
91	Utility Trolley	5	
92	Wales	6	
93	Water Bath	1	
94	Water Pas	1	

Sumber : Laporan Kinerja DPUPRPKP Kota Malang TA 2020

Tabel 2.6
Kendaraan Operasional DPUPRPKP

NO.	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Sepeda Motor Roda 2	21	
2	Sepeda Motor Roda 3	12	
3	Station Wagon	8	
4	Mobil Pick Up	11	
5	Truck	10	
		62	

2.3 Kinerja Pelayanan Daerah

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh DPUPRPKP adalah menangani infrastruktur dasar yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah Kota Malang, dengan perkembangan, kemajuan, kompleksitas masalah dan visi yang diamanatkan dalam RPJMD serta mengacu dan mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Republik Indonesia.

Selain itu dukungan pelaksanaan gerakan 100-0-100 dan *Sustainability Development Goal's* (SDG's), merupakan tugas dan tanggung jawab besar dari DPUPRPKP untuk mewujudkannya di Kota Malang. Pemenuhan 100 persen akses air minum/bersih bagi masyarakat, 0 (Nol) persen kawasan kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak bukanlah merupakan hal yang mudah dicapai, demikian juga pencapaian 14 tujuan SDG's. Meskipun tidak semua gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut merupakan tugas dan fungsi dari DPUPRPKP, akan tetapi peran DPUPRPKP dalam mewujudkannya, sangatlah vital. Tingkat keberhasilannya atau capaian kinerjanya secara cepat dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, dimana tujuan DPUPRPKP adalah mewujudkan pemerataan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan peningkatan kualitas tata ruang kota, yang tentunya apabila dikaji secara mendalam sebetulnya lebih tinggi dari gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat karena secara tersirat masih hanya dalam penyediaan infrastruktur dasarnya saja.

Dari capaian kinerja DPUPRPKP bisa menggambarkan bagaimana kondisinya di Kota Malang, implikasi apa saja yang muncul dari pencapaian target kinerja dari DPUPRPKP Kota Malang diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPUPRPKP dimana indikator kinerjanya adalah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2020 nilai SKM DPUPR belum mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun bisa dikatakan dampak atas capaian kinerjanya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat namun secara umum sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk operasional DPUPRPKP. Meskipun demikian peningkatan nilai SKM menjadi salah satu tolok ukur kinerja dinas di mata masyarakat. Salah satu hal yang menjadi dasar tidak tercapainya kinerja dari Sekretariat adalah masih diperlukannya penyebaran informasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan, peningkatan ketersediaan data dan informasi terkait tugas dan fungsi dinas, serta peningkatan pelayanan dan penanganan pengaduan pada masyarakat.

- b. Untuk pencapaian kinerja pemeliharaan jalan, baik yang merupakan pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan insidental, target kinerjanya masih belum tercapai, dampak tidak tercapainya kinerja pemeliharaan jalan sangat dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah banyak ditemukan jalan berlubang di beberapa ruas jalan. Hal ini dikarenakan anggaran pemeliharaan yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan masih kurang, kurangnya anggaran menyebabkan banyak ruas jalan yang tidak bisa dilaksanakan pemeliharaan meskipun sudah direncanakan.
- Untuk pemeliharaan rutin dan insidental jalan yang dalam DPA nya adalah untuk penyediaan material dan upah, satu hal yang menyebabkan anggaran menjadi kurang salah satunya adalah pada tahun 2018 curah hujan di Kota Malang cukup tinggi sehingga menimbulkan terjadinya genangan pada beberapa ruas jalan yang menjadikan jalan menjadi cepat rusak, belum semua ruas jalan di lengkapi dengan drainase yang memadai, kurangnya daerah/areal untuk resapan air yang ada dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase yang ada.
- c. Pada kegiatan pemeliharaan drainase, banyaknya drainase yang tidak terpelihara dengan baik menjadikan timbul genangan pada beberapa wilayah. Meskipun secara durasi waktu tidak lama akan tetapi hal ini cukup menjadikan masalah pada masyarakat, salah satunya disebabkan karena anggaran pemeliharaan drainasenya yang terbatas sehingga diperlukan penambahan anggaran.
- d. Meningkatnya tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat pada UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat baik dalam rangka pengujian mutu bangunan maupun persewaan alat berat menuntut perlunya peningkatan kualitas mutu pelayanan dimana ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas maupun kualitas dari alat berat yang tersedia maupun kualitas laboratorium uji mutu bahan serta SDM yang ada guna mendukung peningkatan layanan yang diberikan.
- e. Kinerja UPT Pengolahan Air Limbah Daerah semakin hari semakin meningkat sejalan dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat terkait limbah domestik, disisi lain kondisi dan kapasitas Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja kondisinya perlu untuk segera ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya agar bisa mengolah seluruh lumpur tinja yang dibuang masyarakat pada IPLT.

Secara umum pencapaian kinerja layanan pekerjaan umum sebagaimana yang telah tertuang pada Renstra DPUPRPKP Tahun 2018 – 2023 telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja utama dan indikator prrogram DPUPRPKP Tahun 2018 – 2023 dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman			√	3,65	3,8	3,95	4,1	4,25	4,06	4,15				
2	Persentase Area Kawasan Kumuh		√		2,00%	1,20%	1,15%	1,05%	1,00%	1,95%	0,66%				
3	Persentase Penurunan Titik Genangan			√	53,85%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	76,92%	100%				
4	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang			√	26,72%	28,72%	30,72%	32,72%	34,72%	25,23%	25,63%				
5	Nilai SAKIP			√	81,85	82,67	83,50	84,33	85,17	81,20	83,40				
6	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		√		89.13%	91.18%	92.41%	94.46%	96.91%	91.66%	93,05%				
7	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik			√	94.90%	96.09%	97.27%	98.44%	99.61%	87.62%	90,16%				
8	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki			√	82.50%	83.01%	83.51%	84.02%	84.52%	99,63%	99,41%				
9	Persentase fasilitas penerangan jalan			√	56.31%	67.23%	78.15%	89.08%	100.00%	53,14%	55,59%				
10	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik		√		88.32%	89.93%	91.53%	93.14%	94.74%	84.57%	87,98%				
11	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	√	√		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.84%	93,29%				

VI.II-20

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
12	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	√	√		84.86%	85.02%	85.17%	85.32%	85.47%	84.02%	84,12%				
13	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik			√	90.21%	93.71%	94.01%	94.01%	94.16%	83.90%	92,94%				
14	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung		√		84.70%	84.80%	89.87%	94.93%	100.00%	69.23%	100,00%				
15	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL			√	35.34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	2.73%	2,74%				
16	Persentase drainase kota dalam kondisi baik			√	N/A	5.00%	10.00%	15.00%	20.00%	82.98%	83,54%				
17	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau			√	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	86,93%	98,90%				
18	Persentase Rumah Tidak Layak Huni		√		5.00%	7.00%	10.00%	12.00%	14.00%	12,22%	1,10%				
19	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		√		50.00%	55.00%	65.00%	75.00%	80.00%	3,55%	24,44%				
20	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani			√	50.00%	55.00%	65.00%	75.00%	80.00%	100.00%	88,03%				
21	Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang			√	0.25%	0.19%	0.10%	0.04%	0.00%	100.00%	100,00%				
22	Nilai survey kepuasan internal			√	82.04	82.86	83.69	84.53	85.37	82.94	79,79				
23	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			√	100%	100%	100%	100%	100%	69,81%	75,47%				

VI.II-21

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria)	Target IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
24	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			√	100%	100%	100%	100%	100%	75,00%	100,00%				
25	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor			√	44,40%	-	-	-	-	44,40%	-				
26	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/ kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)			√	36,20%	-	-	-	-	5,71%	-				
27	Persentase jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP			√	100,00%	-	-	-	-	104%	-				
28	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Prioritas di Kota Malang			√	1,27%	-	-	-	-	2,73%	-				
29	Persentase dokumen perencanaan dan sistem informasi tata ruang			√	80,00%	-	-	-	-	77,78%	-				
30	Persentase penurunan titik genangan air			√	28,00%	-	-	-	-	16,00%	-				
31	Persentase pelayanan keterangan rencana kota sesuai SOP				80,00%	-	-	-	-	100,00%	-				

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPRPKP
 Kota Malang Tahun 2014-2018

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pekerjaan Umum				274,002,453,000	234,216,514,063				212,613,949,493	138,474,498,738	N/A	N/A	N/A	0.78	0.59	(0.15)	(0.35)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				3,687,357,600	2,158,285,000				3,016,576,320	1,673,693,768	N/A	N/A	N/A	0.82	0.78	(0.41)	(0.45)
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				247,550,000	241,718,600				173,479,530	208,410,450	N/A	N/A	N/A	0.70	0.86	(0.02)	0.20
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				566,300,000	377,700,000				422,224,798	250,219,073	N/A	N/A	N/A	0.75	0.66	(0.33)	(0.41)
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				95,307,600	85,318,900				89,419,600	81,220,400	N/A	N/A	N/A	0.94	0.95	(0.10)	(0.09)
01.10	Penyediaan alat tulis kantor				145,349,000	292,829,000				141,164,550	223,084,190	N/A	N/A	N/A	0.97	0.76	1.01	0.58
01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				14,968,000	23,612,000				12,865,000	22,276,000	N/A	N/A	N/A	0.86	0.94	0.58	0.73
01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				1,219,144,000	495,233,500				1,037,605,477	442,418,200	N/A	N/A	N/A	0.85	N/A	(0.59)	(0.57)
01.17	Penyediaan makanan dan minuman				241,140,000	205,173,000				189,854,050	121,123,500	N/A	N/A	N/A	0.79	0.59	(0.15)	(0.36)
01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				372,940,000	411,700,000				301,195,115	306,717,955	N/A	N/A	N/A	0.81	0.75	0.10	0.02
01.20	Kegiatan Penunjang Pengadaan Barang dan Jasa				699,297,000					593,819,200		N/A	N/A	N/A	0.85	N/A	(1.00)	(1.00)
01.31	Pawai Pembangunan				25,000,000					24,669,000		N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	(1.00)	(1.00)
01.50	Inventarisasi Aset SKPD				26,050,000					23,240,000		N/A	N/A	N/A	0.89	N/A	(1.00)	(1.00)

VI.II-23

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01.51	Pendataan dan Penyerahan Arsip				34,312,000					7,040,000		N/A	N/A	N/A	0.21	N/A	(1.00)	(1.00)
	Peringatan/Kegiatan Insidentil					25,000,000					18,224,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73	N/A	N/A
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				2,349,592,900	1,274,201,500				2,075,276,900	1,105,936,303	N/A	N/A	N/A	0.88	0.87	(0.46)	(0.47)
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				1,182,970,000	390,000,000				1,050,710,000	342,849,200	N/A	N/A	N/A	0.89	N/A	(0.67)	(0.67)
02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				743,229,500	131,900,000				667,753,000	59,946,703	N/A	N/A	N/A	0.90	0.45	(0.82)	(0.91)
02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				168,400,000	62,000,000				136,045,400	19,508,000	N/A	N/A	N/A	0.81	0.31	(0.63)	(0.86)
02.49	Pembuatan Interior DPUPR				181,343,400					167,800,000		N/A	N/A	N/A	0.93	N/A	(1.00)	(1.00)
02.90	Pemeliharaan Taman				73,650,000	108,100,000				52,968,500	107,000,000	N/A	N/A	N/A	0.72	0.99	0.47	1.02
	Pengadaan bbm dan pelumas					532,200,000					528,560,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	N/A
	Penatausahaan Barang Milik Daerah					50,001,500					48,072,400	N/A	N/A	N/A	N/A	0.96	N/A	N/A
05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				465,405,000	134,000,000				279,893,650	11,600,000	N/A	N/A	N/A	0.60	0.09	(0.71)	(0.96)
05.27	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur				236,885,000	134,000,000				92,342,200	11,600,000	N/A	N/A	N/A	0.39	0.09	(0.43)	(0.87)
05.28	Sosialisasi Proses Pencairan Anggaran				93,000,000					78,737,250		N/A	N/A	N/A	0.85	N/A	(1.00)	(1.00)
05.29	Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statemen)				25,770,000					16,304,200		N/A	N/A	N/A	0.63	N/A	(1.00)	(1.00)

VI.II-24

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
05.30	Pengembangan Sistem Informasi SKPD				24,150,000					16,450,000		N/A	N/A	N/A	0.68	N/A	(1.00)	(1.00)
05.51	Pembuatan Buletin DPUPR				85,600,000					76,060,000		N/A	N/A	N/A	0.89	N/A	(1.00)	(1.00)
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan				664,655,600	1,152,643,000				466,588,450	907,589,000	N/A	N/A	N/A	0.70	0.79	0.73	0.95
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				37,085,000					31,619,000		N/A	N/A	N/A	0.85	N/A	(1.00)	(1.00)
06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran				370,752,000					271,674,650		N/A	N/A	N/A	0.73	N/A	(1.00)	(1.00)
06.26	Penyusunan Profil DPUPPB				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
06.30	Penyusunan SAKIP SKPD				20,000,000					13,035,000		N/A	N/A	N/A	0.65	N/A	(1.00)	(1.00)
06.31	Penyusunan Data Tahunan Ke-PUan				51,700,000					47,190,000		N/A	N/A	N/A	0.91	N/A	(1.00)	(1.00)
06.78	Penyusunan KUAPPAS,RKA,DPA,D PPA , dan PRKA				65,687,000					52,752,400		N/A	N/A	N/A	0.80	N/A	(1.00)	(1.00)
06.88	Penyusunan Analisa Jabatan				76,161,600					18,000,000		N/A	N/A	N/A	0.24	N/A	(1.00)	(1.00)
06.89	Penyusunan SP, SKM, SPM dan SOP SKPD				43,270,000					32,317,400		N/A	N/A	N/A	0.75	N/A	(1.00)	(1.00)
	Penyusunan laporan keuangan					840,014,000					726,845,500	N/A	N/A	N/A	N/A	0.87	N/A	N/A
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat					24,112,000					18,158,500	N/A	N/A	N/A	N/A	0.75	N/A	N/A
	Penyusunan LAKIP SKPD					31,050,000					24,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.78	N/A	N/A
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA					43,367,000					26,331,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.61	N/A	N/A
	Penyusunan/Reviu Renstra					148,050,000					107,976,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.73	N/A	N/A
	Penyusunan Renja/RKT					35,900,000					4,148,000							

VI.II-25

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Penyusunan Profil SKPD					30,150,000					-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A
15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				5,743,000,000	2,639,698,600				5,508,490,000	2,353,786,000	N/A	N/A	N/A	0.96	0.89	(0.54)	(0.57)
15.01	Pavingisasi Jalan di Kota Malang				1,743,000,000	2,439,104,600				1,705,948,000	2,187,918,000	N/A	N/A	N/A	0.98	0.90	0.40	0.28
15.02	Pembangunan Pedestrian di Kota Malang				4,000,000,000					3,636,674,000		N/A	N/A	N/A	0.91	N/A	(1.00)	(1.00)
	Perencanaan Pembangunan Jalan					133,762,000				126,508,000	126,508,000							
	Perencanaan Pembangunan Jembatan					66,832,000				39,360,000	39,360,000							
16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong				4,765,868,500	2,886,092,650				1,770,120,000	2,322,261,000	N/A	N/A	N/A	0.37	0.80	(0.39)	0.31
16.01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong				4,765,868,500	2,287,795,650				1,770,120,000	1,770,120,000	N/A	N/A	N/A	0.37	0.77	(0.52)	0.00
	Penyediaan /pemeliharaan saluran air limbah (limpasan permukaan) (DBHCHT)					598,297,000					552,141,000							
17	Program Pembangunan dan pemeliharaan turap/talud/brojong				4,613,604,000	1,275,809,800				4,372,575,000	1,001,377,000	N/A	N/A	N/A	0.95	0.78	(0.72)	(0.77)
17.01	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong				4,199,230,000					3,968,248,000		N/A	N/A	N/A	0.94	N/A	(1.00)	(1.00)
17.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong				414,374,000	1,275,809,800				404,327,000	1,001,377,000	N/A	N/A	N/A	0.98	0.78	2.08	1.48

VI.II-26

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan				144,495,207,300	116,954,007,951				135,335,825,874	78,406,995,000	N/A	N/A	N/A	0.94	0.67	(0.19)	(0.42)
18.01	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Pedestrian Kota Malang				5,000,000,000	3,075,000,000				4,967,633,000	3,027,667,000	N/A	N/A	N/A	0.99	0.98	(0.39)	(0.39)
18.02	Pemeliharaan Rutin Jembatan				2,750,000,000	2,104,000,000				2,574,188,250	1,479,180,000	N/A	N/A	N/A	0.94	0.70	(0.23)	(0.43)
18.03	Pemeliharaan Insidentil Jalan				5,032,425,000	7,830,101,000				5,025,967,750	7,802,410,000	N/A	N/A	N/A	1.00	1.00	0.56	0.55
18.04	Pemeliharaan Insidentil Jembatan				2,750,000,000	3,066,000,000				2,436,767,250	3,016,824,000	N/A	N/A	N/A	0.89	0.98	0.11	0.24
18.05	Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang				67,247,939,300	44,904,217,000				60,391,249,000	23,458,286,000	N/A	N/A	N/A	0.90	0.52	(0.33)	(0.61)
18.06	Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang				524,760,000	11,351,440,000				496,520,000	9,404,617,000	N/A	N/A	N/A	0.95	0.83	20.63	17.94
18.07	Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang				2,000,000,000	19,082,705,000				1,825,592,000	14,823,180,000	N/A	N/A	N/A	0.91	0.78	8.54	7.12
18.08	Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)				59,190,083,000	16,364,069,000				57,617,908,624	9,565,021,000	N/A	N/A	N/A	0.97	0.58	(0.72)	(0.83)
	Peningkatan Jalan (DAK)					4,846,771,000					4,476,182,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.92	N/A	N/A
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)					2,300,843,951					-							
	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan/jembatan					2,028,861,000					1,353,628,000							
22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan				1,367,575,000	757,050,000				771,643,000	684,157,000	N/A	N/A	N/A	0.56	0.90	(0.45)	(0.11)
22.01	Peningkatan Kapasitas SDM bidang Bina Marga				67,575,000	100,000,000				-	80,817,000	N/A	N/A	N/A	0.00	0.81	0.48	N/A

VI.II-27

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
22.02	Perencanaan Jaringan Jalan dan Jembatan				1,000,000,000					496,559,000		N/A	N/A	N/A	0.50	N/A	(1.00)	(1.00)
22.03	Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Jalan di Kota Malang				300,000,000	350,000,000				275,084,000	346,496,000	N/A	N/A	N/A	0.92	N/A	0.17	0.26
22.04	Pembuatan/Pengembangan Sistem Informasi Jembatan di Kota Malang				-	307,050,000				-	256,844,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.84	N/A	N/A
24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				4,081,000,000	2,388,040,000				3,354,373,300	1,832,630,400	N/A	N/A	N/A	0.82	0.77	(0.41)	(0.45)
24.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya				463,792,000	150,000,000				98,548,000	95,791,000	N/A	N/A	N/A	0.21	0.64	(0.68)	(0.03)
24.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan berkala jaringan irigasi di Kota Malang (DAK)				3,617,208,000	2,238,040,000				3,255,825,300	1,736,839,400	N/A	N/A	N/A	0.90	0.78	(0.38)	(0.47)
27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah				14,221,546,000	11,515,474,532				11,591,956,648	7,483,856,882	N/A	N/A	N/A	0.82	0.65	(0.19)	(0.35)
27.01	Pemeliharaan Rutin Air Minum dan Air Limbah				1,555,500,000	3,265,330,000				1,376,138,000	1,540,465,000	N/A	N/A	N/A	0.88	0.47	1.10	0.12
27.02	Pembangunan Instalasi Air Minum dan Air Limbah				6,010,000,000	1,435,000,000				4,440,718,000	135,055,000	N/A	N/A	N/A	0.74	0.09	(0.76)	(0.97)
27.03	Pendampingan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Air Limbah Domestik				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	#DIV/0!	N/A	N/A

VI.II-28

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
27.04	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)				239,246,000	300,000,000				225,234,400	296,792,200	N/A	N/A	N/A	0.94	0.99	0.25	0.32
27.05	Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik				100,000,000					96,739,800		N/A	N/A	N/A	0.97	N/A	(1.00)	(1.00)
27.06	Sosialisasi Rencana Pelaksanaan IPAL Kawasan di 14 kelurahan				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27.07	Review Perda Retribusi Umum				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27.08	Pembinaan Rutin Hippam				322,105,600	200,000,000				256,012,900	185,574,000	N/A	N/A	N/A	0.79	N/A	(0.38)	(0.28)
27.09	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk Limbah Domestik				200,000,000					182,427,000		N/A	N/A	N/A	0.91	N/A	(1.00)	(1.00)
27.10	Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)				66,799,000	280,000,000				62,031,600	271,340,150	N/A	N/A	N/A	0.93	0.97	3.19	3.37
27.11	Rehabilitasi/pembangunan berkala sarana dan prasarana Air Minum di Kota Malang (DAK)				3,586,895,400					3,308,093,000		N/A	N/A	N/A	0.92	N/A	(1.00)	(1.00)
27.12	Pembangunan/pekerjaan Saluran Sanitasi di Kota Malang (DAK)				2,141,000,000					1,644,561,948		N/A	N/A	N/A	0.77	N/A	(1.00)	(1.00)
	Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK)					2,221,984,532					1,602,854,532	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72	N/A	N/A
	Pembangunan SPAM BJP atau peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi Menjadi BJP Terlindungi					1,413,160,000					1,336,375,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.95	N/A	N/A

VI.II-29

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	dengan Modul Sumur : Dangkal (DAK)																	
	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)					2,400,000,000					2,115,401,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	N/A	N/A
28	Program Pembangunan Sumber Daya Air				313,792,000	300,000,000				299,841,000	299,177,000	N/A	N/A	N/A	0.96	1.00	(0.04)	(0.00)
28.01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumber Daya Air				313,792,000	300,000,000				299,841,000	299,177,000	N/A	N/A	N/A	0.96	1.00	(0.04)	(0.00)
29	Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan				920,000,000	226,330,000				677,483,250	119,860,000	N/A	N/A	N/A	0.74	0.53	(0.75)	(0.82)
29.01	Pengawasan terhadap pendirian bangunan pada kawasan perumahan dan permukiman di kota malang				150,000,000					97,565,000		N/A	N/A	N/A	0.65	N/A	(1.00)	(1.00)
29.02	Pengawasan terhadap pendirian bangunan pada kawasan industri , perdagangan dan jasa di kota malang				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29.03	Fasilitasi/Mediasi dan Monitoring Penyelesaian Masalah Pengendalian Bangunan				150,000,000					48,371,250		N/A	N/A	N/A	0.32	N/A	(1.00)	(1.00)
29.04	Identifikasi Pelanggaran Bangunan				570,000,000	107,300,000				531,547,000	53,360,000	N/A	N/A	N/A	0.93	0.50	(0.81)	(0.90)
29.05	Penertiban dan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Bangunan				50,000,000					-		N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	(1.00)	N/A
	Pengawasan terhadap pendirian bangunan					119,030,000					66,500,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.56	N/A	N/A

VI.II-30

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	pada kawasan perumahan dan permukiman di kota Malang																	
31	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor				58,102,741,100	65,076,308,300				16,468,196,201	17,047,636,085	N/A	N/A	N/A	0.28	0.26	0.12	0.04
31.01	Pembangunan Islamic Center				40,000,000,000	45,039,600,000				943,507,200	1,270,000	N/A	N/A	N/A	0.02	0.00	0.13	(1.00)
31.02	Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor				1,000,000,000	1,212,500,000				920,590,500	1,162,974,000	N/A	N/A	N/A	0.92	0.96	0.21	0.26
31.03	Pemeliharaan Insidental Gedung /Bangunan Kantor				2,000,000,000	2,223,000,000				1,936,956,250	2,163,869,000	N/A	N/A	N/A	0.97	0.97	0.11	0.12
31.04	Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan Kantor				12,452,139,800	12,973,540,000				10,246,430,000	10,451,315,500	N/A	N/A	N/A	0.82	0.81	0.04	0.02
31.05	Operasional UPT Perkantoran Terpadu				2,225,410,000	500,000,000				2,007,420,051	380,945,000	N/A	N/A	N/A	0.90	0.76	(0.78)	(0.81)
31.06	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu				425,191,300	2,456,028,300				413,292,200	2,223,286,585	N/A	N/A	N/A	0.97	0.91	4.78	4.38
31.07	Penyusunan AMDAL Pembangunan Islamic Center				-	671,640,000				-	663,976,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.99	N/A	N/A
32	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong				21,906,748,000	20,862,947,730				20,884,203,850	19,051,914,000	N/A	N/A	N/A	0.95	0.91	(0.05)	(0.09)
32.01	Pemeliharaan Rutin Drainase				4,500,000,000	4,500,000,000				4,440,086,750	4,369,488,000	N/A	N/A	N/A	0.99	0.97	0.00	(0.02)
32.02	Pemeliharaan Insidental Drainase				7,500,000,000	7,825,335,000				7,395,806,100	7,730,955,000	N/A	N/A	N/A	0.99	0.99	0.04	0.05

VI.II-31

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
32.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong				9,906,748,000	8,537,612,730				9,048,311,000	6,951,471,000	N/A	N/A	N/A	0.91	0.81	(0.14)	(0.23)
33	Program Perencanaan Ruang				658,000,000	211,240,000				414,510,000	204,823,000	N/A	N/A	N/A	0.63	0.97	(0.68)	(0.51)
33.01	Review peta situasi di Kota Malang				150,000,000	161,240,000				123,649,000	156,433,000	N/A	N/A	N/A	0.82	0.97	0.07	0.27
33.02	Publikasi dan Penggandaan RDTR dan PZ				-	-				-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.03	Peringatan Hari Tata Ruang				258,000,000	-				121,064,000	-	N/A	N/A	N/A	0.47	N/A	(1.00)	(1.00)
33.04	Pendampingan Proses Persub RTRW				-	-				-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.05	Peningkatan Kapasitas SDM bidang Tata Ruang				50,000,000	-				-	-	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	(1.00)	N/A
33.06	Penyusunan Naskah akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Malang				-	-				-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33.07	Penyusunan RTBL Kawasan Interchange Jalan Tol				150,000,000	-				123,519,000	-	N/A	N/A	N/A	0.82	N/A	(1.00)	(1.00)
33.08	Updating Sistem Informasi Capaian Luasan RTH Publik				50,000,000	50,000,000				46,278,000	48,390,000	N/A	N/A	N/A	0.93	0.97	0.00	0.05
34	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				780,000,000	183,430,000				478,721,000	180,276,000	N/A	N/A	N/A	0.61	0.98	(0.76)	(0.62)
34.01	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota				250,000,000	183,430,000				157,547,000	180,276,000	N/A	N/A	N/A	0.63	0.98	(0.27)	0.14
34.02	Peningkatan pelayanan penerbitan				80,000,000	-				-	-	N/A	N/A	N/A	0.00	N/A	(1.00)	N/A

VI.II-32

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	keterangan laik struktur bangunan																	
34.03	Penyusunan DED Kawasan Interchange Jalan Tol				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34.04	Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Penerapan sanksi terhadap pelanggaran bangunan				150,000,000					92,125,000		N/A	N/A	N/A	0.61	N/A	(1.00)	(1.00)
34.05	Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Mekanisme perijinan bangunan darurat/sementara				-					-		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34.06	Penyusunan Data Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwal) tentang Mekanisme kepemilikan bangunan				150,000,000					92,411,000		N/A	N/A	N/A	0.62	N/A	(1.00)	(1.00)
34.07	Bimtek Pengendalian Pemanfaatan Ruang				100,000,000					89,260,000		N/A	N/A	N/A	0.89	N/A	(1.00)	(1.00)
34.08	Pendataan Rencana Aksi Green City				50,000,000					47,378,000		N/A	N/A	N/A	0.95	N/A	(1.00)	(1.00)
35	Program Pembangunan sistem informasi/data base sumber daya air dan drainase				1,027,260,000	849,155,000				878,319,000	749,859,500	N/A	N/A	N/A	0.86	0.88	(0.17)	(0.15)
35.01	Peningkatan Kapasitas SDM bidang Sumber Daya Air dan Drainase				250,000,000	100,000,000				187,041,000	59,260,500	N/A	N/A	N/A	0.75	0.59	(0.60)	(0.68)
35.02	Perencanaan Jaringan Sumber Daya Air dan Drainase				377,260,000	349,155,000				325,766,000	299,873,000	N/A	N/A	N/A	0.86	0.86	(0.07)	(0.08)

VI.II-35

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Uji Mutu dan Alat Berat																	
40.02	Peningkatan Pelayanan persewaaan alat berat				703,000,000	778,470,000				682,318,000	770,916,400	N/A	N/A	N/A	0.97	0.99	0.11	0.13
40.03	Peningkatan Pelayanan laboratorium uji mutu bahan				372,000,000	291,530,000				362,596,000	282,681,000	N/A	N/A	N/A	0.97	0.97	(0.22)	(0.22)
41	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan				-	1,000,000,000				682,318,000	914,486,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.91	N/A	0.34
41.01	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan prioritas					500,000,000				-	429,056,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.86	N/A	N/A
41.02	Penyusunan RTBL Kawasan Prioritas Perumahan dan Kawasan Permukiman					500,000,000				682,318,000	485,430,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.97	N/A	(0.29)
1	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan Permukiman				8.697.173.000,00	7.634.275.000,00				8.234.187.950,00	7.085.372.350,00	N/A	N/A	N/A	94,68	92,81%		
2	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)				2.570.937.500,00	2.572.837.500,00				2.472.296.000,00	2.486.067.510,00	N/A	N/A	N/A	96,16	96,63%		
3	Program Penataan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				144.484.000,00	200.000.000,00				141.659.000,00	168.389.000,00	N/A	N/A	N/A	98,04	93,55%		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				34.785.713.451,01	37.150.783.450,00				32.129.911.217,00	29.723.756.569,00	N/A	N/A	N/A	92,37	79,79%		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.427.530.000,00	11.111.431.850,00				3.828.738.266,10	9.633.439.661,00	N/A	N/A	N/A	70,54	86,70%		

VI.II-36

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				264.000.000,00	185.000.000,00				249.263.330,00	0,00	N/A	N/A	N/A	94,42	0%		
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				432.702.296,00	310.655.400,00				361.348.900,00	163.074.800,00	N/A	N/A	N/A	83,51	52,49%		
9	Program Pembangunan Sarana Prasarana Penerangan Jalan				2.708.667.502,99	18.281.981.500,00				2.627.368.500,00	17.551.074.586,58	N/A	N/A	N/A	97,00	96,00%		
10	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Penerangan Jalan				12.257.640.250,00	8.425.292.150,00				12.238.252.125,00	8.263.983.497,47	N/A	N/A	N/A	99,84	98,09%		

Tabel 2.10
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPUPRPKP
 Kota Malang Tahun 2018-2023

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236,677,030,281.20					118,087,595,256.69					0.499						
	Program Pelayanan Kesekretariatan																	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,705,736,400					1,328,677,163					0.78						
	Penyediaan jasa surat menyurat	245,000,000					210,804,140					0.86						
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	315,872,000					221,476,648					0.70						
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	330,423,000					327,365,000					0.99						
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87,310,400					81,057,500					0.93						
	Penyediaan alat tulis kantor	157,371,000					157,370,925					1.00						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23,612,000					16,129,000					0.68						
	Penyediaan makanan dan minuman	169,448,000					102,899,000					0.61						
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351,700,000					190,059,200					0.54						
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	25,000,000					21,515,750					0.86						

VI.II-38

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3,327,369,090					3,000,093,856					0.90						
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	66,550,000					47,749,950					0.72						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	155,480,000					141,003,800					0.91						
	Pengadaan bbm dan pelumas	533,400,000					532,200,000					1.00						
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	-					-					-						
	Pemeliharaan Taman Perkantoran	111,760,000					107,536,000					0.96						
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	32,589,000					24,679,200					0.76						
	Operasional Perkantoran Terpadu Kota Malang	2,213,790,090					1,973,966,256					0.89						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu	213,800,000					172,958,650					0.81						
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-					-					-						
	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	-					-					-						
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	613,825,600					455,486,650					0.74						
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26,400,000					2,330,000					0.09						
	Penyusunan laporan keuangan	347,425,600					338,581,650					0.97						
	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	65,000,000					49,225,000					0.76						

VI.II-39

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	31,100,000					-					-						
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	35,000,000					6,300,000					0.18						
	Penyusunan/Reviu Renstra	25,000,000					-					-						
	Penyusunan Renja/RKT	83,900,000					59,050,000					0.70						
	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	-					-					-						
	Penyusunan Profil SKPD	-					-					-						
	Program Bina Marga																	
	Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian	69,408,219,762					55,987,587,664					0.81						
	Pembangunan/rehabilitasi jalan paving Kota Malang	2,378,001,000					2,265,753,000					0.95						
	Rehabilitasi/pengembangan jalan di Kota Malang	28,025,660,257					22,730,383,000					0.81						
	Rehabilitasi/pengembangan pedestrian di Kota Malang	1,610,729,105					1,606,951,000					1.00						
	Pemeliharaan rutin jalan	3,031,930,000					2,956,675,921					0.98						
	Pemeliharaan insidental jalan	8,481,440,000					8,095,062,743					0.95						
	Perencanaan infrastruktur jalan dan pedestrian di Kota Malang	3,138,655,400					2,198,301,000					0.70						

VI.II-43

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan/rehabilitasi instalasi air limbah	200,000,000					147,695,500					0.74						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	5,883,348,000					5,336,076,600					0.91						
	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (IPLT)	3,100,000,000					2,633,560,400					0.85						
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	5,405,959,813					4,551,512,860					0.84						
	Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	1,018,867,563					1,008,752,000					0.99						
	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	678,368,000					646,395,810					0.95						
	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	92,424,250					83,831,200					0.91						
	Pembinaan Rutin HIPPAM	61,160,000					61,160,000					1.00						
	Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)	3,555,140,000					2,751,373,850					0.77						
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	752,340,000					587,890,500					0.78						
	Sosialisasi SLF	150,000,000					116,157,900					0.77						
	Kegiatan Pelaksanaan SLF	251,170,000					234,533,000					0.93						
	Pendataan Pembangunan Gedung	200,000,000					99,204,000					0.50						
	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	151,170,000					137,995,600					0.91						

VI.II-44

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Bina Jasa Kontruksi	1,706,170,000					1,158,643,900					0.68						
	Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	301,170,000					188,542,900					0.63						
	Penyusunan/Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi	100,000,000					99,690,100					1.00						
	Penyusunan HSPK dinas PUPR	200,000,000					196,530,600					0.98						
	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya	320,000,000					305,322,200					0.95						
	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	225,000,000					2,187,800					0.01						
	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	360,000,000					270,292,800					0.75						
	Penyusunan Data Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	200,000,000					96,077,500					0.48						
	Layanan Penyediaan Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi	-					-					-						
	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	102,675,922,706					5,968,612,467					0.06						
	Pembangunan Islamic Center	46,242,850,000					9,415,000					0.00						
	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	52,839,962,796					2,998,789,993.83					0.06						
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	1,006,850,000					912,951,200					0.91						
	Pemeliharaan Insidental Gedung/Bangunan Kantor	2,011,450,000					1,478,920,863					0.74						

VI.II-45

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Angga ran	Reali sasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	400,000,000					394,225,500					0.99						
	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	174,809,910					174,309,910					1.00						
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu	-					-											
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	3,284,269,000					2,697,551,200					0.82						
	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	650,000,000					535,659,500					0.82						
	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Prioritas	2,634,269,000					2,161,891,700					0.82						
	Program Penataan Ruang dan Pertanahan																	
	Program Perencanaan Ruang	384,150,000					318,076,000					0.83						
	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	200,000,000					148,633,000					0.74						
	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	120,690,000					116,723,000					0.97						
	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	63,460,000					52,720,000					0.83						
	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	142,350,000					133,385,000					0.94						
	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang	87,400,000					78,795,000					0.90						

VI.II-46

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	54,950,000					54,590,000					0.99						
	Program Pemanfaatan Tata Ruang	192,840,000					186,377,850					0.97						
	Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota	192,840,000					186,377,850					0.97						
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		400,549,108,124.94					326,393,109,453.00					0.88					
	Program Bina Marga		235,475,897,794.94					179,396,875,278.00										
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang		45,187,486,443.09					25,131,568,200.00					0.65					
	Pembangunan/Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang		1,670,922,000.00					1,660,061,700.00					0.99					
	Pemeliharaan Rutin Jalan		16,890,113,000.00					16,313,667,100.00					0.97					
	Pemeliharaan Insidentil Jalan		13,738,065,000.00					13,263,445,100.00					1.00					
	Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang		1,048,380,000.00					1,027,767,700.00					0.98					
	Peningkatan Jalan di Kota Malang (DAK)		496,432,000.00					495,352,000.00					1.00					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang (Banprov)		22,889,763,000.00					10,030,806,000.00					0.57					

VI.II-47

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembangunan Pedestrian di Kota Malang		317,040,700.00					317,040,700.00					1.00					
	Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang		109,759,700.00					109,759,700.00					1.00					
	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang		54,402,929,654.94					43,181,824,758.00					0.96					
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		5,068,612,350.00					5,052,705,400.00					1.00					
	Pemeliharaan Insidentil jembatan		5,096,243,696.91					3,021,079,700.00					1.00					
	Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang		499,674,000.00					482,598,700.00					0.97					
	Rehabilitasi/Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang		4,245,019,000.00					2,786,526,000.00					0.66					
	Pemeliharaan Rutin Drainase		3,968,290,600.00					3,413,964,000.00					0.86					
	Pemeliharaan Insidentil Drainase		8,893,859,400.00					8,893,667,000.00					1.00					
	Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang		354,812,000.00					308,072,000.00					0.87					
	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		5,000,889,000.00					3,372,797,000.00					0.67					
	Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang		1,015,192,000.00					682,027,000.00					0.66					
	Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang		500,000,000.00					496,832,000.00					0.99					

VI.II-48

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kota Malang (Banprov)		795,237,000.00					727,093,000.00					0.91					
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		600,472,000.00					595,582,000.00					0.99					
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (DAK)		-					-										
	Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat		500,831,250.00					414,027,250.00					0.83					
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan		175,500,000.00					169,470,000.00					0.97					
	Perencanaan Penerangan jalan		365,587,000.00					357,787,000.00					0.98					
	Pembangunan Penerangan Jalan		7,014,871,000.00					6,081,182,500.00					0.87					
	Pemeliharaan Penerangan Jalan		34,629,916,000.00					31,010,171,770.00					0.90					
													0.90					
													Tinggi					
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan		13,873,669,000.00					2,340,237,700.00										
	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)		13,873,669,000.00					2,340,237,700.00					0.72					
													0.72					

VI.II-52

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pengelolaan Perumahan dan PSU		3,180,111,000.00					2,829,589,000.00					0.89					
								-										
	Perencanaan Kawasan Permukiman		583,645,000.00					578,076,000.00					0.99					
	Penataan Kawasan Permukiman		-					-										
	Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman		4,965,870,000.00					4,787,583,000.00					0.96					
	Pemeliharaan Insidentil Kawasan Permukiman		2,362,878,000.00					2,241,519,000.00					0.95					
	Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh		471,605,000.00					467,585,000.00					0.99					
	Penataan Kawasan Kumuh		71,755,000.00					70,665,000.00					0.98					
	Pengelolaan RUSUNAWA		2,992,770,607.00					2,582,445,085.00					0.86					
	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya		-					-					0.95					
													Sangat Tinggi					
			1,357,616,000.00					1,244,895,000.00										
	Program Penataan Ruang dan Pertanahan																	
	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang		233,750,000.00					219,689,000.00					0.94					
	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan		312,150,000.00					310,976,000.00					1.00					
	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota		329,837,000.00					317,125,000.00					0.96					

VI.II-53

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		-					-										
	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah		-					-										
								-										
	Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang		160,000,000.00					98,107,000.00					0.61					
	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang		54,439,000.00					53,129,000.00					0.98					
	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang		117,440,000.00					102,422,000.00					0.87					
	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang		150,000,000.00					143,447,000.00					0.96					
	Sosialisasi Rencana Tata Ruang		-					-										
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah		-					-										
													0.90					
													Sangat Tinggi					
	Program Pelayanan Kesekretariatan		10,141,514,350.00					7,963,808,147.00										
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi		222,476,000.00					222,293,000.00					1.00					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah		138,675,000.00					88,142,560.00					0.64					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		106,650,000.00					82,197,250.00					0.77					
	Penyusunan laporan keuangan		358,050,000.00					311,799,902.00					0.87					

VI.II-54

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat		84,685,000.00					83,237,500.00					0.98					
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan		81,635,000.00					79,251,250.00					0.97					
	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA		40,711,000.00					32,555,250.00					0.80					
	Penyusunan Renja/RKT		204,520,000.00					193,591,000.00					0.95					
	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)		22,970,000.00					4,957,850.00					0.22					
	Penyusunan Profil Perangkat Daerah		62,520,000.00					54,287,700.00					0.87					
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		174,120,000.00					90,463,819.00					0.52					
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor		1,853,400,000.00					1,407,729,520.00					0.76					
	Pemeliharaan Taman Perkantoran		447,840,000.00					425,425,600.00					0.95					
	Penyediaan jasa surat menyurat		202,355,000.00					146,946,550.00					0.73					
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1,697,500,000.00					1,073,177,087.00					0.63					
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		1,570,116,500.00					1,472,603,750.00					0.94					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas		191,760,000.00					149,407,425.00					0.78					
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		529,767,350.00					493,641,900.00					0.93					
	Penyediaan alat tulis kantor		316,751,400.00					315,001,400.00					0.99					
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		98,808,300.00					92,868,300.00					0.94					
	Penyediaan makanan dan minuman		293,000,000.00					152,434,000.00					0.52					

VI.II-55

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		ke-					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Angga ran	Reali sasi	
		2019	2020	2021	2022	2023													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		514,733,800.00					134,835,534.00					0.26						
	Peringatan/Kegiatan Insidental		-					-					-						
	Pengadaan bbm dan pelumas		884,950,000.00					824,960,000.00					0.93						
	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur		43,520,000.00					32,000,000.00					0.74						

Pada tahun 2019 dan 2020 belum dapat dikur rasio antara realisasi dan anggaran karena terdapat perubahan nomenklatur program dan kegiatan disebabkan peralihan dari Renstra Tahun 2017-2018 ke Renstra periode 2018-2023. Adapun kendala utama yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu pelaksanaan kegiatan konstruksi mayoritas selesai di tribulan empat sehingga untuk mengurangi beban kerja penatausahaan keuangan pada akhir tahun, maka diperlukan pengendalian rutin selama masa konstruksi guna memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, serta proses penyelesaian administrasi konstruksi sesuai SOP agar dana tersalurkan sesuai jadwal yang direncanakan.

Adapun perencanaan target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan seoptimal mungkin, agar dapat memenuhi standar pelayanan minimal maupun IKK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta lebih terarah guna mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas dengan sumber pendanaan dari APBD maupun anggaran-anggaran dari pusat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan sebagai akibat dan pertumbuhan dan perkembangan kawasan baik dalam penataan ruang dan penyediaan kebutuhan infrastruktur, merupakan kondisi faktual yang perlu diantisipasi dan disusun rencana pemecahannya, sehingga kedepan diharapkan dapat diwujudkan sebuah kawasan perkotaan dan lingkungan permukiman aman dan nyaman yang mampu menunjang kehidupan masyarakat kota.

Mewujudkan hal tersebut, maka dalam penyediaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu, diperlukan :

1. ketersediaan infrastruktur perkotaan yang representatif untuk menunjang aksesabilitas, akselerasi dan pertumbuhan Kota Malang;
2. ketersediaan infrastruktur jalan kota yang memiliki kapasitas dan kinerja optimal sesuai perkembangan kebutuhan transportasi;
3. ketersediaan saluran drainase dan saluran pematuan lainnya yang mampu mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota;
4. ketersediaan prasarana jembatan yang representatif sebagai penunjang kelancaran dan aksesabilitas kawasan-kawasan kota;
5. ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pengolahan air limbah domestik yang representatif sebagai penunjang kesehatan dan kenyamanan lingkungan;
6. ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air bersih pada kawasan-kawasan rawan air bersih dan belum terlayani jaringan PDAM;
7. ketersediaan fasilitas gedung daerah dan fasum yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan organisasi perangkat daerah;

8. ketersediaan produk-produk rencana tata bangunan dan lingkungan yang dapat dijadikan acuan dan standar teknis dalam pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur perkotaan;
9. pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan;
10. ketersediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran penunjang peningkatan kinerja dan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Ketersediaan Sistem Basis Data Terpadu berbasis IT untuk mendukung Ngalam Coamand Center (NCC) guna melakukan update data ke-PU-an yang akurat;
12. Pelaksanaan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal sebagai rintisan munculnya perusahaan daerah pengelola air limbah.
13. Penanganan kawasan kumuh di sekitar DAS memerlukan kesepahaman dan langkah gerak berbagai komponen yang memiliki kewenangan pengelolaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Basis data kawasan kumuh dan backlog perumahan di Kota Malang sebagai dasar perencanaan belum kuat.
15. Banyak masyarakat yang belum sadar administrasi pertanahan.
16. Kewenangan urusan pemerintahan pertanahan yang belum secara eksplisit terpisah dari OPD pertanahan.
17. Pemakaian daya listrik untuk penerangan jalan umum belum efisien.
18. Penyediaan penerangan jalan umum secara ideal belum merata di seluruh wilayah kota.
19. Pengentasan kekumuhan menjadi program prioritas nasional.
20. Opsi pengembangan teknologi lampu penerangan jalan modern semakin bervariasi.
21. Kapasitas sumber daya aparatur semakin meningkat.
22. Menguatnya kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang efisiensi tata kelola penyelenggaraan fungsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai peran yang diharapkan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti jumlah penduduk yang makin meningkat, urbanisasi, transportasi kurang memadai, terbatasnya SDM baik jumlah maupun kompetensi, anggaran yang terbatas, perlunya pembangunan jalan baru untuk memecah kemacetan lalu lintas, pertumbuhan pembangunan perumahan yang sangat cepat, koordinasi antar instansi yang masih kurang, penyediaan data masih sangat minim dan dijabarkan sebagaimana pada tabel berikut.

Di samping itu, pada tanggal 17 Februari 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka proses pengajuan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dialihkan ke Disnaker PMPTSP, sehingga diperlukan revisi target capaian kinerja.

VI.III-2

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah	Unit Kerja
				Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Belum optimalnya infrastruktur Jalan dan Jembatan	Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan jalan, jembatan dan pedestrian		Perubahan peruntukan lahan menjadi kawasan permukiman baru	Arah pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat bersifat parsial	Bidang Bina Marga
				Belum adanya pembangunan jalan lingkaran terkoneksi luar kota	Volume kendaraan yang meningkat	Adanya pemanfaatan jalan untuk kegiatan parkir dan PKL	
				Kapasitas jalan kurang			
				Kapasitas jembatan kurang			
				Masih terdapatnya beberapa ruas jalan yang berlubang	Belum sesuai pemanfaatan jalan antara kelas jalan dan beban kendaraan	Adanya pemanfaatan jalan untuk kegiatan parkir dan PKL	
				Penambahan data jumlah jembatan di Kota Malang yang semula 255 unit menjadi 315 unit sehingga pembagi menjadi lebih besar menyebabkan capaian kinerja menurun			
		Banyaknya pedestrian yang tidak difungsikan secara optimal					
Belum optimalnya daya tampung dan kelancaran aliran air	Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan	Belum optimalnya pembangunan sistem drainase yang terpadu	Tingginya sedimentasi dan sampah yang terbuang di saluran	Masih banyaknya jaringan irigasi yang melintasi wilayah Kota Malang	Bidang Bina Marga		

VI.III-3

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah	Unit Kerja
				Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sumber daya air dan drainase			Berkurangnya daerah resapan, penutupan saluran drainase, ketaatan tata guna lahan, penempatan utilitas lingkungan pada saluran	
		Belum optimalnya kinerja pengelolaan jaringan penerangan jalan	Belum tuntasnya upaya peningkatan validasi database dan konversi teknologi menuju sistem PJU cerdas dan ramah lingkungan yang merata	Validasi database	Perilaku pemanfaatan jaringan penerangan jalan secara illegal (oknum masy)	Belum optimalnya kinerja pengelolaan jaringan penerangan jalan	
				Cakupan layanan	Perkembangan pesat teknologi penerangan jalan ramah lingkungan		
		Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah	Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Belum optimalnya pelaksanaan Perda Nomor 2 tahun 2017		Pelayanan air bersih belum merata
Belum optimalnya penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik	Masih adanya pemanfaatan sungai untuk pembuangan air limbah domestik						
	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat						
1	Belum optimalnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum	Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum dan sosial		Lahan untuk fasilitas umum belum diserahkan kepada pemerintah	Bidang Cipta Karya
				Belum optimalnya pelaksanaan Perda nomor 1 tahun 2012		Kurangnya respon masyarakat terhadap bangunan layak fungsi	Bidang Cipta Karya

VI.III-4

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah	Unit Kerja
				Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Pemerintah Kota Malang	Perkantoran terpadu dimanfaatkan oleh beberapa OPD		Pemeliharaan rutin yang dilakukan hanya pada bangunan luar gedung dan adanya penambahan sarana perkantoran oleh OPD pemanfaat	UPT Perkantoran Terpadu
		Belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Belum optimalnya layanan pembinaan jasa konstruksi	Belum terpenuhinya SPM sistem informasi pelayanan jasa konstruksi		Baru tersedia 2 layanan dari 7 layanan bina jasa konstruksi	Bidang Cipta Karya
		Belum optimalnya pelayanan pengujian konstruksi	Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pengujian konstruksi	Kurangnya sosialisasi ke masyarakat		Pemanfaat lab uji mutu bahan dan persewaan alat berat hanya masyarakat jasa konstruksi saja	UPT Uji Mutu Bahan dan Alat Berat
		Belum optimalnya ketertiban penataan bangunan dan lingkungan	Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kota Malang	belum digunakannya RTBL sebagai acuan pelaksanaan kegiatan		Masih sedikitnya produk RTBL	
	Belum maksimalnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman belum ideal	Pengurangan kawasan kumuh belum optimal	Akurasi monitoring dan cakupan fasilitasi penyerahan PSU perumahan	Kesadaran pengembang dalam proses penyerahan PSU Perumahan	Belum optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Efektifitas kinerja kelembagaan PKP seperti Pokja				Tata Kelola Kewenangan pengelolaan DAS Sungai Strategis Nasional	Belum optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Akurasi penanganan aspek kekumuhan				Fluktuasi anggaran pusat untuk penanganan kumuh			

VI.III-5

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah	Unit Kerja
				Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kapasitas terpasang rusunawa sebagai alternatif hunian	Faktor budaya dan perilaku masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan rusunawa	
		Pandemi Covid-19	Pengurangan anggaran infrastruktur	Refocussing anggaran APBD untuk penanganan Covid-19	Refocussing anggaran DAK Fisik dan DBHCHT untuk penanganan Covid-19	Keterbatasan anggaran	
		Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat belum optimal	Pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat belum optimal	Kewenangan penanganan rumah korban bencana merupakan tusi Perangkat Daerah lain		Kewenangan penanganan rumah korban bencana merupakan tusi Perangkat Daerah lain	
		Belum meratanya kemudahan akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Akses perumahan yang layak bagi semua masyarakat belum terwujud	Fasilitasi skema pembiayaan perumahan belum optimal	Kepastian status kepemilikan RTLH	Belum optimalnya Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Validitas database perumahan (backlog, RTLH, dll)	Pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah daerah						
2	Belum optimalnya kualitas kemanfaatan tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan tata ruang		Menurunnya ruang terbuka persatuan wilayah	Tingginya perubahan pemanfaatan lahan	Bidang Tata Ruang
				Belum optimalnya penegakan perda tata ruang		Tingginya pertumbuhan kawasan baru	
				Kurangnya SDM yang memahami tata ruang secara kualitas dan kuantitas		Belum adanya OPD yang mempunyai tugas untuk penindakan pelanggaran tata ruang	
		Kurang maksimalnya pemantauan	Layanan perijinan pemanfaatan lahan	Model Layanan	Kesadaran masyarakat pemilik tanah	Belum optimalnya tertib pemanfaatan lahan dan pertanahan	

VI.III-6

No	Masalah Pokok	Masalah	Penyebab Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi		Akar Masalah	Unit Kerja
				Internal	Eksternal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tertib pemanfaatan lahan dan pertanahan	dan pertanahan belum ideal	Pengalihan kewenangan penerbitan keterangan rencana kota ke Perangkat Daerah lain	Perkembangan regulasi		Ruang dan Pertanahan
3	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan	Belum optimalnya pelayanan publik	Kecepatan dan ketepatan penanganan pengaduan masyarakat		Penanganan pengaduan terkait perlunya pembangunan fisik, memerlukan waktu pelaksanaannya	Sekretariat
				Kecepatan dan ketepatan pemantauan progress kegiatan		Belum terkoneksi Aplikasi Sistem Informasi Terpadu (SISTER) DPUPR dengan NCC	Sekretariat
				Kurangnya SDM secara kualitas dan kuantitas		Banyaknya personil yang purna tugas	Sekretariat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Malang Tahun 2005-2025. Tema pembangunan RPJPD periode keempat menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun visi dan misi Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Visi pembangunan Kota Malang Tahun 2018-2023 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih yaitu

Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat

Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur,

Dimana tercipta Situasi, Kondisi, Tatanan Dan Karakter Yang Mulia Bagi Kota Malang Beserta Segenap Masyarakatnya.

Visi tersebut mengandung maksud bahwa bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah “martabat” menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi “Kota Malang Bermartabat” diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tantangan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT).

Lebih lanjut, misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Untuk mewujudkan visi “Kota Malang Bermartabat” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Bagi Semua Warga
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan akses pelayanan publik dasar bagi semua warga Kota Malang.
2. Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang serta berwawasan lingkungan.
3. Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender

Penyelenggaraan pemerintah diprioritaskan pada peningkatan kerukunan antar umat beragama dengan menjunjung tinggi keragaman budaya dan toleransi antar umat beragama dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, penyetaraan gender, serta kerukunan sosial.

4. Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel Pembangunan diprioritaskan untuk mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas, pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berangkat dari misi Walikota dan Wakil Walikota Malang terpilih tahun 2018-2023 diatas maka berdasarkan telaah, misi yang memiliki relevansi paling dominan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Misi 2 yaitu

“Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif,
Keberlanjutan dan Keterpaduan”

dengan pola hubungan antara visi, misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu dikarenakan :	Secara geografis kota malang merupakan jalur perlintasan antar wilayah dan Perilaku sosial budaya masyarakat	Tata ruang dan ketersediaan anggaran
			Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan jalan, jembatan dan pedestrian		
			Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan sumber daya air dan drainase		
			Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		
			Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang		
			Belum optimalnya layanan pembinaan jasa konstruksi		
			Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pengujian konstruksi		
			Belum optimalnya kesesuaian dan tertib tata ruang dikarenakan :		
			Belum optimalnya pengembangan kinerja pengelolaan tata ruang		
Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan di Kota Malang	Kota Malang merupakan kota pendidikan dimana lokasi PTN/PTS meyebabkan pembangunan yang tidak merata	Pelaksanaan RTRW secara konsisten			

No	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor				
				Penghambat	Pendorong			
1	Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kinerja pengelolaan jaringan penerangan jalan belum optimal	Akurasi database penerangan jalan umum belum sepenuhnya tercapai	Sudah ada rintisan platform system informasi penerangan jalan umum dan rencana induk yang dapat dijadikan fondasi penguatan akurasi database untuk seluruh wilayah kota			
				Konversi teknologi penerangan jalan umum yang lebih efisien belum tuntas	Semakin variatif dan terjangkau teknologi penerangan jalan ramah lingkungan			
				Sarana penunjang operasional pemeliharaan penerangan jalan umum belum ideal	Peningkatan Kapasitas SDM Penerangan Jalan Umum dapat mendorong lahirnya inovasi yang mengurangi GAP layanan			
					Tersedianya opsi pemanfaatan aplikasi smart PJU sebagai upaya efisiensi tata kelola			
			Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Belum sinkronnya tata kelola terkait kewenangan penanganan kawasan kumuh di DAS dan sempadan Rel KA	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh	Menguatnya komitmen Malang Raya untuk penataan DAS termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	Adanya Pembelajaran dari sejumlah inovasi daerah seperti Kampung Tematik dan Gerakan Menabung Air maupun kisah sukses pilot project KOTAKU	
							Akurasi penanganan indikator kekumuhan belum sepenuhnya terwujud	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi kawasan kumuh yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
					Belum optimalnya kinerja kelompok kerja kota untuk penanganan kawasan kumuh	Menguatnya kebijakan permukiman di level global dan nasional akan menjadi pendorong penguata daerah		
					Belum idealnya anggaran untuk implementasi DED Penanganan Kawasan Kumuh yang telah disusun	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperluas kapasitas cakupan penanganan kawasan		
					Belum optimalnya pelayanan publik	Kurang SDM secara kualitas dan kuantitas		
2	Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel		Belum optimalnya pelayanan publik	Kurang SDM secara kualitas dan kuantitas				

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sudah sejalan dan mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum yaitu :

Visi :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan kedalam lima misi, yang mana relevansi substansi paling kuat dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang adalah pada misi ketiga dan misi keempat, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Misi 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

Misi 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

Dalam implementasinya dilakukan upaya identifikasi sejumlah potensi yang dapat menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan perangkat daerah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

- a. Prioritas anggaran pusat lebih didorong untuk penanganan kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- b. Belum dirumuskannya skema ideal terkait kewenangan pengelolaan DAS Sungai Strategis Nasional di Kota Malang untuk dapat mengakselerasi capaian penanganan kawasan permukiman disekitar DAS.
- c. Skema penanganan RTLH antara lain melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) masih menemui kendala aplikasi di lapangan.
- d. Belum idealnya pemanfaatan system informasi untuk mendorong pencapaian sasaran terkait perumahan rakyat dan permukiman serta infrastruktur pekerjaan umum seperti pengembangan ruang terbuka hijau.

- e. Program Kota Hijau sebagai platform pendorong penyediaan RTH Publik Perkotaan mengalami stagnasi dan memerlukan re-orientasi.

Faktor Pendorong

- a. Adanya proses adopsi New Urban Agenda yang diyakini memperkuat perhatian pada penyediaan hak-hak hunian yang layak bagi seluruh masyarakat
- b. Adanya peningkatan alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh
- c. Adanya penyempurnaan regulasi dan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk percepatan penanganan kawasan kumuh
- d. Kebijakan penguatan pembiayaan penyediaan perumahan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah
- e. Adanya fasilitasi berbagai program inovatif seperti KOTAKU, BSPS, dan Kota Hijau sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat

3.3.2. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Selain mengacu kepada visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunannya juga sejalan dan mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu :

Visi :

“ Pusat Agrobisnis terkemuka , berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa Timur makmur dan berahklak”

Misi :

1. Mengembangkan pekrekonomian Modern Jawa Timur berbasis agro;
2. Mewujudkan SDM yang handal, berahklak mulia dan handal;
3. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup;
4. *Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi;*
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan renstra Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No	Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
A	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
1	Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan Berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya perencanaan infrastruktur yang terpadu	Keterbatasan pemahaman SDM terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan
		Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran		Belum optimalnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Keterbatasan pemahaman SDM terkait keterpaduan pembangunan infrastruktur	Perubahan peruntukan lahan menjadi kawasan permukiman baru
		Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional		belum optimalnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi	Keterbatasan pemahaman SDM terkait kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan
2	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.	Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi		berkurangnya luasan D.I di Kota Malang	pertumbuhan permukiman yg pesat	kawasan investasi
		Meningkatnya ketahanan air		alih fungsi sebagai pematusan	pertumbuhan permukiman yg pesat	kawasan investasi
3	Menyelenggara pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing		belum optimalnya pengembangan fungsi jalan	belum adanya pembangunan jalan lingkaran terkoneksi luar kota	tumbuhnya kawasan permukiman baru
		Meningkatnya kemantapan jalan nasional	kurangnya kapasitas jalan	belum sesuai pemanfaatan jalan antara kelas jalan dan beban kendaraan	meningkatnya volume kendaraan	

VI.III-14

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor		
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong	
A	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
4	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan		Kinerja pengelolaan jaringan penerangan jalan belum optimal	Akurasi database penerangan jalan umum belum sepenuhnya tercapai	Sudah ada rintisan platform system informasi penerangan jalan umum dan rencana induk yang dapat dijadikan fondasi penguatan akurasi database untuk seluruh wilayah kota	
					Konversi teknologi penerangan jalan umum yang lebih efisien belum tuntas	Semakin variatif dan terjangkau teknologi penerangan jalan ramah lingkungan	
						Peningkatan Kapasitas SDM Penerangan Jalan Umum dapat mendorong lahirnya inovasi yang mengurangi GAP layanan	
						Sarana penunjang operasional pemeliharaan penerangan jalan umum belum ideal	Tersedianya opsi pemanfaatan aplikasi smart PJU sebagai upaya efisiensi tata kelola
							Terbukanya opsi mekanisme kerjasama pemeliharaan penerangan jalan umum dengan pihak ketiga
5	Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Belum sinkronnya tata kelola terkait kewenangan penanganan kawasan kumuh di DAS dan sempadan Rel KA	Menguatnya komitmen Malang Raya untuk penataan DAS termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi	
						Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh	Adanya Pembelajaran dari sejumlah inovasi daerah seperti Kampung Tematik dan Gerakan Menabung Air maupun kisah sukses pilot project KOTAKU

VI.III-15

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
A	Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
					Akurasi penanganan indikator kekumuhan belum sepenuhnya terwujud	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi kawasan kumuh yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
					Belum optimalnya kinerja kelompok kerja kota untuk penanganan kawasan kumuh	Menguatnya kebijakan permukiman di level global dan nasional akan menjadi pendorong penguata daerah
					Belum idealnya anggaran untuk implementasi DED Penanganan Kawasan Kumuh yang telah disusun	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperluas kapasitas cakupan penanganan kawasan
		Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan		Belum optimalnya pengembangan akses terhadap hunian yang layak bagi seluruh masyarakat	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dengan lintas pemangku kepentingan terkait penyediaan hunian layak sesuai tata ruang	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media
						Berkembangnya skema pembiayaan bagi MBR
					Akurasi database kebutuhan penyediaan hunian belum rinci dan termutakhirkan secara kontinu	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi hunian yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
					Terbatasnya kapasitas rusunawa	pembiayaan hunian bagi MBR

VI.III-16

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
B	Renstra DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur					
1	Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman	Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	kurangnya kapasitas jalan	Keterbatasan pemahaman SDM terkait infrastruktur jalan	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan
2	Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial	Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial		belum optimalnya pengembangan fungsi jalan	belum adanya pembangunan jalan lingkar terkoneksi luar kota	tumbuhnya kawasan permukiman baru
C	Renstra DPU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur					
1	Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum	Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air	Pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Keterbatasan ketersediaan jaringan air bersih	Distribusi pipa PDAM yang belum merata	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin, monev
		Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan		Keterbatasan ketersediaan jaringan air bersih	Distribusi pipa PDAM yang belum merata	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin, monev
		Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum		Belum optimalnya kinerja pengelolaan sarana dan prasarana air bersih (HIPPAM)	Keterbatasan pemahaman SDM terhadap manajemen pengelolaan air bersih	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin, monev
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah		Belum optimalnya pengembangan jaringan air limbah dengan sistem terpusat, sistem komunal dan sistem setempat	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin, monev
		Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur bidang keciptakarya	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah.	Keterbatasan pemahaman SDM terkait pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin, monev	

VI.III-17

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
		Mengoptimalkan saluran drainase sebagai pematas air hujan		letak outlet yg kurang tepat	permukiman yg padat dan sosial masyarakat	perluasan pertinggial
		Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase		banyak sampah dan material pada saluran drainase	saluran drainase yg menyempit	sosial masyarakat
3	Penataan Ruang	Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang		pemanfaatan ruang yang cepat berkembang dan dinamis	kurang tersosialisasikannya rencana tata ruang	telah disusunnya RTRW dan RDTR
		Meningkatnya Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi		belum adanya kajian terhadap kawasan strategis nasional	belum adanya deliniasi yang jelas batasan kawasan	telah disusunnya RTRW dan RDTR
		Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		terdapatnya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	kurang kajian dan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	telah disusunnya RTRW dan RDTR
4	Pengelolaan Kawasan Permukiman	Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus	Pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kinerja pengelolaan jaringan penerangan jalan belum optimal	Akurasi database penerangan jalan umum belum sepenuhnya tercapai	Sudah ada rintisan platform system informasi penerangan jalan umum dan rencana induk yang dapat dijadikan fondasi penguatan akurasi database untuk seluruh wilayah kota
					Konversi teknologi penerangan jalan umum yang lebih efisien belum tuntas	Semakin variatif dan terjangkaunya teknologi penerangan jalan ramah lingkungan
					Sarana penunjang operasional pemeliharaan penerangan jalan umum belum ideal	Peningkatan Kapasitas SDM Penerangan Jalan Umum dapat mendorong lahirnya inovasi yang mengurangi GAP layanan
						Terbukanya opsi mekanisme kerjasama pemeliharaan penerangan jalan umum dengan pihak ketiga

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
	Pengelolaan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman Pembangunan PSU dan kawasan khusus • Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 		Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Belum sinkronnya tata kelola terkait kewenangan penanganan kawasan kumuh di DAS dan sempadan Rel KA	Menguatnya komitmen Malang Raya untuk penataan DAS termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
			Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh		Adanya Pembelajaran dari sejumlah inovasi daerah seperti Kampung Tematik dan Gerakan Menabung Air maupun kisah sukses pilot project KOTAKU	
			Akurasi penanganan indikator kekumuhan belum sepenuhnya terwujud		Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi kawasan kumuh yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time	
			Belum optimalnya kinerja kelompok kerja kota untuk penanganan kawasan kumuh		Menguatnya kebijakan permukiman di level global dan nasional akan menjadi pendorong penguata daerah	
			Belum idealnya anggaran untuk implementasi DED Penanganan Kawasan Kumuh yang telah disusun		Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperluas kapasitas cakupan penanganan kawasan	

VI.III-19

No	Renstra Kementerian /Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi		Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
	Tujuan	Sasaran			Penghambat	Pendorong
5	Pengelolaan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prasarana dan sarana permukiman pada kawasan permukiman • Meningkatnya jumlah renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 	Pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum optimalnya pengembangan akses terhadap hunian yang layak bagi seluruh masyarakat	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dengan lintas pemangku kepentingan terkait penyediaan hunian layak sesuai tata ruang Akurasi database kebutuhan penyediaan hunian belum rinci dan termutakhirkan secara kontinu	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media Berkembangnya skema pembiayaan bagi MBR Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi hunian yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time Berkembangnya skema pembiayaan hunian bagi MBR
					Terbatasnya kapasitas rusunawa	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pengembangan Kota Malang sesuai dengan Rancana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan berdasarkan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 bahwa tujuan penataan ruang Kota Malang adalah pembangunan Kota Malang diarahkan menuju terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kota sehat dan ramah lingkungan, kota pariwisata yang berbudaya menuju masyarakat maju dan mandiri.

Kebijakan, rencana dan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan hidup sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu:

1. penyediaan sarana dan prasarana air bersih;
2. penyediaan sarana dan prasarana air limbah;
3. penambahan sambungan rumah pada Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang masih memiliki *idle capacity*;
4. pengoptimalisasian fungsi dan kapasitas IPLT;
5. pelaksanaan layanan lumpur tinja terjadwal;

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD sebagaimana tabel berikut.

VI.III-21

Tabel 3.4

Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	RTRW				
A	Arahan Pemanfaatan Ruang				
1	Perbaikan kualitas jaringan jalan	Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Perlunya Pelebaran Jalan		Sinkronisasi program antar para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengembangan wilayah
			Perlunya menambah fasilitas pelengkap jalan		
			Perlunya pengembangan jalan tembus dilengkapi fasilitas jalan		
2	Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sempadan saluran irigasi		Belum optimalnya pembangunan perkerasan saluran irigasi	banyaknya pengembangan perumahan yang melanggar sempadan saluran irigasi	kawasan yang strategis untuk investasi
			Belum optimalnya penanaman vegetasi di sempadan saluran irigasi	berkurangnya luas sempadan saluran irigasi	meluasnya permukiman
			Belum optimalnya penempatan papan larangan pembangunan kecuali khusus bangunan irigasi	berkurangnya luas sempadan saluran irigasi	meluasnya permukiman
3	Perbaikan Kualitas Drainase Kota		Belum optimalnya inventarisasi saluran drainase yang mengalami kerusakan	banyak saluran yang ditutup oleh warga	perluasan pertinggal
			Belum optimalnya normalisasi saluran	banyaknya sampah dan material yang dibuang ke saluran drainase	kurangnya kesadaran atau wawasan masyarakat terhadap lingkungan

VI.III-22

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			Belum optimalnya pembuatan sudetan	banyaknya bangunan liar yang dibangun di atas saluran drainase	perluasan pertinggal
			Belum optimalnya perbaikan Inlet	posisi inlet yang kurang tepat	peningkatan badan jalan
			Belum optimalnya pembuatan gorong-gorong	pemerataan anggaran	semakin meningkatnya permukiman
4	Pengembangan Saluran drainase baru		Belum optimalnya studi / kajian banjir Kota Malang	belum sinkron antara masyarakat,pemerintah, dan dunia usaha	banyaknya genangan yang muncul di permukaan jalan
			Belum optimalnya inventarisasi wilayah belum terlayani drainase	belum sinkron antara masyarakat,pemerintah, dan dunia usaha	banyaknya genangan yang muncul di permukaan jalan
			Belum optimalnya pembuatan saluran baru	outlet saluran jauh / tertutup permukiman	perluasan pertinggal
			Belum optimalnya pembuatan inlet	posisi inlet yang kurang tepat	peningkatan badan jalan
			Belum optimalnya pembuatan gorong-gorong	outlet saluran jauh / tertutup permukiman	perluasan pertinggal
5	Pengembangan inovasi berbasis lingkungan		Belum optimalnya studi/kajian drainase berbasis lingkungan	belum sinkron antara masyarakat,pemerintah, dan dunia usaha	banyaknya genangan yang muncul di permukaan jalan
			Belum optimalnya peresapan air dalam tanah meliputi : Sumur resapan air hujan, Biopori	banyak saluran yang ditutup oleh warga	perluasan pertinggal
			Belum optimalnya pembuatan outlet pembuangan arah ke Sungai Brantas serta pembuatan sudetan untuk mempermudah air hujan masuk ke saluran	semakin meningkatnya permukiman	perluasan pertinggal

VI.III-23

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
B	Arahan RTRW Tahun 2010 - 2030				
1	Pembangunan Jalan Lingkar Timur		Lingkar Timur Melalui Rute: - Jl. Kebon Sari - Jl. S. Tubun - Jl. Gadang-Bumiayu - Jl. Meyjen. Sungkono - Jl. Raya Ki Ageng Gribig - Jl. Terusan Ki Ageng Gribig - Jl. Raya Bamban, tembus ke pertigaan Karanglo.		
2	Pembangunan Jalan Lingkar Barat		Lingkar Barat Melalui Rute: - Perempatan ITN – Pahirin - Pahirin Gasek (batas permukiman) - Gasek (batas permukiman) – Karang Besuki - Karang Besuki – Merjosari Sawah - Merjosari Sawah – Merjosari (dekat Kantor Graha Dewata) - Merjosari (dekat Kantor Graha Dewata) – Genting Utara - Genting Utara – Vila Bukit Sengkaling - Vila Bukit Sengkaling – Pertigaan Mulyoagung Pertigaan Mulyoagung – Pertigaan Sengkaling		
3	Pembangunan jalan tol Gempol - Malang		Gate dari jalan Tol yang berada di Kota Malang yaitu berada di sekitar pertigaan Madyopuro		
C	Arahan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP				
1	Zona Perlindungan Setempat		Belum optimalnya penetapan sempadan sungai	lebar sungai menyempit dan beberapa di tutup untuk permukiman	perluasan pertinggai
			Belum optimalnya sosialisasi sempadan sungai dan sosialisasi relokasi pemukim	kawasan sungai sebagian besar terdapat bangunan liar	perluasan pertinggai

VI.III-24

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			Belum optimalnya pemanfaatan sempadan sungai sebagai RTH	luas sempadan sungai menyempit	perluasan pertinggai
2	Zona Ruang Terbuka Hijau		Belum optimalnya pengembangan RTH sempadan sungai dan saluran irigasi	luas sempadan sungai menyempit	perluasan pertinggai
3	Zona Cagar Budaya		Belum optimalnya pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber daya ekonomi lokal dan daya tarik wisata budaya	Hak Kepemilikan Bangunan Cagar Budaya Bersifat Pribadi/Perorangan	Regulasi peraturan, perlindungan penataan dan fungsi cagar budaya
4	Zona Rawan Bencana		Belum optimalnya pembangunan bangunan penahan tanah atau perkuatan tebing sungai di sekitar sungai; Belum optimalnya pengembangan rute evakuasi bencana pengembangan dan penetapan fasilitas umum.	kawasan sungai sebagian besar terdapat bangunan liar	perluasan pertinggai
			Belum optimalnya penyediaan jalan yang dapat dijangkau kendaraan pemadam kebakaran untuk jalur respon bencana sebagai bentuk mitigasi bencana struktural;Belum optimalnya pengembangan rute evakuasi bencana dan pengembangan perlengkapan jalur evakuasi menuju titik evakuasi pengembangan;Belum optimalnya penetapan fasilitas umum yang berupa gedung serba guna dan lapangan.		
5	Zona Perkantoran		Belum optimalnya pemantapan fungsi pada kantor pemerintah eksisting	Poerubahan fungsi sesuai kebutuhan	SOP untuk setiap kebutuhan fungsi kantor
			Belum optimalnya penyediaan prasarana pendukung sub zona perkantoran pemerintah	Perkembangan kebutuhan dari kantor pemerintah	Perencanaan secara menyeluruh untuk fungsi yang akan diperlukan

VI.III-25

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
6	Zona sarana pelayanan umum		Belum optimalnya pemantapan fungsi pada Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya berupa gedung pertemuan	Perkembangan kebutuhan dari kantor pemerintah	Perencanaan secara menyeluruh untuk fungsi yang akan diperlukan
			Belum optimalnya pengembangan ruang kegiatan gedung pertemuan dan/atau balai warga	Tanah atau bangunan belum diserahkan/ menjadi aset pemerintah	Penyerahan aset kepada pemerintah
7	Zona Peruntukan Khusus		Belum optimalnya pengamanan fungsi saluran irigasi	berkurangnya luas sempadan saluran irigasi	meluasnya permukiman
8	Zona campuran		Belum optimalnya pengembangan kegiatan pada Sub zona campuran perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sarana pelayanan umum	belum adanya kajian teknis kawasan sub zona campuran	sudah diperdakannya RTRW dan RDTR
9	Rencana sistem jaringan pergerakan		Belum optimalnya pengembangan fungsi jalan arteri sekunder		
			Belum optimalnya pengembangan fungsi jalan Kolektor sekunder		
			Belum optimalnya pengembangan fungsi jalan lokal sekunder		
			Belum optimalnya pengembangan jalur pedestrian		
			Belum optimalnya pengembangan jalur sepeda		
10	Rencana Pengembangan Jaringan Drainase		Belum optimalnya pengelolaan sistem drainase berdasarkan Sub Daerah Aliran Sungai.	elevasi wilayah dan drainase terbangun bervariasi	banyaknya bangunan tinggal yg baru
			Belum optimalnya penanganan saluran meliputi normalisasi; Belum optimalnya pelebaran saluran; pembuatan gorong-gorong; perbaikan inlet; pembuatan outlet; pembuatan elevasi saluran lebih rendah daripada elevasi jalan; penerapan sistem drainase terpisah; dan pembuatan inlet.	saluran tertutup di area permukiman padat	perluasan pertinggal

VI.III-26

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			Belum optimalnya pembuatan peresapan air dalam tanah meliputi sumur resapan air hujan; biopori, dan bozem	padatnya permukiman	perluasan pertinggal
11	Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah		Belum mulainya pengembangan LLTT	Keterbatasan pemahaman SDM terkait LLTT. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur detail LLTT.	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan
			Belum optimalnya pengembangan Sistem Perpipaan/ sistem terpusat	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. Ketersediaan lahan lahan untuk sarana dan prasarana sanitasi yang berwawasan lingkungan	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
			Belum optimalnya pengembangan Sistem komunal	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. Ketersediaan lahan lahan untuk sarana dan prasarana sanitasi yang berwawasan lingkungan	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
			Belum optimalnya pengembangan sistem setempat	Kurangnya pemahaman SDM terhadap pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan. Ketersediaan lahan lahan untuk sarana dan prasarana sanitasi yang berwawasan lingkungan	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan, sosialisasi, pembinaan rutin dan monev
12	Rencana Pengembangan Jaringan prasarana Lainnya		Belum optimalnya pengembangan rute evakuasi dan tempat evakuasi sementara untuk bencana		

VI.III-27

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			Belum optimalnya pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupa multi purpose deep tunnel (MPDT)	belum adanya kajian teknis pengembangan pemanfaatan ruang di dalam bumi (RDB) berupa multi purpose deep tunnel (MPDT)	sudah diperdakannya RTRW dan RDTR
			Belum optimalnya penyusunan RTBL	Masih barunya tugas dan fungsi RTBL di DPUPRPKP yang sebelumnya menjadi Tugas dan fungsi Barenlitbang	Pelaksanaan Peraturan Daerah RDTRK Tahun 2016
II	KLHS				
1	Analisis Capaian Indikator TPB untuk Tujuan Tanpa Kemiskinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah.	Keterbatasan pemahaman SDM terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Koordinasi intensif antar pemangku kepentingan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
I	RTRW				
1	Program Pengembangan perumahan Pembangunan perumahan baru Penyediaan sarana prasarana di perumahan baru	Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monev dan pengendalian kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Belum sinkronnya tata kelola terkait kewenangan penanganan kawasan kumuh di DAS dan sempadan Rel KA	Menguatnya komitmen Malang Raya untuk penataan DAS termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
				Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh	Adanya Pembelajaran dari sejumlah inovasi daerah seperti Kampung Tematik dan Gerakan Menabung Air maupun kisah sukses pilot project KOTAKU
				Akurasi penanganan indikator kekumuhan belum sepenuhnya terwujud	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi kawasan kumuh yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
				Belum optimalnya kinerja kelompok kerja kota untuk penanganan kawasan kumuh	Menguatnya kebijakan permukiman di level global dan nasional akan menjadi pendorong penguata daerah
				Belum idealnya anggaran untuk implementasi DED Penanganan Kawasan Kumuh yang telah disusun	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperluas kapasitas cakupan penanganan kawasan
			Belum optimalnya pengembangan akses terhadap hunian yang layak bagi seluruh masyarakat	Belum optimalnya sinkronisasi kebijakan dengan lintas pemangku kepentingan terkait penyediaan	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media Berkembangnya skema pembiayaan bagi MBR

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				hunian layak sesuai tata ruang	
				Akurasi database kebutuhan penyediaan hunian belum rinci dan termutakhirkan secara kontinu	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi hunian yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
				Terbatasnya kapasitas rusunawa	Berkembangnya skema pembiayaan hunian bagi MBR
II	KLHS				
1	Penurunan Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monev dan pengendalian kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan dan pertamanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Belum sinkronnya tata kelola terkait kewenangan penanganan kawasan kumuh di DAS dan sempadan Rel KA	Menguatnya komitmen Malang Raya untuk penataan DAS termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.			Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh	Adanya Pembelajaran dari sejumlah inovasi daerah seperti Kampung Tematik dan Gerakan Menabung Air maupun kisah sukses pilot project KOTAKU
3	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.			Akurasi penanganan indikator kekumuhan belum sepenuhnya terwujud	Berkembangnya teknologi informasi memberikan peluang implementasi system informasi kawasan kumuh yang valid, on-line, berbasis GIS dan real time
4	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.			Belum optimalnya kinerja kelompok kerja kota untuk penanganan kawasan kumuh	Menguatnya kebijakan permukiman di level global dan nasional akan menjadi pendorong penguata daerah

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan fungsi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.			Belum idealnya anggaran untuk implementasi DED Penanganan Kawasan Kumuh yang telah disusun	Adanya potensi kerjasama pentahelix antara pemerintah dengan akademisi, dunia usaha, komunitas dan media untuk memperluas kapasitas cakupan penanganan kawasan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1 Gambar pelayanan

Penyediaan infrastruktur perkotaan yang memadai menjadi salah satu tugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, DPUPRPKP juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penataan ruang di wilayah Kota Malang.

Secara umum kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang telah dilaksanakan dengan baik utamanya dalam mewujudkan target yang sudah direncanakan, dengan jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Layanan infrastruktur jalan kota;
2. Layanan infrastruktur jembatan kota;
3. Layanan infrastruktur drainase kota;
4. Layanan penerangan jalan;
5. Layanan infrastruktur irigasi primer dan sekunder;
6. Layanan infrastruktur gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang;
7. Layanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
8. Layanan akses air bersih;
9. Layanan akses sanitasi layak;
10. Layanan Keterangan Rencana Kota;
11. Layanan penanganan pengaduan pelanggaran bangunan;
12. Layanan informasi jasa konstruksi;
13. Layanan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan;
14. Layanan pengujian mutu bahan konstruksi;
15. Layanan persewaan alat berat konstruksi;
16. Layanan pembuangan lumpur tinja;
17. Layanan operasional perkantoran terpadu;
18. Layanan perumahan layak huni;
19. Layanan penataan kawasan permukiman;
20. Layanan rusunawa;
21. Layanan penataan kawasan kumuh.

3.5.2 Sasaran jangka menengah pada renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kementerian PUPR. Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - (3) Kapasitas tampung per kapita;
 - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
 - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
 - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam

Sasaran : Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi

Tujuan 2 : Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing
Sasaran : Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional

Tujuan 3 : Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sasaran : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau

Tujuan 4 : Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
Sasaran : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional

Tujuan 5 : Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

3.5.3 Sasaran jangka menengah dari renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur serta Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman

Sasaran 1 : Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi

Tujuan 2 : Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial

Sasaran : Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Adapun sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum
- Sasaran 1 : Meningkatnya sarana dan prasarana air bersih di desa-desa rawan air
- Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana AB di perkotaan dan perdesaan
- Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum

- Tujuan 2 : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi
- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah
- Sasaran 2 : Tersusunnya program kebutuhan infrastruktur bidang keciptakaryaan
- Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja pengelolaan drainase

- Tujuan 3 : Penataan Ruang
- Sasaran 1 : Terwujudnya perumusan kebijakan dan pelaksanaan bidang penataan ruang
- Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi
- Sasaran 3 : Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

3.5.4 Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pemanfaatan ruang serta perumusan aturan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan RTRW yang telah ditetapkan.

3.5.5 Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kajian Lingkungan Hidup Strategis belum diacu dalam implementasinya oleh berbagai sektor sehingga berdampak pada pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Hal ini ditandai dengan menurunnya derajat kesehatan dan meningkatnya pencemaran lingkungan, sehingga perlu adanya pengawalan terhadap pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan KLHS yang telah ditetapkan.

Perkembangan dan pertumbuhan kawasan secara demografis dan ekonomi telah diantisipasi dengan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan guna menciptakan kawasan kota yang aman dan nyaman bagi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun demikian untuk terwujudnya kawasan kota sebagaimana dimaksud masih terdapat permasalahan sebagai isu-isu strategis dalam pembangunan kota yaitu :

1. Belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya;
 - a. Belum optimalnya capaian masyarakat terdidik dan berkarakter;
 - b. Kurang maksimalnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan;
 - c. Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan
2. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan;
 - a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi kreatif;
 - b. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu;
 - c. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan kesesuaian tata ruang;
3. Mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak pada masyarakat rentan berbasis gender;
 - a. Belum optimalnya kualitas perlindungan sosial;
 - b. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan komunitas;
4. Belum maksimalnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hokum, professional dan akuntabel;
 - a. Belum maksimalnya penegakan dan tertib hukum;
 - b. Kurang optimalnya kualitas system kelembagaan yang efektif;
 - c. Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi teknologi informasi.

Dalam konteks penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPUPRPKP Kota Malang, maka dalam renstra ini dilakukan proses perumusan isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis perangkat daerah sebagaimana ketentuan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dilakukan melalui proses analisis yang memperhatikan 6 kriteria sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung pada pencapaian visi dan misi daerah (25)
Adalah penilaian tingkat besaran kontribusi penanganan kondisi tersebut terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Tugas dan tanggung jawab DPUPRPKP (20)

Adalah penilaian relevansi penanganan isu strategis dengan dimensi lingkup tugas pokok dan fungsi DPUPRPKP dan keterkaitannya dengan kewenangan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

3. Kemudahan Penanganan (15)

Adalah tingkat kesulitan yang teridentifikasi harus dihadapi dalam penanganan isu strategis terkait.

4. Urgensi (20)

Adalah seberapa mendesak penanganan isu strategis tersebut dalam dimensi waktu pembangunan jangka menengah.

5. Kesiapan Sumber Daya dan Teknologi (10)

Adalah penilaian terhadap tingkat kompetensi sumber daya baik manusia maupun asset yang dimiliki maupun ketersediaan teknologi termasuk didalamnya konsep/skema/inovasi di tingkat nasional maupun daerah yang secara operasional dapat dimanfaatkan untuk penanganan isu strategis tersebut.

6. Prioritas Logframe Kepala Daerah (10)

Adalah seberapa relevan isu strategis tersebut dengan logframe yang telah menjadi platform politik kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan keenam kriteria tersebut dilakukan proses penilaian terhadap sejumlah rumusan isu strategis yang diperoleh dari hasil analisis evaluatif internal organisasi dan masukan dalam proses FGD sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Penilaian Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Keterangan
		01	02	03	04	05	06		
		25	20	15	20	10	10		
1	Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur	20	20	10	15	10	10	85	
2	Belum optimalnya pemerataan pembangunan sarana prasarana kota secara terpadu	20	20	10	15	10	10	85	
3	Kemacetan di beberapa ruas jalan utama	20	5	5	20	10	10	70	
4	Tingginya potensi genangan air setelah hujan deras pada beberapa lokasi	20	20	10	20	10	1	81	
5	Berkurangnya ruang terbuka	10	10	5	10	5	5	45	
6	Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang	15	20	15	15	10	10	85	
7	Ketidaknyamanan pengendara dalam berkendara	5	5	5	5	0	0	20	
8	Ketidaknyamanan pejalan kaki saat menggunakan damija	5	5	5	5	0	0	20	
9	Masih sedikitnya bangunan yang memiliki SLF	10	15	10	10	10	0	55	
10	Belum optimalnya ketersediaan layanan informasi jasa konstruksi	10	20	5	10	10	0	55	

VI.III-38

No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Keterangan
		01	02	03	04	05	06		
		25	20	15	20	10	10		
11	Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan Prioritas	20	20	10	15	10	10	85	
12	Belum optimalnya manajemen pengelolaan IPLT	20	20	10	15	10	10	85	
13	Belum optimalnya fungsi sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran terpadu	10	10	5	10	10	0	45	
14	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keberadaan dan fungsi laboratorium uji mutu bahan dan persewaan alat berat	10	15	5	10	10	0	50	
15	Belum optimalnya pelayanan publik	10	15	5	10	10	10	60	
16	Belum optimalnya penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota	20	15	10	15	10	10	80	
17	Minimnya disparitas pertumbuhan kawasan kota, khususnya kawasan timur dengan kawasan-kawasan lainya	15	15	10	10	10	10	70	
18	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan timur Kota Malang, untuk mendukung konsep pengembangan kawasan timur kota	20	15	10	10	10	10	75	
19	Belum optimalnya kapasitas dan kinerja jalan-jalan kota sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan transportasi kota	10	15	10	10	10	5	60	
20	Belum optimalnya kapasitas dan kelancaran saluran drainase dan pematusan lainnya untuk mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota	20	20	10	20	10	10	90	
21	Belum optimalnya penyediaan sistem air limbah skala kawasan/kota	15	20	15	15	10	10	85	
22	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas jembatan untuk menunjang aksesibilitas kawasan-kawasan kota	15	20	10	15	10	10	80	
23	Belum optimalnya kualitas dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air limbah domestik untuk	15	20	10	15	10	10	80	

VI.III-39

No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Keterangan
		01	02	03	04	05	06		
		25	20	15	20	10	10		
	menunjang kesehatan kenyamanan lingkungan								
24	Belum optimalnya ketersediaan dan sebaran pelayanan air bersih pada kawasan-kawasan rawan air bersih yang belum terlayani jaringan PDAM	15	15	10	15	10	10	75	
25	Belum optimalnya kinerja pengolahan air limbah dan peningkatan akses masyarakat akan sanitasi pada kawasan rawan sanitasi	15	20	10	15	10	10	80	
26	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana gedung daerah dan fasum penunjang pelayanan publik	15	15	10	10	10	10	70	
27	Belum optimalnya produk-produk rencana tata bangunan dan lingkungan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	15	20	5	10	10	0	60	
28	Belum optimalnya pengelolaan di Perkantoran Terpadu untuk mendukung pelayanan prima pada masyarakat	10	10	5	10	10	0	45	
29	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang operasional dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi OP	5	20	5	10	10	5	55	
30	Kurangnya sinergi dengan OPD lain terkait capaian pengurangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10	10	5	5	5	0	35	
31	Belum tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di	5	20	5	5	10	0	45	
32	Belum optimalnya layanan sistem informasi dan data base jasa konstruksi	10	20	5	5	10	0	50	
33	Belum optimalnya pelayanan masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kota Malang	15	15	5	5	10	10	60	
34	Belum optimalnya tindakan penanganan pelanggaran di bidang penataan ruang	20	15	10	15	10	10	80	
35	Percepatan penanganan kawasan kumuh Non-DAS	20	20	15	20	10	5	90	
36	Penanganan kawasan permukiman di DAS	20	15	10	15	5	10	75	

VI.III-40

No	Isu Strategis	Kriteria						Total Skor	Keterangan
		01	02	03	04	05	06		
		25	20	15	20	10	10		
37	Penyediaan Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau bagi seluruh masyarakat	20	10	10	15	5	10	70	
38	Pengelolaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	15	10	10	10	5	65	
39	Efisiensi dan pemerataan kinerja layanan penerangan jalan	10	20	10	10	10	5	65	
40	Pengembangan Kampung Tematik	10	10	5	10	10	0	45	
41	Pengembangan teknologi informasi untuk layanan perangkat daerah	15	10	10	10	10	0	55	

Berdasarkan matriks diatas dapat dirumuskan isu strategis yang dinilai paling prioritas untuk ditangani pada Perubahan Rencana Strategis DPUPRPKP Periode 2022-2023 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Belum optimalnya pemerataan pembangunan sarana prasarana kota secara terpadu.
3. Kemacetan di beberapa ruas jalan utama.
4. Minimnya disparitas pertumbuhan kawasan kota, khususnya kawasan timur dengan kawasan-kawasan lainnya.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan timur Kota Malang, untuk mendukung konsep pengembangan kawasan timur kota.
6. Tingginya potensi genangan air setelah hujan deras pada beberapa lokasi.
7. Belum optimalnya kapasitas dan kelancaran saluran drainase dan pematuan lainnya untuk mendukung kinerja jalan dan upaya mencegah terjadinya genangan pada ruas-ruas jalan kota.
8. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas jembatan untuk menunjang aksesibilitas kawasan-kawasan kota.
9. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana gedung daerah dan fasum penunjang pelayanan public.
10. Belum optimalnya Penataan Bangunan dan Lingkungan pada kawasan Prioritas.
11. Belum optimalnya penyediaan sistem air limbah skala kawasan/kota.
12. Belum optimalnya kualitas dari ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air limbah domestik untuk menunjang kesehatan kenyamanan lingkungan.
13. Belum optimalnya ketersediaan dan sebaran pelayanan air bersih pada kawasan-kawasan rawan air bersih yang belum terlayani jaringan PDAM.
14. Belum optimalnya kinerja pengolahan air limbah dan peningkatan akses masyarakat akan sanitasi pada kawasan rawan sanitasi.
15. Belum optimalnya manajemen pengelolaan IPLT.
16. Belum optimalnya kemanfaatan tata ruang.
17. Belum optimalnya penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

18. Belum optimalnya tindakan penanganan pelanggaran di bidang penataan ruang.
19. Percepatan Penanganan Kawasan Kumuh Non-Daerah Aliran Sungai (DAS).
20. Penanganan Kawasan Permukiman di Daerah Aliran Sungai.
21. Efisiensi dan Pemerataan Kinerja Layanan Penerangan Jalan.
22. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
23. Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat Terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mendukung upaya perwujudan visi Kota Malang Tahun 2018-2023, maka Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang dengan konsep pembangunan berkelanjutan, terintegrasi dan berwawasan lingkungan, berupaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu serta peningkatan kualitas kemanfaatan tata ruang. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu

“Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu”.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan tujuan dimaksud maka sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota;
2. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah.

Adapun berkenaan dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Malang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 Februari 2020, maka proses pengajuan permohonan Keterangan Rencana Kota (K RK) dialihkan ke Disnaker PMPTSP, sehingga diperlukan revisi target capaian kinerja.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

VI.IV-2

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75					4,5	4,5
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	N/A	3,65	3,80	3,95	4,10	4,25	4,25
		Persentase Area Kawasan Kumuh	2,64%	2,00%	1,20%	1,15%	1,05%	1,00%	1,00%
		Persentase Penurunan Titik Genangan	16,00%	53,85%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	24.72%	26.72%	28.72%	25.63%	25.63%	25.63%	25.63%
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	81,04	81,85	82,67	83,50	84,33	85,17	85,17

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disebutkan pada pasal 1 definisi strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, setelah dilakukan analisis SWOT maka diperoleh strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut.

VI.V-2

Tabel 5.1
Matrik Analisis SWOT

	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Peraturan Perundangan Bidang Infrastruktur 2. Ketersediaan Peraturan Perundangan Bidang Jasa Konstruksi 3. Ketersediaan Peraturan Perundangan Penataan Ruang 4. Ketersediaan Rencana Tata Ruang 5. Ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang memadai 6. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 7. Ketersediaan Penganggaran Kegiatan 8. Kewenangan OPD sebagai entitas akuntansi 9. Ketersediaan master plan pembangunan infrastruktur 10. Pola penanganan kawasan kumuh perkotaan telah dijalankan sejak tahun 2015 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Operasional dan Peralatan yang terbatas 2. Kurang Optimalnya Koordinasi 3. Kurangnya inovasi dan motivasi kerja 4. Belum optimalnya teknikal dan manajerial skill dari SDM 5. Belum terpenuhinya jumlah personil sesuai kebutuhan 6. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen yang memadai dan terintegrasi 7. Belum dilakukannya updating data teknis sesuai bidang 8. Akurasi database kumuh, backlog dan RTLH masih belum ideal dan detail 9. Kelembagaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak optimal 10. Terdapat <i>gap</i> akurasi penanganan aspek kekumuhan 11. Belum ada kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman lintas sektor 12. Pemantauan PSU kurang optimal 13. Belum ada skema yang ideal dan <i>proven</i> untuk penanganan kawasan kumuh di DAS yang ada di wilayah Kota Malang 14. Kapasitas rusunawa terbatas 15. Cakupan layanan penerangan jalan lingkungan masih berkisar lebih kurang 50% dari kondisi ideal 16. Aset operasional pemeliharaan sangat terbatas 17. Konversi menuju LED masih merupakan pekerjaan rumah yang cukup banyak 18. Data tagihan listrik PJ tidak akurat 19. Konsolidasi internal perlu ditingkatkan 20. Database asset penerangan jalan belum maksimal 21. Operasional Kelembagaan belum efektif
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 11. Sebagian besar Desain Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan telah disusun 12. Koordinasi telah terjalin cukup baik dengan K/L dan Perangkat Daerah Provinsi 13. SK Kumuh telah ditetapkan 14. PSU Perumahan yang telah diserahkan secara umum dapat dikelola dengan baik 15. Mekanisme penyerahan PSU dari pengembang telah ditetapkan 16. Beberapa skema pembiayaan hunian layak seperti BPS telah diimplementasikan di Kota Malang 17. Seluruh jalan utama kota telah terlayani penerangan jalan 18. Kapasitas SDM cukup mumpuni 19. Telah tersedia masterplan PJ sehingga estimasi kebutuhan investasi telah terketahui 20. Sudah tersedia rintisan platform pengembangan penerangan jalan cerdas 21. Regulasi terkait pertanahan telah jelas 	

VI.V-3

Peluang (Opportunity)	SO (Strength Opportunity)	WO (Weakness Opportunity)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah 2. Kontrol Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 3. Masukan dan usulan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur 4. Ketersediaan Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga pengkajian lainnya 5. Ketersediaan Penyedia Barang dan Jasa 6. Partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan 7. Letak Strategis Kota Malang 8. Pengentasan kawasan kumuh menjadi prioritas nasional 9. Semakin lengkapnya kebijakan dan pedoman nasional terkait penanganan kawasan kumuh 10. Dukungan regulasi tata ruang daerah 11. Perkembangan teknologi informasi makin pesat untuk implementasi penerapan system pemerintahan berbasis elektronik khususnya terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman 12. Keberadaan 5 Perguruan Tinggi Negeri dan 52 Perguruan Tinggi Swasta di Kota Malang 13. Peran aktif dunia usaha, asosiasi profesi dan komunitas relatif semakin membaik 14. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Malang 15. Komitmen asosiasi pengembang untuk penyediaan hunian berimbang tinggi 16. Skema pembiayaan inovatif di tingkat nasional semakin bervariasi 17. Komitmen Kepala Daerah tinggi 18. Regulasi tata ruang memberikan peluang makin besar dan akomodatif pengembangan hunian vertical 19. Perkembangan teknologi penerangan jalan ramah lingkungan sangat pesat 20. Komitmen Pemerintah Kota tinggi 21. Komitmen nasional terkait agraria tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan aplikatif sebagai acuan dan standart teknis pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan, sarana prasarana kota, gedung daerah dan fasum; 2. Penyediaan prasarana jalan, jembatan dan drainase yang mantap dan aman bagi transportasi kota; 3. Penyediaan gedung daerah, rumah dinas dan fasum yang berkualitas dan representatif untuk pelayanan publik ; 4. Penyediaan sarana prasarana sosial yang representatif penunjang keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan hunian masyarakat 5. Penyediaan prasarana jalan, jembatan dan drainase yang mantap dan aman bagi transportasi kota; 6. Penyediaan gedung daerah, rumah dinas dan fasum yang berkualitas dan representatif untuk pelayanan publik ; 7. Penyediaan sarana prasarana sosial yang representatif penunjang keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan hunian masyarakat; 8. Peningkatan kualitas dan kuantitas peralatan penunjang pelayanan pengujian mutu bahan bangunan dan perbengkelan; 9. Penambahan jumlah SDM dan peningkatan kapasitas SDM untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal 10. Percepatan penuntasan kawasan kumuh perkotaan 11. Pengembangan Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau 12. Peningkatan efisiensi dan kapasitas layanan Penerangan Jalan 13. Pemerataan jangkauan layanan penerangan jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan sarana prasarana kota; 2. Updating data dan pembuatan data base data teknis yang dibutuhkan; 3. Bantuan-bantuan yang didapat dari Pemerintah Pusat maupun CSR. 4. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan 5. Peningkatan pemahaman tertib pemanfaatan lahan dan tertib pertanahan

VI.V-4

Tantangan (Threats)	ST (Strength Threats)	WT (Weakness Threats)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah aktifitas penduduk belum sebanding dengan penyediaan infrastruktur 2. Meningkatnya jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan 3. Partisipasi negatif masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur 4. Disparitas pertumbuhan kawasan timur kota malang 5. Pesatnya perkembangan kawasan perumahan dan permukiman 6. Masih terjadinya pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang kota 7. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap tata ruang kota belum optimal 8. tata kelola kawasan DAS berada pada lintas kewenangan 9. Adanya potensi resistensi sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh sekitar DAS 10. Kesepahaman dan Kesadaran pengembang untuk tertib penyerahan PSU masih belum optimal 11. Potensi membesarnya ketimpangan kesejahteraan 12. Peningkatan harga tanah melampaui peningkatan daya beli 13. Keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan 14. Perilaku pemanfaatan jaringan PJ secara illegal oleh oknum masyarakat 15. Ego sektoral pemangku kepentingan terkait PJ 16. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pertanahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan perijinan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Perlunya penambahan ruas jalan lingkaran luar kota untuk mengurangi kemacetan lalu lintas; 3. Peningkatan kualitas layanan pengolahan air limbah domestik di IPLT; 4. Peningkatan layanan penyedotan kakus; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum yang tertib, transparan dan akuntabel; 2. Peningkatan pengawasan pendirian bangunan yang sesuai dengan tata ruang kota; 3. Penyelenggaraan koordinasi secara kontinyu.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan				
				Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur, sarana dan prasana. 3. Pengembangan pola tata ruang. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perawatan drainase. 5. Percepatan penuntasan kawasan kumuh perkotaan. Penguatan Kapasitas Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan <ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau 7. Peningkatan efisiensi dan kapasitas layanan Penerangan Jalan 8. Peningkatan pemahaman tertib pemanfaatan lahan dan tertib pertanahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur perekonomian dan sarana parasarana sosial. 2. Penguatan Akurasi Penanganan Kawasan Kumuh Non-DAS 3. Pengembangan skema dan Sinkronisasi Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh di DAS 4. Penuntasan penanganan rumah tidak layak huni 5. Peningkatan Tertib PSU Perumahan dan Kualitas pengelolaannya 6. Pengembangan skema pembiayaan dan sinergi lintas pemangku kepentingan PKP 7. Pengembangan kapasitas dan pemanfaatan rusunawa Kemandirian sosial dan ekonomi. 8. Penguatan akurasi database PJ dan tertib pemanfaatannya 9. Percepatan konversi menuju teknologi PJ cerdas dan ramah lingkungan 10. Memperluas cakupan sasaran sosialisasi Peningkatan Fasilitasi layanan					
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan OPD lain dalam penegakan Perda dan peraturan bersanksi hukum. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan tata ruang. 						
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan layanan publik. 2. Peningkatan kompetensi pegawai. 						

5.1 Perspektif Kelembagaan

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DPUPRPKP dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program yang telah ditetapkan.

5.2 Perspektif Keuangan

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang DPUPRPKP perlu diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur yang terpadu dan penataan ruang, perlu disiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanisme baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan arah, kebijakan, strategi, program dan kegiatan utama pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang diperlukan dukungan kerangka pendanaan yang maksimal. Perhitungan pendanaan memperhatikan antara lain :

- a. Alokasi pendanaan program adalah penjumlahan dari alokasi pendanaan kegiatan;
- b. Alokasi pendanaan kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi pendanaan output;
- c. Alokasi pendanaan output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai upaya untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dimaksud, maka dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program dan kegiatan indikatif Tahun 2018-2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan sumber pendanaan dari DAU, BHP/NP dan DBHCHT adalah sebagai berikut :

A. Tahun 2019

Program dan kegiatan pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan pedestrian
 1. Pembangunan/ Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang
 2. Rehabilitasi/ Pengembangan jalan di Kota Malang
 3. Rehabilitasi/ Pengembangan Pedestrian di Kota Malang
 4. Pemeliharaan Rutin Jalan
 5. Pemeliharaan Insidental Jalan
 6. Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang
- II. Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
 1. Pembangunan Jembatan di Kota Malang
 2. Rehabilitasi/ Pengembangan jembatan di Kota Malang
 3. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 4. Pemeliharaan Insidental jembatan
 5. Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang
- III. Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan , Rehabilitasi/pemeliharaan Drainase
 1. Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang
 2. Pemeliharaan Rutin Drainase
 3. Pemeliharaan Insidental Drainase
 4. Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang
 5. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
- IV. Program Perencanaan ,Pembangunan Pengembangan, rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
 1. Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang
 2. Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang
 3. Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang
 4. Perencanaan Infrastruktur Turap/Talud/ Bonjong di Kota Malang
- V. Program pengembangan/ Rehabilitasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

VI.VI-2

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- VI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang
 1. Pembangunan, Pengembangan/ Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum
 2. Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum
 3. Perencanaan Infrastruktur Air Minum
 4. Pembinaan rutin Hippam
- VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang
 1. Pembangunan instalasi Air Limbah
 2. Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah
 3. Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah
 4. Perencanaan Infrastruktur Air Limbah
 5. monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal
 6. Sosialisasi air limbah domestik
 7. Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)
 8. Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)
 9. Fasilitasi operasional layanan lumpur Tinja terjadwal
 10. Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja
- VIII. Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 1. Pembangunan Islamic Center
 2. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 3. Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
 4. Pemeliharaan Insidental Gedung /Bangunan Kantor
 5. Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum
 6. Operasional UPT Perkantoran Terpadu
 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu
- IX. Program Pembangunan Sistem Informasi/data base gedung/bangunan
 1. Sosialisasi SLF
 2. Kegiatan Pelaksanaan SLF
 3. Pendataan Bangunan Gedung
 4. Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung
- X. Program Bina Jasa Konstruksi
 1. Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi
 2. Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Konstruksi
 3. Penyusunan HSPK Dinas PUPR
 4. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Cipta Karya
 5. Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota
 6. Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 7. Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi

8. Layanan penyediaan layanan izin usaha jasa konstruksi
- XI. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang
 1. Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan
 2. Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas
- XII. Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat
 1. Peningkatan Pelayanan persewaaan alat berat
 2. Peningkatan Pelayanan laboratorium uji mutu bahan
- XIII. Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
 1. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang
 2. Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan
- XIV. Program Perencanaan Ruang
 1. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
 2. Penelitian dan Kajian Penataan Ruang
 3. Sosialisasi Rencana Tata Ruang
- XV. Program Pemanfaatan Tata Ruang
 - i. Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota
- XVI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 6. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 7. Penyediaan makanan dan minuman
 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Peringatan/Kegiatan Insidentil
- XVII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 3. Pengadaan bbm dan pelumas
 4. Pemeliharaan Taman Perkantoran
 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 6. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi
- XVIII. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur
- XIX. Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan laporan keuangan
 3. Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)
 4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
 5. Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
 6. Penyusunan Profil SKPD
 7. Penyusunan Renja/RKT
 8. Penyusunan/ Review Renstra
 9. Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan

- XX. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)
- XXI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 5. Penyediaan alat tulis kantor
 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan peralatan rumah tangga
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 11. Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi
 12. Peringatan/Kegiatan Insidentil
 13. Peringatan Hari-hari Besar/Khusus/Tertentu
- XXII. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 4. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi
 5. Pengadaan bbm dan pelumas
 6. Pembangunan gedung kantor
 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 9. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perbengkelan
 11. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- XXIII. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
1. Penyusunan laporan keuangan
 2. Penyusunan bahan ANJAB/ABK SKPD
 3. Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan
 4. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
 5. Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
 6. Penyusunan/Reviu Renstra
 7. Penyusunan Renja/RKT
 8. Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)
 9. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- XXIV. Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
1. Review Perencanaan Penanganan Permukiman
 2. Kajian Kebutuhan Rusunawa

3. Fasilitasi Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kota Malang
4. Pemeliharaan Insidentil Prasarana dan Sarana Utilitas
5. Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas
6. Inventarisasi Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal
7. Penaksiran Aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di Perumahan Formal
8. Monotoring PSU Perumahan Formal Sekota Malang
9. Sosialisasi PSU di Kota Malang
10. Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh
11. Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan
12. Penyusunan (Pendataan Rumah) Non Formal
13. Penyusunan Sistem Informasi PSU
14. Fasilitasi Penyerahan PSU
15. Penyusunan Profil Kawasan Kumuh Kota Malang
16. Peningkatan Kualitas Perumahan

XXV. Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

1. Peningkatan Pelayanan dan Penertiban Rusunawa
2. Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa
3. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa

XXVI. Program Pengelolaan 'Penerangan Jalan

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan
2. Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang
3. Penataan Penerangan Jalan
4. Pengawasan dan Pengendalian Penerangan Jalan
5. Pengembangan Sistem Smart PJU
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Penerangan Jalan
7. Optimalisasi SIMPJU

B. Tahun 2020 – 2023

Program dan kegiatan pada tahun 2020 – 2021 sebagai berikut :

I. Program Bina Marga

1. Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang
2. Pembangunan/ Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang
3. Pemeliharaan Rutin Jalan
4. Pemeliharaan Insidentil Jalan
5. Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang
6. Pembangunan pedestrian di Kota Malang
7. Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang
8. Pembangunan/ Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan
10. Pemeliharaan Insidentil jembatan
11. Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang

12. Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang
13. Pemeliharaan Rutin Drainase
14. Pemeliharaan Insidentil Drainase
15. Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang
16. Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
17. Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang
18. Pemeliharaan Insidentil Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang
19. Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
20. Peningkatan pelayanan persewaaan alat berat
21. Peningkatan pelayanan laboratorium pengujian konstruksi
22. Perencanaan Penerangan jalan
23. Pembangunan Penerangan Jalan
24. Pemeliharaan Penerangan Jalan

III. Program Cipta Karya

1. Pembangunan instalasi Air Limbah
2. Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah
3. Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah
4. Perencanaan Infrastruktur Air Limbah
5. Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal
6. Sosialisasi air limbah domestik
7. Fasilitasi SPAL Skala Kota
8. Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)
9. Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)
10. Fasilitasi operasional layanan lumpur Tinja terjadwal
11. Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja
12. Pembangunan, Pengembangan/ Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum
13. Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum
14. Perencanaan Infrastruktur Air Minum
15. Pembinaan rutin Hippiam
16. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
17. Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
18. Pemeliharaan Insidentil Gedung /Bangunan Kantor
19. Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum
20. Sosialisasi SLF
21. Kegiatan Pelaksanaan SLF
22. Pendataan Bangunan Gedung
23. Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB
24. Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi

25. Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi
 26. Penyusunan HSPK Dinas
 27. Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota
 28. Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 29. Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi
 30. Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan
 31. Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas
- IV. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Pengelolaan Perumahan dan PSU
 2. Perencanaan Kawasan Permukiman
 3. Penataan Kawasan Permukiman
 4. Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman
 5. Pemeliharaan Insidentil Kawasan Permukiman
 6. Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh
 7. Penataan Kawasan Kumuh
 8. Pengelolaan RUSUNAWA
- V. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
1. Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang
 2. Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan
 3. Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota
 4. Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang
 5. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
 6. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah
 7. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
 8. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang
 9. Penelitian dan Kajian Penataan Ruang
 10. Sosialisasi Rencana Tata Ruang
 11. Koordinasi Penataan Ruang Daerah
- VI. Program Pelayanan Kesekretariatan
1. Penyediaan jasa surat menyurat
 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 4. Penyediaan alat tulis kantor
 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 6. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 7. Penyediaan makanan dan minuman
 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 9. Peringatan/Kegiatan Insidentil
 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
 11. Pengadaan bbm dan pelumas
 12. Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur
 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

14. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor
 15. Pemeliharaan Taman Perkantoran
 16. Penatausahaan Barang Milik Daerah
 17. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi
 18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 19. Penyusunan laporan keuangan
 20. Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)
 21. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
 22. Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
 23. Penyusunan Profil Perangkat Daerah
 24. Penyusunan Renja/RKT
 25. Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan
- VII. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)
- VIII. Pembinaan Lingkungan Sosial Di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah
1. Penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah (DBHCHT)

Pada saat penyusunan Rencana Kerja DPUPRPKPPKP TA 2021 telah dilakukan pemetaan program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 5 Oktober 2020, maka DPUPRPKPPKP telah melakukan pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021-2023 sebagai berikut :

VI.VI-9

Tabel 6

Program, kegiatan dan sub kegiatan DPUPRKP pada tahun 2021-2023
sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan akses layak air limbah domestik
				Persentase Penurunan titik genangan					Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung
				Persentase Area Kawasan Kumuh						Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat
									Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah instalasi pengolahan air limbah domestik yang dipelihara
										Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan
										Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah
									Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik

VI.VI-10

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik
									Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara
										Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT
									Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan Penyedotan lumpur tinja
									Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah rumah tinggal ber Tangki septik yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan akses layak air bersih

VI.VI-11

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan
										Jumlah SR yang di bangun,dikembangkan dan direhabilitasi
									Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin
									Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi
						Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung			Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin dan insidental
									Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum

VI.VI-12

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF
										Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang
										Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung
									Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Bangunan Gedung
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen HSPK

VI.VI-13

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data badan usaha yang terupdate pada sistem informasi
										Jumlah aplikasi databe jasa konstruksi
										Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi
							Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL
									Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luasan kawasan penataan bangunan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan

VI.VI-14

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis bangunan penampung air lainnya
									Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah lokasi penampung air yang dibangun
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
									Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani
									Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidentil
										Jumlah Titik Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong
									Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang drainase kota yang ditingkatkan fungsinya

VI.VI-15

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Jumlah titik Pemeliharaan Insidental Turap/Talud/ Bronjong
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan Kota dalam Kondisi Mantap	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur jalan dan jembatan
						Persentase jembatan kota dalam kondisi baik				Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur penerangan jalan
						Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki				
						Persentase fasilitas penerangan jalan			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan
										panjang pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan
									Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan
										Jumlah titik penerangan jalan jalan yang terpelihara
								Jumlah jembatan Kota dalam Kondisi Mantap	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun

VI.VI-17

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Pengembangan Permukiman	Prosentase penanganan infrastruktur permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan permasalahan infrastruktur di daerah permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil ditata secara layak dan nyaman
						Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Jumlah Rumah yang ditingkatkan kualitasnya
									Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara
					Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah peserta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh

VI.VI-18

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian yang ter huni
							Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana
							Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi
							Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi

VI.VI-19

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang
						Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang sinkron dengan RRTR	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang
										Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

VI.VI-20

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan yang tertangani
					Program pengelolaan tanah Kosong	Persentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah kelurahan terinventarisasi Tanah Kosong	Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong
			Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi
						Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
						Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA

VI.VI-22

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan urusan pemerintahan	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik
									Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik
									Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi tamu

VI.VI-23

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya
										Jumlah bbm dan pelumas yang di sediakan selama 1 tahun
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman yang dipelihara
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan sumber pendanaan dari DAU, BHP/NP dan DBHCHT adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPUPRPKP Kota Malang Tahun 2018 – 2023
Sumber pendanaan dari DAU, BHP/NP dan DBHCHT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			URUSAN WAJIB																			
			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN					302,420,465,031.20		554,954,260,000		303,956,737,775		375,067,879,889		392,296,867,312						
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		3,75	-								4,5							
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman		N/A	3.65		3.80	506,185,322,000	3.95	244,819,790,775	4.10	318,018,888,889	4.25	336,295,227,771						

VI.VI-26

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
				Persentase Penurunan titik genangan			53.85%		100.00%	23,172,659,000	100.00%	27,179,737,000	100.00%	28,730,941,000	100.00%	26,926,397,541							
				Persentase Area Kawasan Kumuh			2.00%		1.20%	11,400,000,000	1.15%	15,400,000,000	1.05%	11,000,000,000	1.00%	11,000,000,000							
		1 03 1.03 59	Program Bina Marga							241,052,877,000		146,774,987,000		173,811,941,000		187,663,997,541							
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik					91.18%	69,696,247,000	92.41%	42,325,250,000	94.46%	61,250,000,000	96.91%	72,550,000,000							
		1 03 1.03 59 001	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jalan di Kota Malang	Panjang Jalan yang dibangun/direhabilitasi dan dikembalikan					25 km	47,329,623,000	15 km	23,625,000,000	25 km	41,250,000,000	30 km	51,750,000,000							
		1 03 1.03 59 002	Pembangunan/Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang	Panjang Jalan Paving yang dibangun/direhabilitasi dan dikembalikan					10 km	1,866,624,000	10 km	5,250,000,000	10 km	5,500,000,000	10 km	5,750,000,000							
		1 03 1.03 59 003	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Rutin					20 km	3,500,000,000	20 km	6,300,000,000	20 km	6,600,000,000	20 km	6,900,000,000							

VI.VI-27

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 59 004	Pemeliharaan Insidentil Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil					28 km	6,500,000,000	28 km	5,250,000,000	28 km	5,500,000,000	28 km	5,750,000,000							
		1 03 1.03 59 005	Perencanaan Infrastruktur Jalan dan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jalan dan pedestrian					35 dokumen	10,500,000,000	39 dokumen	1,900,250,000	44 dokumen	2,400,000,000	44 dokumen	2,400,000,000							
				Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki					89.93 %	16,500,000,000	91.53 %	7,650,000,000	93.14 %	7,800,000,000	94.74 %	5,450,000,000							
		1 03 1.03 59 006	Pembangunan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah lokasi pembangunan pedestrian					3 lokasi	12,000,000,000	2 lokasi	3,150,000,000	2 lokasi	3,300,000,000	2 lokasi	3,450,000,000							
		1 03 1.03 59 007	Rehabilitasi/Pengembangan Pedestrian di Kota Malang	Panjang Pedestrian yang direhabilitasi/dikembangkan					2 km	4,500,000,000	2 lokasi	4,500,000,000	2 lokasi	4,500,000,000	2 lokasi	2,000,000,000							
				Persentase jembatan kota dalam kondisi baik					96.09 %	80,700,000,000	97.27 %	11,200,000,000	98.44 %	15,400,000,000	99.61 %	16,100,000,000							
		1 03 1.03 59 008	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengembangan Jembatan di Kota Malang	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan jembatan					3 lokasi	74,500,000,000	2 lokasi	7,000,000,000	3 lokasi	11,000,000,000	3 lokasi	11,500,000,000							
		1 03 1.03 59 009	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan					10 lokasi	3,000,000,000	10 lokasi	2,100,000,000	10 lokasi	2,200,000,000	10 lokasi	2,300,000,000							

VI.VI-28

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 59 010	Pemeliharaan Insidentil jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan					5 lokasi	3,000,000,000	5 lokasi	1,575,000,000	5 lokasi	1,650,000,000	5 lokasi	1,725,000,000							
		1 03 1.03 59 011	Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan					35 dokumen	200,000,000	4 dokumen	525,000,000	4 dokumen	550,000,000	4 dokumen	575,000,000							
				Persentase drainase kota dalam kondisi baik					83.01 %	23,172,659,000.00	83.51 %	27,179,737,000.00	84.02 %	28,730,941,000.00	84.52 %	26,926,397,540.90							
		1 03 1.03 59 012	Rehabilitasi / Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang direhabilitasi/dikembangkan					10 km	6,572,659,000.00	6 km	6,100,000,000.00	9 km	9,500,000,000.00	9 km	10,000,000,000.00							
		1 03 1.03 59 013	Pemeliharaan Rutin Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dilakukan Pemeliharaan Rutin					2 km	4,000,000,000.00	3 km	4,536,000,000.00	3 km	4,763,325,000.00	2 km	3,024,155,000.00							
		1 03 1.03 59 014	Pemeliharaan Insidentil Drainase	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dilakukan Pemeliharaan Insidentil					5 km	5,000,000,000.00	5 km	7,553,737,000.00	4 km	5,287,616,000.00	3,5 km	4,532,242,541.00							

VI.VI-29

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 59 015	Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong					20 dokumen	600,000,000.00	20 dokumen	1,365,000,000.00	20 dokumen	1,430,000,000.00	20 dokumen	1,495,000,000.00							
		1 03 1.03 59 016	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah Titik Genangan air yang tertangani					6 titik (4 km)	5,000,000,000.00	6 titik (3 km)	5,000,000,000.00	6 titik (3 km)	5,000,000,000.00	6 titik (3 km)	5,000,000,000.00							
		1 03 1.03 59 017	Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/ Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah Titik Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/ Talud/ Bronjong					3 titik	1,500,000,000.00	3 titik	1,575,000,000.00	3 titik	1,650,000,000.00	3 titik	1,725,000,000.00							
		1 03 1.03 59 018	Pemeliharaan Insidentil Turap/ Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah titik Pemeliharaan Insidentil Turap/ Talud/ Bronjong					3 titik	500,000,000.00	3 titik	1,050,000,000.00	3 titik	1,100,000,000.00	3 titik	1,150,000,000.00							
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik					100.0 %	105,000,000.00	100.0 %	110,000,000.00	100.0 %	115,000,000.00	100.0 %	120,000,000.00							
		1 03 1.03 59 019	Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan					8 Lokasi	105,000,000.00	2 lokasi	110,000,000.00	2 lokasi	115,000,000.00	2 lokasi	120,000,000.00							

VI.VI-30

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Irigasi Lainnya																		
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik					91.18 %	682,000,000.00	92.41 %	3,750,000,000.00	94.46 %	500,000,000.00	96.91 %	500,000,000.00						
		1 03 1.03 59 02 0	Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat	Jumlah Pelayanan Persewaan Alat Berat					20 kali	506,500,000.00	20 kali	3,600,000,000.00	22 kali	400,000,000	22 kali	400,000,000						
		1 03 1.03 59 02 1	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi					80 kali	175,500,000.00	80 kali	150,000,000.00	80 kali	100,000,000	80 kali	100,000,000						
				Persentase fasilitas penerangan jalan					67%	50,196,971,000.00	67.23 %	54,560,000,000.00	67.23 %	60,016,000,000.00	67.23 %	66,017,600,000.00						
		1 03 1.03 59 02 2	Perencanaan Penerangan jalan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun					8 Dokumen	500,000,000	8 Dokumen	550,000,000	8 Dokumen	605,000,000	8 Dokumen	665,500,000						
		1 03 1.03 59 02 3	Pembangunan Penerangan Jalan	Jumlah titik penerangan jalan Kota Malang yang terbangun					4.200 titik	14,103,971,000	4.200 titik	15,514,368,100	4.200 titik	17,065,804,910	4.200 titik	18,772,385,401						

VI.VI-31

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 59 024	Pemeliharaan Penerangan Jalan	Jumlah Titik Penerangan Jalan yang terpelihara					19.200 Titik	35,593,000,000	23.400 Titik	38,495,631,900	27.600 Titik	42,345,195,090	31.800 Titik	46,579,714,599							
		1 03 1.03 60	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Jalan	persentase jalan dalam kondisi baik					91%	11,957,556,000.00		11,957,556,000.00		11,957,556,000.00		11,957,556,000.00							
		1 03 1.03 60 001	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)	Panjang Jalan yang direhabilitasi/dilakukan Pengembangan					5 km	11,957,556,000.00	5 km	11,957,556,000.00	5 km	11,957,556,000.00	5 km	11,957,556,000.00							
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.04%	87.72%	89.13%	6,943,575,281	91.18%	-	92.41%	-	94.46%	-	96.91%	-	96.91%	6,943,575,281	Bidang Bina Marga	DB HCHT			
			Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DBHCHT)	Jumlah panjang jalan yang dibangun/direhabilitasi			2.940 m	6,943,575,281										6,943,575,281					
		1 03 1.03	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan pedestrian	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85.04%	87.72%	89.13%	69,408,219,762										46,666,415,762	Bidang Bina Marga				

VI.VI-33

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	persentase jembatan Kota dalam kondisi baik	0.00 %	0.00%	2 km	8,320,591,689										8,320,591,689				
		1 03 1.03 01	Pembangunan Jembatan di Kota Malang	Jumlah Lokasi Pembangunan Jembatan			1 lokasi	1,760,570,000										1,760,570,000				
		1 03 1.03 02	Rehabilitasi / Pengembangan jembatan di Kota Malang	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pengembangan jembatan	29 lokasi	5 lokasi	2 lokasi	3,262,861,689										3,262,861,689				
		1 03 1.03 03	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan		12 lokasi	15 lokasi	1,521,480,000										1,521,480,000				
		1 03 1.03 04	Pemeliharaan Insidental jembatan	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidental jembatan	26 lokasi	1 tahun	10 lokasi	1,521,480,000										1,521,480,000				
		1 03 1.03 05	Perencanaan Infrastruktur Jembatan di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur jembatan		57 dokumen	3 dokumen	254,200,000										254,200,000				

VI.VI-34

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03	Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan Drainase	Persentase drainase Kota dalam kondisi baik	81.49%	82.73%	82.50%	16,324,882,632										16,324,882,632	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase				
		1 03 1.03 01	Rehabilitasi / Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota Malang	Jumlah panjang Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase Gorong-gorong	5 lokasi	26 lokasi	2,75 km	2,245,738,052										2,245,738,052					
		1 03 1.03 02	Pemeliharaan Rutin Drainase	Jumlah Panjang Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase/ Gorong-gorong	62 lokasi	61 lokasi	2,219 km	4,054,435,427										4,054,435,427					
		1 03 1.03 03	Pemeliharaan Insidental Drainase	Jumlah panjang Pemeliharaan Insidental Saluran Drainase/ Gorong-gorong	89 lokasi	1 tahun	3,117 km	5,709,000,000										5,709,000,000					

VI.VI-35

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 04	Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Saluran Drainase/Gorong-gorong	29 dokumen dan 1 aplikasi SIM SDA + 1 aplikasi SIM Drainase	22 dokumen	20 dokumen	450,000,000										450,000,000				
		1 03 1.03 05	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Titik Genangan air yang tertangani	18 lokasi	10 lokasi	1 titik	3,865,709,153										3,865,709,153				
		1 03 1.03	Program Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	33.33%	18.52%	44.44%	1,182,501,907										1,182,501,907	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase			
		1 03 1.03 01	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	Jumlah Lokasi Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	9 lokasi		1 lokasi	382,501,907										382,501,907				
		1 03 1.03 02	Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong di Kota Malang	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/Pengembangan Turap/Talud/Bronjong	2 lokasi	5 lokasi	1 lokasi	50,000,000										50,000,000				

VI.VI-38

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 04 01 09 03	Penataan Penerangan Jalan	Jumlah jaringan meterisasi, tambah daya, pasang baru penerangan jalan kota malang			2 kecamatan (6 kecamatan)	2,310,000,000														
		1 04 01 09 04	Pengawasan dan Pengendalian penerangan jalan	Frekuensi Pengawasan dan pengendalian penerangan jalan			313 kali (12 bulan)	385,000,000														
		1 04 01 09 05	Pengembangan Sistem Smart PJU	Jumlah aplikasi pengembangan sistem smart PJU			1 aplikasi	887,441,500														
		1 04 01 09 06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan	Jumlah rutin/berkala penerangan jalan yang terpelihara			1 kecamatan (7 kecamatan)	3,590,666,232														
		1 04 01 09 07	Optimalisasi SIM PJU	Jumlah Optimalisasi SIM PJU yang terlaksana			1 aplikasi	200,000,000														
		1 03 1.03 61	Program Cipta Karya							275,197,548,000.00		112,116,984,775.00		159,830,332,888.75		162,450,071,770.69						
				Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak					85.02 %	11,581,216,000.00	85.17 %	44,150,000,000.00	85.32 %	23,670,000,000.00	85.47 %	24,700,000,000.00						

VI.VI-39

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 61 001	Pembangunan instalasi Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dibangun					150 SR	850,000,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	750 SR	9,000,000,000.00							
		1 03 1.03 61 002	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan					320 SR	1,235,200,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	750 SR	9,000,000,000.00							
		1 03 1.03 61 003	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang dipelihara					400 SR	1,000,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00							
		1 03 1.03 61 004	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah					8 dokumen	250,000,000.00	5 dokumen	200,000,000.00	5 dokumen	250,000,000.00	5 dokumen	250,000,000.00							
		1 03 1.03 61 005	Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Limbah Minum					93 Pelaksanaan	200,000,000.00	2 kali	450,000,000.00	1 kali	220,000,000.00	1 kali	250,000,000.00							
		1 03 1.03 61 006	Sosialisasi air limbah domestik	Jumlah lokasi sosialisasi air limbah domestik					500 orang	200,000,000.00	5 kecamatan	200,000,000.00	5 kecamatan	200,000,000.00	5 kecamatan	200,000,000.00							
		1 03 1.03 61 007	Fasilitasi SPAL Skala Kota	Jumlah SPAL skala kota yang terfasilitasi					1 lokasi	3,700,000,000.00	1 lokasi	3,700,000,000.00	1 lokasi	4,000,000,000.00	1 lokasi	4,000,000,000.00							

VI.VI-40

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 61 008	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara					2 lokasi	589,440,000.00	2 lokasi	450,000,000.00	2 lokasi	495,000,000.00	2 lokasi	544,500,000.00							
		1 03 1.03 61 009	Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT					3000 kali	475,352,000.00	3250 kali	450,000,000.00	3500 kali	495,000,000.00	3750 kali	544,500,000.00							
		1 03 1.03 61 010	Fasilitasi Operasional Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah layanan penyedotan lumpur tinja					12 kali	360,230,000.00	12 kali	400,000,000.00	12 kali	440,000,000.00	12 kali	484,000,000.00							
		1 03 1.03 61 011	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tinggal yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT					3000 rumah tinggal	2,720,994,000.00	3250 rumah tinggal (pengadaan mesin IPLT dan instalasinya)	19,300,000,000.00	3500 rumah tinggal	1,430,000,000.00	3750 rumah tinggal	1,573,000,000.00							
				Persentase rumah tinggal berakses air bersih					93.71 %	5,360,000,000.00	94.01 %	11,100,000,000.00	94.01 %	11,200,000,000.00	94.16 %	11,700,000,000.00	94.16 %						

VI.VI-41

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 61 01 2	Pembangunan, Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang dibangun, dikembangkan dan direhabilitasi					600 SR	3,760,000,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	700 SR	8,500,000,000.00	750 SR	9,000,000,000.00							
		1 03 1.03 61 01 3	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	Jumlah SR yang dipelihara secara rutin					866 SR	1,150,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00	1000 SR	2,000,000,000.00							
		1 03 1.03 61 01 4	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	Jumlah Dokumen Perencanaan					5 dokumen	200,000,000.00	5 dokumen	200,000,000.00	5 dokumen	250,000,000.00	5 dokumen	250,000,000.00							
		1 03 1.03 61 01 5	Pembinaan rutin HIPPAM	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin					2 kali	250,000,000.00	2 kali	400,000,000.00	2 kali	450,000,000.00	2 kali	450,000,000.00							
				Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik					84.80 %	248,264,844,000.00	89.87 %	28,144,277,500.00	94.93 %	121,051,490,250.00	100.00 %	121,945,787,000.00	100.00 %						
		1 03 1.03 61 01 6	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi					11 gedung	245,063,197,000.00	9 gedung	22,761,477,500.00	6 gedung	115,499,551,000.00	6 gedung	116,274,528,000.00							Pena mb ah an IC da n Ge du ng bel ak

VI.VI-42

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
							2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
																							an g bal aik ota
		1 03 1.03 61 017	Pemeliharaan Rutin Gedung /Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin					6 gedung	1,151,647,000.00	10 gedung	3,110,052,000.00	10 gedung	3,165,554,000	10 gedung	3,165,554,000							
		1 03 1.03 61 018	Pemeliharaan Insidental Gedung /Bangunan Kantor	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara insidental					8 unit	2,000,000,000.00	10 gedung	2,217,623,000.00	10 gedung	2,328,504,000	10 gedung	2,444,930,000							
		1 03 1.03 61 019	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum					1 dokumen	50,000,000.00	11 dokumen	55,125,000.00	11 dokumen	57,881,250	11 dokumen	60,775,000							
				Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung					100%	1,070,145,000.00	100%	829,454,850.00	100%	870,927,592.50	100%	914,473,972.13	100%						

VI.VI-43

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 61 02 0	Sosialisasi SLF	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF					150 orang	165,000,000.00	150 orang	165,375,000.00	150 orang	173,643,750	150 orang	182,325,938						
		1 03 1.03 61 02 1	Kegiatan Pelaksanaan SLF	Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang					12 lokasi	360,145,000.00	12 lokasi	276,914,925.00	12 lokasi	290,760,671	12 lokasi	305,298,705						
		1 03 1.03 61 02 2	Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Data Bangunan Gedung					4000 data	210,000,000.00	4000 data	220,500,000.00	4000 data	231,525,000	4000 data	243,101,250						
		1 03 1.03 61 02 3	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB	Jumlah pelaksanaan fasilitasi TABG					6 Pelaksanan	335,000,000.00	6 Pelaksanan	166,664,925.00	6 Pelaksanan	174,998,171	6 Pelaksanan	183,748,080						
				Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung					100%	1,424,343,000.00	100.00%	1,528,252,425.00	100.00%	1,604,665,046.25	100.00%	1,684,898,298.56	100.00%	-				
		1 03 1.03 61 02 4	Pemberdayaan Bina Jasa Kontruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi					200 orang	240,000,000.00	200 orang	332,039,925.00	200 orang	348,641,921	200 orang	366,074,017						
		1 03 1.03 61 02 5	Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Kontruksi	Jumlah aplikasi database jasa konstruksi					1 aplikasi	100,000,000.00	1 aplikasi	110,250,000.00	1 aplikasi	115,762,500	1 aplikasi	121,550,625						

VI.VI-45

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 61 3 1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Luasan kawasan penataan bangunan					1 ha	6,740,000,000.00	2 ha	25,682,500,000.00	2 ha	716,625,000	2 ha	752,456,250						
		1 03 1.03	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang	Persentase Rumah Tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	50.00%	96.81%	90.21%	12,574,203,400									3,590,850,540	Bidang Air Minum dan Air Limbah				
		1 03 1.03 26 0 1	Pembangunan instalasi Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun	5 lokasi air minum dan air limbah dan 2 lokasi (DAK)		150 SR	2,003,188,500									2,003,188,500					
		1 03 1.03 26 0 3	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dipelihara	21 lokasi air minum dan air limbah	5 lokasi	400 SR	369,686,900									369,686,900					
		1 03 1.03 26 0 4	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan		5 kali	5 dokumen	51,500,000									51,500,000					

VI.VI-46

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterrangan
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 26 005	monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Jumlah Pelaksana an Monitoring dan peningkatan kinerja Pengolahan air Minum			1 dokumen	200,000,000										200,000,000				
		1 03 1.03 26 006	Sosialisasi air limbah domestik	Junlah lokasi sosialisasi air limbah domestik	210 orang		5 kecamatan	100,000,000										100,000,000				
		1 03 1.03 26 008	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara	500 orang		2 lokasi	50,000,000										50,000,000				
		1 03 1.03 26 009	Fasilitasi Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	2 lokasi	2 lokasi	1100 kali	303,980,000										303,980,000				
		1 03 1.03 26 010	Fasilitasi operasional layananan lumpur tinja terjadwal	Jumh layanan Lumpur Tinja Terjadwal	1109 kali	3680 kali	12 kali	42,500,000										42,500,000				
		1 03 1.03 26 011	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah lokasi layanan lumpur tinja			2 lokasi	270,000,000										270,000,000				

VI.VI-47

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 26 013	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dikembangkan/direhabilitasi			320 SR	200,000,000									200,000,000						
		1 03 1.03 26 014	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)	jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun / direhab			850 SR	5,883,348,000															
		1 03 1.03 26 15	Penyediaan /Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (IPLT)	Jumlah sarana pengelolaan air limbah yang terbangun			1 LOKASI	3,100,000,000															
		1 03 1.03	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang	Persentase Rumah Tinggal berakses air minum	0.00 %	0.00%	5 dokumen	5,405,959,813									1,850,813	Bidang Air Minum dan Air Limbah					
		1 03 1.03 14 001	Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang dibangun,di kembangkan dan direhabilitasi	air minum dan air limbah dan 31 lokasi (DAK)	1 lokasi	155 sr	1,018,867,563									1,018,867,563						

VI.VI-49

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 01 1	Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	persentase gedung milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang dalam kondisi baik	0.00 %	0.00%	0.00 %	102,675,922,706										102,675,922,706	Bidang Cipta Karya			
		1 03 1.03 37 00 1	Pembangunan Islamic Center	Jumlah Pembangunan Gedung di Kawasan Islamic Center			1 unit	46,242,850,000										46,242,850,000				
		1 03 1.03 37 00 2	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum		17 lokasi	4 unit	52,839,962,796										52,839,962,796				
		1 03 1.03 37 00 3	Pemeliharaan Rutin Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Rutin		6 lokasi	4 unit	1,006,850,000										1,006,850,000				
		1 03 1.03 37 00 4	Pemeliharaan Insidental Gedung/Bangunan Kantor	Jumlah Lokasi Pemeliharaan Insidental	5 lokasi	1 tahun	10 unit	2,011,450,000										2,011,450,000				

VI.VI-50

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1.03.37.005	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum			11 dokumen	400,000,000											400,000,000				
		1.03.37.007	Operasional UPT Perkantoran Terpadu	Jumlah Jenis operasional UPT Perkantoran Terpadu	44 kali	1 tahun	11 Jenis	174,809,910											174,809,910	UPT Perkantoran Terpadu			
		1.03.37.008	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pelayanan terpadu	luas Pemeliharaan UPT Perkantoran Terpadu	0.00 %	2 gedung	3,5 Ha	-											-	UPT Perkantoran Terpadu			
		1.03.01	Program Pembangunan Sistem Informasi/data base gedung/bangunan	persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Syarat Proses Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		35.34%	11 dokumen	752,340,000											752,340,000	Bidang Cipta Karya			
		1.03	Sosialisasi SLF	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF	100 Orang	100 orang	150 orang	150,000,000											150,000,000				

VI.VI-53

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
							Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		1 03 1.03 01	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang	Persentase Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Prioritas di Kota Malang		42.86%	71.43%	1,284,269,000														
		1 03 1.03 01	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	1 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	650,000,000														
		1 03 1.03 02	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Luasan kawasan penataan bangunan		1 kawasan	4 ha	2,634,269,000														
		1 04 1.03 12	Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman							11,400,000,000		15,400,000,000		11,000,000,000		11,000,000,000						
				Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau					55.00%		65.00%		75.00%		80.00%							
				Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU					55.00%		65.00%		75.00%		80.00%							

VI.VI-54

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 04 1.03 12 00 1	Pengelolaan Perumahan dan PSU	Jumlah Prasarana Sarana utilitas (PSU) yang berhasil dikelola dengan baik					7 PSU	3,459,000,000	7 PSU	3,804,900,000	7 PSU	4,185,390,000	7 PSU	4,603,929,000							
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni					0.19 %		0.10 %		0.04 %		0.00 %								
		1 04 1.03 12 00 2	Perencanaan Kawasan Permukiman	Jumlah Perumahan yang berhasil direncanakan sesuai peraturan yang berlaku					3 Dokumen	750,000,000	3 Dokumen	990,000,000	3 Dokumen	1,089,000,000	3 Dokumen	1,197,900,000							
		1 04 1.03 12 00 3	Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Perumahan yang berhasil ditata secara layak dan nyaman					1 Kawasan	150,000,000	1 Kawasan	165,000,000	1 Kawasan	181,500,000	1 Kawasan	199,650,000							
		1 04 1.03 12 00 4	Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman	Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik					15 Titik	2,550,000,000	15 Titik	3,300,000,000	15 Titik	3,630,000,000	15 Titik	3,993,000,000							
		1 04 1.03 12 00 5	Pemeliharaan Insidental Kawasan Permukiman	Jumlah titik permukiman yang terpelihara dengan baik					6 Titik	1,000,000,000	6 Titik	3,300,000,000	6 Titik	3,630,000,000	6 Titik	3,993,000,000							

VI.VI-59

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				n Rusunawa																		
		1 04 01 08 02	Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa	Jumlah Pengadaan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rusunawa			2 lokasi	572,400,000														
		1 04 01 08 03	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa			2 lokasi	1,515,506,625														
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak					85.02 %	1,150,000,000.00	85.17 %	1,150,000,000.00	85.32 %	1,150,000,000.00	85.47 %	1,150,000,000.00	85.47 %	-				
			Penyediaan/ Pemeliharaan Saluran Air Limbah (DBHCHT)	Jumlah instalasi Air limbah rumah tinggal yang dibangun					150 SR	1,150,000,000.00	150 SR	1,150,000,000.00	150 SR	1,150,000,000.00	150 SR	1,150,000,000.00						
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang			Persentase Ketaatan Tata Ruang					28.72 %	2,260,000,000.00	30.72 %	3,827,200,000.00	32.72 %	3,962,150,000.00	34.72 %	4,062,150,000.00						

VI.VI-60

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023							
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Program Penataan Ruang dan Pertanahan																			
				Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani					100%	1,240,500,000.00	100%	2,412,150,000.00	100%	2,512,150,000.00	100%	2,612,150,000.00	100%	1,350,000.00				
			Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang					1800 berkas	395,890,000.00	1800 berkas	1,500,000,000.00	1800 berkas	1,500,000,000.00	1800 berkas	1,500,000,000.00		750,000,000				
			Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan					4 lokasi	312,150,000.00	4 lokasi	312,150,000.00	4 lokasi	312,150,000.00	4 lokasi	312,150,000.00		600,000,000				
			Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana rencana kota	Jumlah keterangan rencana kota yang diproses sesuai SOP					1800 berkas	382,460,000.00	1800 berkas	300,000,000.00	1800 berkas	400,000,000.00	1800 berkas	500,000,000.00						
			Prenyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Aplikasi Informasi pertanahan					1 aplikasi	100,000,000.00	1 aplikasi	200,000,000.00	1 aplikasi	200,000,000.00	1 aplikasi	200,000,000.00						

VI.VI-61

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah					3 kali	50,000,000.00	10 kali	100,000,000.00	10 kali	100,000,000.00	10 kali	100,000,000.00							
				Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang					7.00 %	1,019,500,000.00	10.00 %	1,415,050,000.00	12.00 %	1,450,000,000.00	14.00 %	1,450,000,000.00	14.00 %						
			Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang					1 dokumen	160,000,000.00	2 dokumen	300,000,000.00	2 dokumen	300,000,000.00	2 dokumen	300,000,000.00							
			Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi tata ruang					1 Aplikasi	54,450,000.00	1 Aplikasi	100,000,000.00	1 Aplikasi	100,000,000.00	1 Aplikasi	100,000,000.00							
			Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang					1 dokumen	320,000,000.00	1 dokumen	400,000,000.00	1 dokumen	400,000,000.00	1 dokumen	400,000,000.00							
			Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang					2 dokumen	150,000,000.00	2 dokumen	200,000,000.00	2 dokumen	200,000,000.00	2 dokumen	200,000,000.00							

VI.VI-62

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi					2 sosialisasi (BWP Malang Utara)	70,000,000.00	4 sosialisasi	150,000,000.00	4 sosialisasi	150,000,000	4 sosialisasi	150,000,000							
			Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen TKPRD					1 dokumen	265,050,000.00	1 dokumen	265,050,000.00	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000							
		1 03 1.03	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100.00%	106.00%	80.00%	142,350,000									142,350,000	Bidang Tata Ruang					
		1 03 1.03 01	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan dan pengendalian tata ruang	44 kali	5 kecamatan	1800 berkas	87,400,000									87,400,000						
		1 03 1.03 02	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/Bangunan	Jumlah lokasi Identifikasi	10 kegiatan	1 keurahan	1 lokasi	54,950,000									54,950,000						
		1 03 1.03	Program Perencanaan Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan dan sistem informasi Tata Ruang			80.00%	384,150,000									384,150,000	Bidang Tata Ruang					

VI.VI-64

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran					
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 04 01 21 0 4	Pengadaan Lahan Makam	Luasan Pengadaan Lahan Makam	7.232,5 m2			6,100,000,000															
		1 04 01 21 0 5	FGD Pertanahan	Tersusunnya Basis tanah kosong	4 kali pertemuan			-															
	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP		81.04	81.85		82.67	11,936,279,000.00	83.5	12,730,010,000.00	84.33	13,355,900,000.00	85.17	14,013,092,000.00							
			Program Pelayanan Kesekretariatan							11,936,279,000.00		12,730,010,000.00		13,355,900,000.00		14,013,092,000.00							
				Nilai survey kepuasan internal		81.08	82.04		82.86	7,386,948,000.00	83.69	7,953,260,000.00	84.53	8,340,370,000.00	85.37	8,746,842,000.00							
		1 03 1.03 07 0 3 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik					1000 surat	486,275,000.00	1000 surat	510,580,000.00	1000 surat	536,100,000.00	10000 surat	562,900,000.00							
		1 03 1.03 07 0 3 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik					6 rekening	1,627,500,000.00	6 rekening	1,708,870,000.00	6 rekening	1,794,310,000.00	6 rekening	1,884,020,000.00							
		1 03 1.03 07 0 3 7	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan Ruangan yang dibersihkan					3880 m2	645,063,750.00	3880 m2	677,310,000.00	3880 m2	711,170,000.00	3880 m2	746,720,000.00							

VI.VI-65

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 07 03 8	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat tulis kantor					48 jenis	459,120,000.00	48 jenis	482,070,000.00	48 jenis	506,170,000.00	48 jenis	531,470,000.00							
		1 03 1.03 07 04 0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					16 jenis	108,570,000.00	16 jenis	113,990,000.00	16 jenis	119,680,000.00	16 jenis	125,660,000.00							
		1 03 1.03 07 03 3	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor					20 jenis	1,765,169,250.00	20 jenis	1,853,420,000.00	20 jenis	1,946,090,000.00	20 jenis	2,043,390,000.00							
		1 03 1.03 07 04 3	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman					17.00 kotak & 850 dos	426,775,000.00	17.00 kotak & 850 dos	448,110,000.00	17.000 kotak & 850 dos	470,510,000.00	17.00 kotak & 850 dos	494,030,000.00							
		1 03 1.03 07 04 4	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi					20 orang 32 kali	448,710,000.00	20 orang 32 kali	471,140,000.00	20 orang 32 kali	494,690,000.00	20 orang 32 kali	519,420,000.00							
		1 03 1.03 07 05 0	Peringatan /Kegiatan Insidentil	Jumlah perkiraan kegiatan peringatan /kegiatan insidentil					1 kendaraan hias	25,000,000.00	1 kendaraan hias	26,250,000.00	1 kendaraan hias	27,560,000.00	1 kendaraan hias	28,930,000.00							

VI.VI-66

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 07 03 5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional					13 kendaraan	161,650,000.00	13 kendaraan	169,730,000.00	13 kendaraan	178,210,000.00	13 kendaraan	187,120,000.00							
		1 03 1.03 07 06 6	Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah bbm dan pelumas yang disediakan selama 1 tahun					62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan	884,950,000.00	62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan	929,190,000.00	62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan	975,640,000.00	62.600 liter pertamax, 20.000 liter solar non subsidi, 500 liter oli mesin, 100 liter oli gardan	1,024,420,000.00							
		1 03 1.03 07 07 2	Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur					15 kali	348,165,000.00	20 kali	562,600,000.00	20 kali	580,240,000.00	20 kali	598,762,000.00							
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik					100%	3,010,600,000.00	100%	3,161,130,000.00	100%	3,319,180,000.00	100%	3,485,130,000.00							

VI.VI-67

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran					
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 07 02 0	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala					23 kendaraan	209,400,000.00	23 kendaraan	219,870,000.00	23 kendaraan	230,860,000.00	23 kendaraan	242,400,000.00							
		1 03 1.03 07 02 2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara					16 jenis	2,268,000,000.00	16 jenis	2,381,400,000.00	16 jenis	2,500,470,000.00	16 jenis	2,625,490,000.00							
		1 03 1.03 07 02 9	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Jumlah taman yang dipelihara					4 lokasi	533,200,000.00	4 lokasi	559,860,000.00	4 lokasi	587,850,000.00	4 lokasi	617,240,000.00							
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu					100%	1,538,731,000.00	100%	1,615,620,000.00	100%	1,696,350,000.00	100%	1,781,120,000.00							
		1 03 1.03 07 00 2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah					5 dokumen	187,995,000.00	5 dokumen	197,390,000.00	5 dokumen	207,250,000.00	5 dokumen	217,610,000.00							
		1 03 1.03 07 00 1	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi	Jumlah sistem informasi/aplikasi					2 aplikasi	236,000,000.00	2 aplikasi	247,800,000.00	2 aplikasi	260,190,000.00	2 aplikasi	273,190,000.00							

VI.VI-68

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023								
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran					Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		1 03 1.03 07 003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja					4 dokumen	145,700,000.00	4 dokumen	152,980,000.00	4 dokumen	160,620,000.00	4 dokumen	168,650,000.00							
		1 03 1.03 07 004	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan					2 laporan	413,431,000.00	2 laporan	434,100,000.00	2 laporan	455,800,000.00	2 laporan	478,590,000.00							
		1 03 1.03 07 014	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah Sistem Pengawasan Internal (SPI)					1 dokumen	22,970,000.00	1 dokumen	24,110,000.00	1 dokumen	25,310,000.00	1 dokumen	26,570,000.00							
		1 03 1.03 07 007	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan masyarakat					3 dokumen	84,685,000.00	3 dokumen	88,910,000.00	3 dokumen	93,350,000.00	3 dokumen	98,010,000.00							
		1 03 1.03 07 010	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA					4 dokumen	41,000,000.00	4 dokumen	43,050,000.00	4 dokumen	45,200,000.00	4 dokumen	47,460,000.00							
		1 03 1.03 07 015	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah dokumen profil perangkat daerah					1 dokumen	62,520,000.00	1 dokumen	65,640,000.00	1 dokumen	68,920,000.00	1 dokumen	72,360,000.00							
		1 03 1.03 07 013	Penyusunan Renja/RKT	Jumlah dokumen Renja/RKT					1 dokumen	248,170,000.00	1 dokumen	260,570,000.00	1 dokumen	273,590,000.00	1 dokumen	287,260,000.00							

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan				
							2019		2020		2021		2022		2023		Targe t	Anggara n						
					201 7	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)												4.5		4.5						
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman			3.65		3.8		3.95		4.1		4.25		4.25							
				Persentase Penurunan titik genangan			53,85	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%				
				Persentase Area Kawasan Kumuh			2,00	%	1,20	%	1,15	%	1,05	%	1,00	%	1,00	%	1,00	%				
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	111.98%	105.51%	84.86	%	6,690,855,400	85.02	%	11,581,216,000	85.17	%	44,150,000,000	85.32	%	26,530,000,000	85.47	%	27,846,000,000	85.47%	27,846,000,000	Bidang Cipta karya
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			1000 dan 500	SR dan TS	6,690,855,400	1000 dan 500	SR dan TS	11,581,216,000	1000 dan 500	SR dan TS	44,150,000,000	1200 dan 500	SR dan TS	26,530,000,000	1200 dan 500	SR dan TS	27,846,000,000	1200 dan 500 SR dan TS	27,846,000,000	
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung			700	SR		700	SR		700	SR		700	SR		700	SR		700 SR		
				Jumlah Lokasi Pembangunan / Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat			15	lokasi	5,103,188,500	15	lokasi	4,550,000,000	15	lokasi	12,200,000,000	15	lokasi	12,500,000,000	15	lokasi	13,000,000,000	15 lokasi	13,000,000,000	
		1.03.05.2.	Rehabilitasi/Perluasan Sistem Pengelolaan Air	Jumlah instalasi pengolahan air limbah			150	SR	621,186,900	320	SR	2,485,200,000	11	lokasi	10,700,000,000	700	SR	10,750,000,000	750	SR	11,250,000,000	750 SR	11,250,000,000	

VI.VI-80

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		01.05	Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	domestik yang dipelihara																					
				Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan			400	SR			400	SR			1000	SR			1000	SR	SR		1000	SR	
				Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah			5	dokumen			8	dokumen			5	dokumen			5	dokumen			5	dokumen	
		1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik			150	orang	200,000,000	150	orang	200,000,000	150	orang	450,000,000	150	orang	220,000,000	150	orang	250,000,000	150	orang	250,000,000	
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik			1000	orang	100,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara			2	Lokasi		2	Lokasi		2	Lokasi		2	Lokasi		2	Lokasi	2	Lokasi		UPT PALD	
				Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT			2750	kali	353,980,000	3000	kali	1,064,792,000	3500	kali	900,000,000	3500	kali	990,000,000	3750	kali	1,089,000,000	3750	kali	1,089,000,000	
		1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan Penyedotan lumpur tinja			250	kali	42,500,000	250	kali	360,230,000	250	kali	400,000,000	250	kali	440,000,000	250	kali	484,000,000	250	kali	484,000,000	UPT PALD
		1.03.05.2.01.16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah rumah tinggal ber Tangki septik yang melakukan pembuangan air limbah			3250	Tangki Septik	270,000,000	3000	Tangki Septik	2,720,994,000	3250	Tangki Septik	19,300,000,000	3250	Tangki Septik	1,430,000,000	3250	Tangki Septik	1,573,000,000	3250	Tangki Septik	1,573,000,000	UPT PALD

VI.VI-81

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan	
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				domestik ke IPLT																	
		1.03. 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	100 .00 %	98.0 2%	90.21 %	1,758,395 ,563	93.71 %	5,360,00 0,000	94.01 %	11,100,00 0,000	94.01 %	11,200,00 0,000	94.16 %	11,700,00 0,000	94,16 %	11,700, 000,000	Bidang Cipta karya		
		1.03. 03.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			1466 SR	1,758,395, 563	1466 SR	5,360,000 ,000	1466 SR	11,100,00 0,000	1466 SR	1120000 0000	1466 SR	11,700,00 0,000	1466 SR	11,700, 000,000			
		1.03. 03.2. 01.0 3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Dokumen Perencanaan			4 dokum en		5 doku men		5 doku men		5 doku men		5 doku men		5 doku men	5 doku men	9,250,00 0,000	9,250,00 0,000	
		1.03. 03.2. 01.1 4	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin			200 orang	61,160,00 0	200 orang	250,000,0 00	200 orang	400,000,0 00	200 oran g	450,000 ,000	200 orang	450,000,0 00	200 orang	450,000 ,000	200 orang	450,000 ,000	
		1.03. 03.2. 01.1 5	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin			866 SR	678,368,0 00	866 SR	1,150,000 ,000	866 SR	2,000,000 ,000	866 SR	2,000,00 0,000	866 SR	2,000,000 ,000	866 SR	2,000,00 0,000	866 SR	2,000,00 0,000	
		1.03. 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	69. 67 %	145. 50%	84.7 %		84,80 %		89,87 %		94,93 %		100 %		100 %	122,860 ,260,97 2	Bidang Cipta karya		
				Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi	97. 73 %	102. 46%	35.34 %	57,010,60 2,796	100 %	249,334, 989,000	100 %	28,973,7 32,350	100 %	121,922 ,417,84 3	100 %	122,860, 260,972	100 %	-			

VI.VI-82

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan				
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				bangunan gedung																				
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			19	gedung	57,010,602,796	19	gedung	249,334,989,000	19	gedung	28,973,732,350	19	gedung	121,922,417,843	19	gedung	122,860,260,972	19	gedung	122,860,260,972
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahtsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dibangun dan direhabilitasi			17	gedung	52,839,962,796	11	gedung	245,063,197,000	9	gedung	22,761,477,500	11	gedung	115,499,551,000	11	gedung	116,274,528,000	11	gedung	116,274,528,000
		1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung/bangunan kantor dan fasilitas umum yang dipelihara secara rutin dan insidental			14	gedung	3,018,300,000	14	gedung	3,151,647,000	20	gedung	5,327,675,000	13	gedung	5,494,058,000	23	gedung	5,610,484,000	23	gedung	5,610,484,000
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum			11	dokumen	400,000,000	1	dokumen	50,000,000	11	dokumen	55,125,000	19	dokumen	57,881,250	10	dokumen	60,775,000	10	dokumen	60,775,000
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF			150	orang		150	orang		150	orang		150	Orang		150	Orang	150	Orang	671,372,722	
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang			12	lokasi	552,340,000	12	lokasi	860,145,000	12	lokasi	662,789,925	12	lokasi	639,402,593	7	lokasi	671,372,722	7	lokasi	-
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung			6	pelaksanaan	552,340,000	6	pelaksanaan	860,145,000	6	pelaksanaan	662,789,925	6	pelaksanaan	639,402,593	6	pelaksanaan	671,372,722	6	pelaksanaan	-
		1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah Data Bangunan Gedung			4000	data	200,000,000	4000	data	210,000,000	4000	data	166,664,925	4000	data	231,525,000	4000	data	243,101,250	4000	data	243,101,250

VI.VI-83

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota																						
		1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat			22.00	%	1,037,513,000	56.00	%	1,424,343,000	78.00	%	1,528,252,425	89.00	%	1,604,665,046	100	%	1,684,898,299	100%	1,684,898,299	Bidang Cipta karya	
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota			60	orang	360,000,000	60	orang	376,343,000	60	orang	396,900,000	60	orang	416,745,000	60	orang	437,582,250	60 orang	437,582,250		
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi			60	orang	360,000,000	60	orang	376,343,000	60	orang	396,900,000	60	orang	416,745,000	60	orang	437,582,250	60 orang	437,582,250		
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi			100	%	376,343,000	100	%	808,000,000	100	%	799,312,500	100	%	839,278,125	100	%	881,242,031	100%	881,242,031		
		1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen HSPK			3	dokumen	200000000	1	dokumen	250,000,000	3	dokumen	220,500,000	3	dokumen	231,525,000	3	dokumen	243,101,250	3 dokumen	243,101,250		
		1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah data badan usaha yang terupdate pada sistem informasi			25	data		50	data		50	data		50	data		50	data		50 data			
				Jumlah aplikasi database jasa konstruksi			1	aplikasi	525,000,000	1	aplikasi	558,000,000	1	aplikasi	578,812,500	1	aplikasi	607,753,125	1	aplikasi	638,140,781	1 aplikasi	638,140,781		
				Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi			1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1 dokumen			
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan			200	badan usaha	301,170,000	200	badan usaha	240,000,000	200	badan usaha	332,039,925	200	badan usaha	348,641,921	200	badan usaha	366,074,017	badan usaha	366,074,017		

VI.VI-84

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan						
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
		1.03. 11.2. 03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			200	peserta	301,170,000	200	peserta	240,000,000	200	peserta	332,039,925	200	peserta	348,641,921	200	peserta	366,074,017	200	peserta	366,074,017		
		1.03. 09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL			1.27	%	3,284,269,000	5.00	%	7,497,000,000	5.00	%	26,365,000,000	7.00	%	1,433,250,000	9.00	%	1,504,912,500	9%	1,504,912,500	Bidang Cipta karya		
		1.03. 09.2. 01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik			200	m2	3,284,269,000	200	m2	7,497,000,000	200	m2	26,365,000,000	200	m2	1,433,250,000	200	m2	1,504,912,500	200	m2	1,504,912,500		
		1.03. 09.2. 01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL			2	dokumen	650,000,000	5	dokumen	757,000,000	3	dokumen	682,500,000	2	dokumen	716,625,000	2	dokumen	752,456,250	2	dokumen	752,456,250		
		1.03. 09.2. 01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Luasan kawasan penataan bangunan			4	ha	2,634,269,000	1	ha	6,740,000,000	200	ha	25,682,500,000	200	ha	716,625,000	200	ha	752,456,250	200	ha	752,456,250		
		1.03. 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	107.02%	105.28%	100	%		100	%		90	%		95	%		100	%		100%				
				Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung			0	%	100,000,000	23.22	%	105,000,000	24.55	%	130,000,000	47.45	%	115,000,000	71.45	%	120,000,000	71.45%	120,000,000			
		1.03. 02.2. 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi			15	Ha	100,000,000	15	Ha	105,000,000	13	Ha	40,000,000	10	Ha	40,000,000	10	Ha	40,000,000	10 Ha	40,000,000	Bidang Bina Marga		
		1.03. 02.2. 02.14	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan			2	Lokasi	100,000,000	2	Lokasi	105,000,000	2	Lokasi	40,000,000	2	Lokasi	40,000,000	2	Lokasi	40,000,000	2	Lokasi	40,000,000		

VI.VI-85

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		1.03. 02.2. 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume debit air pada bangunan penampung				-			630	m3	90,000,000	630	m3	75,000,000	660	m3	80,000,000	660 m3	80,000,000	Bidang Cipta karya			
		1.03. 02.2. 01.0 1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis bangunan penampung air lainnya							1	dokumen	35,000,000	1	dokumen	37,500,000	1	dokumen	40,000,000	1 dokumen	40,000,000				
		1.03. 02.2. 01.0 6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah lokasi penampung air yang dibangun							10	titik	55,000,000	10	titik	37,500,000	10	titik	40,000,000	10 titik	40,000,000				
		1.03. 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	106.11%	103.80%	82,50	%	17,207,384,539	83,01	%	23,172,659,000	83,51	%	27,179,737,000	84,01	%	28,730,941,000	84,52	%	26,926,397,541	84,52%	26,926,397,541	Bidang Bina Marga	
		1.03. 06.2. 01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase kota dalam kondisi baik			22	km	17,207,384,539	22	km	23,172,659,000	22	km	27,179,737,000	22	km	28,730,941,000	22	km	26,926,397,541	22 km	26,926,397,541		
		1.03. 06.2. 01.02	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/Gorong-gorong			20	Dokumen	450,000,000	20	Dokumen	600,000,000	20	Dokumen	1,365,000,000	20	Dokumen	1,430,000,000	20	Dokumen	1,495,000,000	20 Dokumen	1,495,000,000		
		1.03. 06.2. 01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani			6	Lokasi	3,865,709,153	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000	6 Lokasi	5,000,000,000		
		1.03.	Rehabilitasi Saluran Drainase	Panjang Saluran Drainase/			9	km	2,628,239,958	10	km	8,072,659,000	9	km	7,675,000,000	9	km	11,150,000,000	9	km	11,725,000,000	9 km	11,725,000,000		

VI.VI-87

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
			Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur penerangan jalan			16	Dokum en	18	Doku men	11	Doku men	16	Doku men	16	Doku men	16	Doku men	16	Doku men					
																					-				
				Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan			30	km	25	km	30	km	25	km	30	km	30	km	30	km	53,750, 000,000				
		1.03. 10.2. 01.09	Rehabilitasi Jalan	panjang pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan			28,025,66 0,257		2	lokasi	51,829,62 3,000		2	lokasi	28,125,00 0,000		2	lokasi	45,750, 000,000	53,750,00 0,000	2	lokasi	-		
				Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan			38	km	48	km	48	km	48	km	48	km	48	km	48	km	48	km			
		1.03. 10.2. 01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah titik penerangan jalan jalan yang terpelihara			15,104,03 6,232		1800	titik	47,459,62 4,000		1800	titik	38,495,63 1,900		27600	titik	59,945, 195,090	64,979,71 4,599	3180 0 titik	64,979, 714,599			
		1.03. 10.2. 01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun			1	lokasi	1,760,570, 000		3	lokasi	74,500,00 0,000	3	lokasi	7,000,000 ,000	3	lokasi	11,000, 000,000	3	lokasi	11,500,00 0,000	3	lokasi	11,500, 000,000
				Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan			15	lokasi			15	lokasi		15	lokasi		15	lokasi		15	lokasi	15	lokasi		
		1.03. 10.2. 01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidental jembatan			3,042,960, 000		10	lokasi	6,000,000 ,000		10	lokasi	3,675,000 ,000		10	lokasi	3,850,0 00,000	4,025,000 ,000	10	lokasi	4,025,0 00,000		
				jumlah jalan yang terbangun/tere habilitasi			2	lokasi			2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi	2	lokasi		
		1.03. 10.2. 01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah titik penerangan jalan kota malang yang terbangun/tere habilitasi			2500	titik	2,227,500, 000		4200	titik	26,103,97 1,000	2500	titik	18,664,36 8,100	4200	titik	20,365, 804,910	2500	titik	22,222,38 5,401	2500	titik	22,222, 385,401
				jumlah lokasi pedestrian yang terbangun/tere habilitasi			2	lokasi			2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi	2	lokasi		
		1.03. 10.2. 01.2 0	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi			80	kali	682,000,0 00		80	kali	682,000,0 00	80	kali	3,750,000 ,000	80	kali	500,000 ,000	80	kali	500,000,0 00	80	kali	500,000 ,000

VI.VI-88

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan				
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
																					-			
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			50	%	200,000,000	55	%	3,459,000,000	55.00	%	3,804,900,000	63.76	%	4,185,390,000	80.00	%	4,603,929,000	80 %	4,603,929,000	Bidang PKP
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			7	PSU	200,000,000	7	PSU	3,459,000,000	70	PSU	3,804,900,000	70	PSU	4,185,390,000	70	PSU	4,603,929,000	70 PSU	4,603,929,000	
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang di serah terimakan			7	PSU	200,000,000	7	PSU	3,459,000,000	70	PSU	3,804,900,000	70	PSU	4,185,390,000	70	PSU	4,603,929,000	70 PSU	4,603,929,000	
		1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau			50	%	6,845,580,000	55	%	4,660,000,000	65.00	%	7,986,000,000	75.00	%	8,784,600,000	80.00	%	9,663,060,000	80 %	9,663,060,000	Bidang PKP
				Prosentase penanganan infrastruktur permukiman			0.16	%		0.35	%		25.00	%		47.50	%		65.88	%		65.88 %		
		1.04.03.2.03	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan permasalahan infrastruktur di daerah permukiman			59	Lokasi	6,845,580,000	36	lokasi	4,660,000,000	36	lokasi	7,986,000,000	59	Lokasi	8,784,600,000	59	Lokasi	9,663,060,000	59 Lokasi	9,663,060,000	
				Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)									20	unit		20	unit		20	unit		20 unit		
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah lokasi Kawasan Permukiman yang berhasil			36	lokasi	1,110,000,000	36	lokasi	1,110,000,000	36	lokasi	1,386,000,000	36	lokasi	1,524,600,000	36	lokasi	1,677,060,000	36 lokasi	1,677,060,000	

VI.VI-89

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan											
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran													
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
			Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	ditata secara layak dan nyaman																											
				Jumlah Rumah yang ditingkatkan kualitasnya							20	unit		20	unit		20	unit		20	unit										
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara			23	lokasi	5,735,580,000		23	lokasi	3,550,000,000		23	lokasi	6,600,000,000		23	lokasi	7,260,000,000		23	lokasi	7,986,000,000	23	lokasi	7,986,000,000			
		1.03.07.2.01.02																													
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase penanganan area kawasan kumuh			65.84	%	320,000,000		67.37	%	281,000,000		69.17	%	309,100,000		72.13	%	340,010,000		73.61	%	256,700,000	73.61%	256,700,000		Bidang PKP		
		1.04.03.2.03	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani			3.24	%	320,000,000		3.24	%	281,000,000		3.99	%	309,100,000		6.55	%	340,010,000		3.27	%	256,700,000	3.24%	256,700,000				
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh			1	Dokumen	220,000,000		1	Dokumen	140,500,000		1	Dokumen	154,550,000		1	Dokumen	170,005,000		1	Dokumen	156,700,000	1	Dokumen	156,700,000			
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah peserta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh			50	Orang	100,000,000		50	Orang	140,500,000		50	Orang	154,550,000		50	Orang	170,005,000		50	Orang	100,000,000	50	Orang	100,000,000			
		1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni			0.25	%	2,312,906,625		0.19	%	3,000,000,000		0.10	%	1,100,000,000		0.04	%	3,830,000,000		0.00	%	4,193,000,000	0%	4,193,000,000				
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian dalam kondisi baik			288	unit	2,312,906,625		294	unit	3,000,000,000		288	unit	1,100,000,000		288	unit	1,210,000,000		288	unit	1,331,000,000	288	unit	1,331,000,000		UPT RUSUN AWA	

VI.VI-90

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan								
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran										
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		1.04. 02.2. 05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian yang terhuni			288	unit	2,312,906, 625	294	unit	3,000,000 ,000	288	unit	1,100,000 ,000	288	unit	1,210,0 00,000	288	unit	1,331,000 ,000	288	unit	1,331,0 00,000				
		1.04. 02.2. 01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota														1	Doku men	1,210,0 00,000	1	Doku men	1,331,000 ,000	1	Doku men	1,331,0 00,000	Bidang PKP	
		1.04. 02.2. 01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana														1	Doku men	1,210,0 00,000	1	Doku men	1,331,000 ,000	1	Doku men	1,331,0 00,000	Bidang PKP	
		1.04. 02.2. 02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kot a														100	%	1,210,0 00,000	100	%	1,331,000 ,000	100	%	1,331,0 00,000	Bidang PKP	
		1.04. 02.2. 02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Suk arelawan Tanggap Bencana	Jumlah peserta sosialisasi														250	peser ta	1,210,0 00,000	250	peser ta	1,331,000 ,000	250	peser ta	1,331,0 00,000	Bidang PKP	
		1.04. 02.2. 03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot a														100	%	200,000 ,000	100	%	200,000,0 00	100	%	200,000 ,000	Bidang PKP	
		1.04. 02.2. 03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi														4	unit	200,000 ,000	4	unit	200,000,0 00	4	unit	200,000 ,000	Bidang PKP	

VI.VI-91

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang			Persentase Ketaatan Tata Ruang			26.72	%		28.72	%		25.63	%		25.63	%		25,63	%					
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100.00%	106.00%	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%		100	%	3,762,150,000	Bidang Tata Ruang
				Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang			5	%		7	%		85	%		87	%		89	%		89	%		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR			1	persetujuan substansi		1	persetujuan substansi		1	persetujuan substansi		1	persetujuan substansi		1	persetujuan substansi		1	persetujuan substansi		
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang			1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah peserta sosialisasi			480	orang		150	orang		480	orang		480	orang		480	orang		480	orang		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang sinkron dengan RRTR			5	Dokumen		4	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen		5	Dokumen		
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang			4	dokumen		3	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		4	dokumen		
				Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang			1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		1	Dokumen		
		1.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan	Luas bidang pemanfaatan ruang yang			100000	m2		100000	m2		701,960,000	m2		100000	m2		800,000,000	m2		100000	m2		

VI.VI-93

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan						
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	Daerah																									
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey kepuasan internal			82,04		82,86		80,59		81,4		82,21		82,21	-	Sekretariat							
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik			100	%	100	%	80	%	85,00	%	90,00	%	90	%								
				Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu			100	%	100	%	100	%	100,00	%	100,00	%	100	%								
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			13	dokumen	937,305,000	13	dokumen	937,305,000	13	dokumen	984,130,000	13	dokumen	1,033,300,000	13	dokumen	1,084,920,000	13	dokumen	1,084,920,000		
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi			7	dokumen	502,435,000	7	dokumen	502,435,000	7	dokumen	527,530,000	7	dokumen	553,890,000	7	dokumen	581,550,000	7	dokumen	581,550,000		
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja			4	dokumen	145,700,000	4	dokumen	145,700,000	4	dokumen	152,980,000	4	dokumen	160,620,000	4	dokumen	168,650,000	4	dokumen	168,650,000		
		1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA			1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000	1	dokumen	11,865,000		
		1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA			1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000	1	dokumen	11,865,000		
		1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA			1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000	1	dokumen	11,865,000		

VI.VI-95

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan, (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan					
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		1.03. 01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan			3880	m2	322,531,8 75	3880	m2	322,531,8 75	3880	m2	338,655,0 00	3880	m2	355,585 ,000	3880	m2	373,360,0 00	3880 m2	373,360 ,000		
		1.03. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggara nya administrasi umum perangkat daerah			12	bulan	17657068 75	12	bulan	17657068 75	12	bula n	18539650 00	12	bula n	1946635 000	12	bulan	20439400 00	12 bulan	2,043,9 40,000		
		1.03. 01.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan			32	jenis	322,531,8 75	32	jenis	322,531,8 75	32	jenis	338,655,0 00	32	jenis	355,585 ,000	32	jenis	373,360,0 00	32 jenis	373,360 ,000		
		1.03. 01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor			43	jenis	459,120,0 00	43	jenis	459,120,0 00	43	jenis	482,070,0 00	43	jenis	506,170 ,000	43	jenis	531,470,0 00	43 jenis	531,470 ,000		
		1.03. 01.2. 06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor			30	jenis	108,570,0 00	30	jenis	108,570,0 00	30	jenis	113,990,0 00	30	jenis	119,680 ,000	30	jenis	125,660,0 00	30 jenis	125,660 ,000		
		1.03. 01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman			7348 dan 366	kotak dan dos	213,387,5 00	7348 dan 366	kotak dan dos	213,387,5 00	7348 dan 366	kotak dan dos	224,055,0 00	7348 dan 366	kota k dan dos	235,255 ,000	7348 dan 366	kotak dan dos	247,015,0 00	7348 dan 366 kotak dan dos	247,015 ,000		
		1.03. 01.2. 06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman fasilitasi tamu			6674 dan 331	kotak dan dos	213,387,5 00	6674 dan 331	kotak dan dos	213,387,5 00	6674 dan 331	kota k dan dos	224,055,0 00	6674 dan 331	kota k dan dos	235,255 ,000	6674 dan 331	kotak dan dos	247,015,0 00	6674 dan 331 kotak dan dos	247,015 ,000		
		1.03. 01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			32	kali	448,710,0 00	32	kali	448,710,0 00	32	kali	471,140,0 00	32	kali	494,690 ,000	32	kali	519,420,0 00	32 kali	519,420 ,000		
		1.03. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah			12	bulan	3,524,000, 000	12	bulan	3,524,000 ,000	12	bula n	3,700,190 ,000	12	bula n	3,885,1 80,000	12	bulan	4,079,430 ,000	12 bulan	4,079,4 30,000		
		1.03. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dipelihara dan diproses perizinannya			60	kendar aan	1,256,000, 000	60	kend araan	1,256,000 ,000	60	kend araan	1,318,790 ,000	60	kend araan	1,384,7 10,000	60	kend araan	1,453,940 ,000	60 kend araan	1,453,9 40,000		

VI.VI-96

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, Sub kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penang gung Jawab	Ke ter an gan						
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran								
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
			Operasional atau Lapangan	Jumlah bbm dan pelumas yang di sediakan selama 1 tahun							62.600 , 20.000 , 500 , 100		liter perta max, liter solar non subsi di, liter oli mesi n, liter oli garda n		62.600 , 20.000 , 500 , 100		liter perta max, liter solar non subsi di, liter oli mesi n, liter oli garda n		62.600 , 20.000 , 500 , 100		liter perta max, liter solar non subsi di, liter oli mesi n, liter oli garda n		62.600 , 20.000 , 500 , 100			
		1.03. 01.2. 09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara			16	jenis	2,268,000,000	16	jenis	2,268,000,000	16	jenis	2,381,400,000	16	jenis	2,500,470,000	16	jenis	2,625,490,000	16	jenis	2,625,490,000		
		1.03. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah			12	bulan	533,200,000	12	bulan	533,200,000	12	bulan	559,860,000	2	lokasi	587,850,000	2	lokasi	617,240,000	2	lokasi	617,240,000		
		1.03. 01.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah taman yang dipelihara			2	lokasi	533,200,000	2	lokasi	533,200,000	2	lokasi	559,860,000	2	lokasi	587,850,000	2	lokasi	617,240,000	2	lokasi	617,240,000		
		1.03. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur			20	orang	348,165,000	20	orang	348,165,000	20	orang	562,600,000	20	orang	580,240,000	20	orang	598,762,000	20	orang	598,762,000		
		1.03. 01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/d ikembangkan kapasitasnya			15	orang	348,165,000	15	orang	348,165,000	20	orang	562,600,000	20	orang	580,240,000	20	orang	598,762,000	20	orang	598,762,000		

Tabel 6.3

Pemetaan Program, Kegiatan, dan Pendanaan DPUPRPKP Kota Malang Tahun 2018-2023
 Sesuai Pemutakhiran Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
 Sumber pendanaan dari DAU, BHP/NP dan DBHCHT

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)										4.5					
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	3.65		3.8		3.95		4.1		4.25						
					Persentase Penurunan titik genangan	53,85	%	100	%	100	%	100	%	100	%					
					Persentase Area Kawasan Kumuh	2,00	%	1,20	%	1,15	%	1,05	%	1,00	%					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Program Cipta Karya	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84.86	%	6,690,855,400	85.02	%	11,581,216,000	85.17	%	44,150,000,000	85.32	%	26,530,000,000	85.47	%	27,846,000,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	1000 dan 500	SR dan TS	6,690,855,400	1000 dan 500	SR dan TS	11,581,216,000	1000 dan 500	SR dan TS	44,150,000,000	1200 dan 500	SR dan TS	26,530,000,000	1200 dan 500	SR dan TS	27,846,000,000
		Pembangunan instalasi Air Limbah	Pembangunan instalasi Air Limbah	Pembangunan instalasi Air Limbah	Jumlah sambungan rumah (SR) yang tersambung	700	SR		700	SR		700	SR		700	SR		700	SR	
		Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		Fasilitasi SPAL Skala Kota	Jumlah Lokasi Pembangunan/ Penyediaan SubSistem Pengolahan Setempat	15	lokasi	5,103,188,500	15	lokasi	4,550,000,000	15	lokasi	12,200,000,000	15	lokasi	12,500,000,000	15	lokasi	13,000,000,000

VI.VI-98

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	Jumlah instalasi pengolahan air limbah domestik yang dipelihara	150	SR	621,186,900	320	SR	2,485,200,000	11	lokasi	10,700,000,000	700	SR	10,750,000,000	750	SR	11,250,000,000
			Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	400	SR		400	SR		1000	SR		1000	SR		1000	SR	
			Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Perencanaan Infrastruktur Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan infrastruktur air limbah	5	dokumen		8	dokumen		5	dokumen		5	dokumen		5	dokumen	
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Monitoring dan peningkatan kapasitas, kinerja serta pelaporan pengelola IPAL Komunal	Jumlah peserta pada pelaksanaan monitoring dan peningkatan kinerja pengolahan air limbah domestik	150	orang	200,000,000	150	orang	200,000,000	150	orang	450,000,000	150	orang	220,000,000	150	orang	250,000,000
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Sosialisasi air limbah domestik	Sosialisasi air limbah domestik	Jumlah peserta sosialisasi air limbah domestik	1000	orang	100,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000	1000	orang	200,000,000
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)	Jumlah Modular Sewerage System yang terpelihara	2	Lokasi	353,980,000	2	Lokasi	1,064,792,000	2	Lokasi	900,000,000	2	Lokasi	990,000,000	2	Lokasi	1,089,000,000
			Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Fasilitasi Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah penerimaan dari pelayanan pembuangan lumpur tinja dan air kotor dari tangki ke saluran pembuangan pada IPLT	2750	kali		3000	kali		3500	kali		3500	kali		3750	kali	
		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Fasilitasi operasional layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal	Fasilitasi Operasional Layanan Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Layanan Penyedotan lumpur tinja	250	kali	42,500,000	250	kali	360,230,000	250	kali	400,000,000	250	kali	440,000,000	250	kali	484,000,000

VI.VI-99

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Peningkatan Pelayanan Pembuangan dan Pengolahan Lumpur Tinja	Jumlah rumah tinggal ber Tangki septik yang melakukan pembuangan air limbah domestik ke IPLT	3250	Tangki Septik	270,000,000	3000	Tangki Septik	2,720,994,000	3250	Tangki Septik	19,300,000,000	3250	Tangki Septik	1,430,000,000	3250	Tangki Septik	1,573,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Air Limbah	Program Cipta Karya	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	90.21	%	#####	93.71	%	5,360,000,000	94.01	%	11,100,000,000	94.01	%	11,200,000,000	94.16	%	11,700,000,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	1466	SR	1,758,395,563	1466	SR	5,360,000,000	1466	SR	11,100,000,000	1466	SR	11,200,000,000	1466	SR	11,700,000,000
		Pembangunan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	Perencanaan Infrastruktur Air Minum	Jumlah Dokumen Perencanaan	4	dokumen		5	dokumen		5	dokumen		5	dokumen		5	dokumen	
			Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	Pembangunan, Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang dibangun, dikembangkan dan direhabilitasi	155	SR	1,018,867,563	600	SR	3,960,000,000	700	SR	8,700,000,000	700	SR	8,750,000,000	750	SR	9,250,000,000
		Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Pembinaan rutin Hippam	Pembinaan rutin Hippam	Jumlah peserta pada pelaksanaan pembinaan rutin	200	orang	61,160,000	200	orang	250,000,000	200	orang	400,000,000	200	orang	450,000,000	200	orang	450,000,000
		Operasi dan Pemeliharaan Rutin SPAM di Kawasan Perkotaan	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	Pemeliharaan Rutin Infrastruktur Air Minum	Jumlah sambungan rumah yang dipelihara secara rutin	866	SR	678,368,000	866	SR	1,150,000,000	866	SR	2,000,000,000	866	SR	2,000,000,000	866	SR	2,000,000,000

VI.VI-101

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Perencanaan Infrastruktur gedung/bangunan kantor dan fasilitas Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum	11	dokumen	400,000,000	1	dokumen	50,000,000	11	dokumen	55,125,000	19	dokumen	57,881,250	10	dokumen	60,775,000
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Sosialisasi SLF	Sosialisasi SLF	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi SLF	150	orang	552,340,000	150	orang	860,145,000	150	orang	662,789,925	150	orang	639,402,593	150	Orang	671,372,722
			Kegiatan Pelaksanaan SLF	Kegiatan Pelaksanaan SLF	Jumlah lokasi pelaksanaan SLF di Kota Malang	12	lokasi		12	lokasi		12	lokasi		12	lokasi		7	lokasi	
			Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan Tim Rekomendasi IMB	Jumlah pelaksanaan pengendalian terhadap kesesuaian konstruksi bangunan gedung	6	pelaksanaan		6	pelaksanaan		6	pelaksanaan		6	pelaksanaan		6	pelaksanaan	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Bangunan Gedung	Pendataan Bangunan Gedung	Jumlah Data Bangunan Gedung	4000	data	200,000,000	4000	data	210,000,000	4000	data	166,664,925	4000	data	231,525,000	4000	data	243,101,250
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Program Pembangunan Sistem Informasi/data base gedung/bangunan	Program Cipta Karya	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	22.00	%	#####	56.00	%	1,424,343,000	78.00	%	1,528,252,425	89.00	%	1,604,665,046	100	%	1,684,898,299
			Program Bina Jasa Konstruksi																	
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	60	orang	360,000,000	60	orang	376,343,000	60	orang	396,900,000	60	orang	416,745,000	60	orang	437,582,250

VI.VI-102

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Layanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi	60	orang	360,000,000	60	orang	376,343,000	60	orang	396,900,000	60	orang	416,745,000	60	orang	437,582,250
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	%	376,343,000	100	%	808,000,000	100	%	799,312,500	100	%	839,278,125	100	%	881,242,031
		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penyusunan HSPK Dinas	Penyusunan HSPK Dinas	Jumlah Dokumen HSPK	3	dokumen	200000000	1	dokumen	250,000,000	3	dokumen	220,500,000	3	dokumen	231,525,000	3	dokumen	243,101,250
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	Layanan Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Kota	Jumlah data badan usaha yang terupdate pada sistem informasi	25	data	525,000,000	50	data	558,000,000	50	data	578,812,500	50	data	607,753,125	50	data	638,140,781
			Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Konstruksi	Penyusunan/ Pengembangan Data Base Jasa Konstruksi	Jumlah aplikasi databe jasa konstruksi	1	aplikasi		1	aplikasi		1	aplikasi		1	aplikasi				
			Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	Penyusunan data investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	Jumlah dokumen investasi infrastruktur dan pasar konstruksi	1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen		1	dokumen				
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan	200	badan usaha	301,170,000	200	badan usaha	240,000,000	200	badan usaha	332,039,925	200	badan usaha	348,641,921	200	badan usaha	366,074,017
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi	Pemberdayaan Bina Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta Pelaksanaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	200	peserta	301,170,000	200	peserta	240,000,000	200	peserta	332,039,925	200	peserta	348,641,921	200	peserta	366,074,017
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Cipta Karya	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	1.27	%	#####	5.00	%	7,497,000,000	5.00	%	26,365,000,000	7.00	%	1,433,250,000	9.00	%	1,504,912,500

VI.VI-103

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			di Kota Malang																	
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	200	m2	3,284,269,000	200	m2	7,497,000,000	200	m2	26,365,000,000	200	m2	1,433,250,000	200	m2	1,504,912,500
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penyusunan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan PBL	2	dokumen	650,000,000	5	dokumen	757,000,000	3	dokumen	682,500,000	2	dokumen	716,625,000	2	dokumen	752,456,250
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Prioritas	Luasan kawasan penataan bangunan	4	ha	2,634,269,000	1	ha	6,740,000,000	200	ha	25,682,500,000	200	ha	716,625,000	200	ha	752,456,250
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program pengembangan/ Rehabilitasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Program Bina Marga	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	100	%	100,000,000	100	%	105,000,000	90	%	130,000,000	95	%	115,000,000	100	%	120,000,000
					Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	0	%		23.22	%		24.55	%		47.45	%		71.45	%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	15	Ha	100,000,000	15	Ha	105,000,000	13	Ha	40,000,000	10	Ha	40,000,000	10	Ha	40,000,000

VI.VI-104

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan	2	Lokasi	100,000,000	2	Lokasi	105,000,000	2	Lokasi	40,000,000	2	Lokasi	40,000,000	2	Lokasi	40,000,000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Volume debit air pada bangunan penampung			-			-	630	m3	90,000,000	630	m3	75,000,000	660	m3	80,000,000
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Jumlah dokumen rencana teknis bangunan penampung air lainnya							1	dokumen	35,000,000	1	dokumen	37,500,000	1	dokumen	40,000,000
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			Jumlah lokasi penampung air yang dibangun							10	titik	55,000,000	10	titik	37,500,000	10	titik	40,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Program Perencanaan, Pembangunan /Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan Drainase	Program Bina Marga	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,50	%	#####	83,01	%	23,172,659,000	83,51	%	27,179,737,000	84,01	%	28,730,941,000	84,52	%	26,926,397,541
			Program Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, rehabilitasi Turap/Talud/ Bronjong																	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			Panjang drainase kota dalam kondisi baik	22	km	17,207,384,539	22	km	23,172,659,000	22	km	27,179,737,000	22	km	28,730,941,000	22	km	26,926,397,541

VI.VI-105

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Kabupaten/Kota																		
		Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Perencanaan Infrastruktur Drainase di Kota Malang	Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Drainase di Kota Malang	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	20	Dokumen	450,000,000	20	Dokumen	600,000,000	20	Dokumen	1,365,000,000	20	Dokumen	1,430,000,000	20	Dokumen	1,495,000,000
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Jumlah lokasi genangan air yang ditangani	6	Lokasi	3,865,709,153	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000	6	Lokasi	5,000,000,000
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kota Malang	Rehabilitasi/ Pengembangan Saluran Drainase/ Gorong-gorong di Kota Malang	Panjang Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang di lakukan Pemeliharaan Insidental	9	km	2,628,239,958	10	km	8,072,659,000	9	km	7,675,000,000	9	km	11,150,000,000	9	km	11,725,000,000
			Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong di Kota Malang	Jumlah Titik Rehabilitasi/ Pengembangan Turap/Talud/ Bronjong	3	titik		3	titik		3	titik		3	titik				
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Pemeliharaan Rutin Drainase	Pemeliharaan Rutin Drainase	Panjang drainase kota yang ditingkatkan fungsinya	5.5	km	10,263,435,427	7	km	9,500,000,000	5.5	km	13,139,737,000	5.5	km	11,150,941,000	5.5	km	8,706,397,541
			Pemeliharaan Insidental Drainase	Pemeliharaan Insidental Drainase	Jumlah titik Pemeliharaan Insidental	3	titik		3	titik		3	titik		3	titik				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program Perencanaan, Pembangunan /Pengembangan, Rehabilitasi	Program Bina Marga	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	89,13	%	#####	91,18	%	217,775,218,000	92,41	%	102,685,250,000	94.46	%	144,966,000,000	96.91	%	160,617,600,000

VI.VI-107

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target											
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi/ Pengembangan jalan di Kota Malang	Pembangunan/R ehabilitasi/Penge mbangan Jalan di Kota Malang	Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan	30	km	25	km	30	km	25	km	30	km	53,750,000, 000	
				Rehabilitasi/Pen gembangan Pedestrian di Kota Malang	panjang pedestrian yang direhabilitasi dan dikembangkan	2	lokas i	28,025,660 ,257	2	lokas i	51,829,623,00 0	2	lokasi	28,125,000,0 00	2		lokas i
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Insidentil Jalan	Pembangunan / Rehabilitasi jalan Paving Kota Malang	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan	38	km	48	km	48	km	48	km	48	km	64,979,714, 599	
				Pemeliharaan Insidentil Jalan	Pemeliharaan Insidentil Jalan	15,104,036 ,232	47,459,624,00 0	38,495,631,9 00	59,945,195,0 90								
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah titik penerangan jalan jalan yang terpelihara	1800	titik	19200	titik	1800	titik	27600	titik	31800		titik
		Pembangunan Jembatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan	Pemeliharaan Penerangan Jalan	Jumlah jembatan yang dibangun	1	lokas i	1,760,570, 000	3	lokas i	74,500,000,00 0	3	lokasi	7,000,000,00 0	3	lokas i	11,500,000, 000
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rehabilitasi/ Pengembang an jembatan di Kota Malang	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pen gembangan Jembatan di Kota Malang	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin jembatan	15	lokas i	3,042,960, 000	15	lokas i	6,000,000,000	15	lokasi	3,675,000,00 0	15	lokas i	4,025,000,0 00
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah lokasi Pemeliharaan Insidentil jembatan	10	lokas i	10	lokas i	10	lokasi	10	lokasi	10	lokas i	
		Pembangunan Jalan	Pemeliharaan Insidentil jembatan	Pemeliharaan Insidentil jembatan	jumlah jalan yang terbangun/terehabilitasi	2	lokas i	2,227,500, 000	2	lokas i	26,103,971,00 0	2	lokasi	18,664,368,1 00	2	lokas i	22,222,385, 401
				Rehabilitasi/ Pengembang an Pedestrian di Kota Malang	Pembangunan Pedestrian di Kota Malang	Jumlah titik penerangan jalan kota malang yang terbangun/terehabilitasi	2500	titik	4200	titik	2500	titik	4200	titik	20,365,804,9 10		

VI.VI-108

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			Pembangunan Penerangan Jalan Kota Malang	Pembangunan Penerangan Jalan	jumlah lokasi pedestrian yang terbangun/terehabilitasi	2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi		2	lokasi	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Peningkatan Pelayanan persewaan alat berat	Peningkatan Pelayanan Persewaan Alat Berat	Jumlah Pelayanan Laboratorium Pengujian Konstruksi	80	kali	682,000,000	80	kali	682,000,000	80	kali	3,750,000,000	80	kali	500,000,000	80	kali	500,000,000
			Peningkatan Pelayanan laboratorium uji mutu bahan	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Uji Mutu Bahan																
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	50	%	200,000,000	55	%	3,459,000,000	55.00	%	3,804,900,000	63.76	%	4,185,390,000	80.00	%	4,603,929,000
						7	PSU	200,000,000	7	PSU	3,459,000,000	70	PSU	3,804,900,000	70	PSU	4,185,390,000	70	PSU	4,603,929,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Fasilitasi Penyerahan PSU	Pengelolaan Perumahan dan PSU	Jumlah Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) yang di serah terimakan	7	PSU	200,000,000	7	PSU	3,459,000,000	70	PSU	3,804,900,000	70	PSU	4,185,390,000	70	PSU	4,603,929,000

VI.VI-110

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target																		
						2019		2020		2021		2022		2023										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14		15		16		17
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin Prasarana dan Sarana Utilitas	Pemeliharaan Rutin Kawasan Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang dipelihara	23	lokasi	5,735,580,000	23	lokasi	3,550,000,000	23	lokasi	6,600,000,000	23	lokasi	7,260,000,000	23	lokasi	7,986,000,000				
			Pemeliharaan Insidental Prasarana dan Sarana Utilitas	Pemeliharaan Insidental Kawasan Permukiman																				
		Program Kawasan Permukiman	Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman	Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan area kawasan kumuh	65.84	%	320,000,000	67.37	%	281,000,000	69.17	%	309,100,000	72.13	%	340,010,000	73.61	%	256,700,000				
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha			Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	3.24	%	320,000,000	3.24	%	281,000,000	3.99	%	309,100,000	6.55	%	340,010,000	3.27	%	256,700,000				
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan		Jumlah dokumen perencanaan peremajaan/ pemugaran permukiman dan kawasan kumuh	1	Dokumen	220,000,000	1	Dokumen	140,500,000	1	Dokumen	154,550,000	1	Dokumen	170,005,000	1	Dokumen	156,700,000				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Fasilitas Kegiatan Malang Kota Tanpa Kumuh	Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah peserta pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh	50	Orang	100,000,000	50	Orang	140,500,000	50	Orang	154,550,000	50	Orang	170,005,000	50	Orang	100,000,000				
		Program Pengembangan Perumahan	Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0.25	%	#####	0,19	%	3,000,000,000	0,10	%	1,100,000,000	0,04	%	3,830,000,000	0,00	%	4,193,000,000				

VI.VI-111

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Jumlah unit hunian dalam kondisi baik	288	unit	2,312,906,625	294	unit	3,000,000,000	288	unit	1,100,000,000	288	unit	1,210,000,000	288	unit	1,331,000,000
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Rusunawa	Pengelolaan RUSUNAWA	Jumlah unit hunian yang ter huni	288	unit	2,312,906,625	294	unit	3,000,000,000	288	unit	1,100,000,000	288	unit	1,210,000,000	288	unit	1,331,000,000
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota			-			-			1	Dokumen	1,210,000,000	1	Dokumen	1,331,000,000	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen kajian Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana									1	Dokumen	1,210,000,000	1	Dokumen	1,331,000,000	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Persentase Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			-			-			100	%	1,210,000,000	100	%	1,331,000,000	
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana			Jumlah peserta sosialisasi									250	peserta	1,210,000,000	250	peserta	1,331,000,000	

VI.VI-112

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target															
						2019		2020		2021		2022		2023							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota								100	%	200,000,000	100	%	200,000,000			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi								4	unit	200,000,000	4	unit	200,000,000			
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dan penataan ruang terhadap rencana tata ruang			Persentase Ketaatan Tata Ruang	26.72	%	28.72	%		25.63	%	25.63	%		25.63	%				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100	%				100	%			100	%					
			Program Perencanaan Ruang		Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	5	%	719,340,000		2,110,000,000			85	%	3,527,200,000	87	%	3,662,150,000	3,762,150,000		
			Pemanfaatan Tata Ruang																		
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			Pelaksanaan persetujuan teknis substansi teknis RTR	1	persetujuan substansi	263,460,000		1	persetujuan substansi	390,000,000	1	persetujuan substansi	550,000,000	1	persetujuan substansi	550,000,000	1	persetujuan substansi	550,000,000
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang	1	dokumen	200,000,000		1	dokumen	320,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	400,000,000	1	dokumen	400,000,000

VI.VI-113

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Kabupaten/Kota																		
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Sosialisasi Rencana Tata Ruang	Jumlah peserta sosialisasi	480	orang	63,460,000	150	orang	70,000,000	480	orang	150,000,000	480	orang	150,000,000	480	orang	150,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen yang sinkron dengan RRTR	5	Dokumen	120,690,000	4	Dokumen	310,000,000	5	Dokumen	500,000,000	5	Dokumen	500,000,000	5	Dokumen	500,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	Penelitian dan Kajian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen penelitian dan kajian Kawasan Strategis Kota Malang	4	dokumen	120,690,000	3	dokumen	310,000,000	4	dokumen	500,000,000	4	dokumen	500,000,000	4	dokumen	500,000,000
			Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang	Jumlah Dokumen Penyusunan / Reviu Peta Kota Malang	1	Dokumen	1		Dokumen	1		Dokumen	1		Dokumen					
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Luas bidang pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	100000	m2	192,840,000	100000	m2	701,960,000	100000	m2	665,050,000	100000	m2	800,000,000	100000	m2	900,000,000
		Sistem Informasi Penataan Ruang	Peningkatan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersinkronisasi dalam peta	200	Dokumen	96,420,000	200	Dokumen	54,450,000	200	Dokumen	100,000,000	200	Dokumen	100,000,000	200	Dokumen	100,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan		Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1	Dokumen	96,420,000	1	Dokumen	647,510,000	1	Dokumen	565,050,000	1	Dokumen	700,000,000	1	Dokumen	800,000,000

VI.VI-114

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Pembangunan Daerah		Peningkatan Pelayanan Penerbitan Keterangan Rencana Kota																
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	6	lokasi	142,350,000	6	lokasi	708,040,000	4	lokasi	1,812,150,000	6	lokasi	1,812,150,000	6	lokasi	1,812,150,000
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang/ Bangunan	Identifikasi Pelanggaran Tata Ruang / Bangunan	Jumlah Lokasi Identifikasi pelanggaran Tata Ruang / Bangunan yang tertangani	6	lokasi	142,350,000	6	lokasi	708,040,000	4	lokasi	1,812,150,000	6	lokasi	1,812,150,000	6	lokasi	1,812,150,000
			Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengendalian Tata Ruang	Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengendalian Tata Ruang																
		Program pengelolaan tanah Kosong	Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Program Penataan Ruang dan Pertanahan	Presentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	0.00	%	#####	0.00	%	150,000,000	3.51	%	300,000,000	7.02	%	300,000,000	10.53	%	300,000,000
		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			Jumlah kelurahan terinventarisasi Tanah Kosong	2	kelurahan	6,100,000,000	2	Kelurahan	150,000,000	2	Kelurahan	300,000,000	2	Kelurahan	300,000,000	2	Kelurahan	300,000,000
		Pelaksanaan Inventarisasi tanah kosong	Pengadaan Lahan Makam	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah	Jumlah dokumen inventarisasi pemanfaatan tanah kosong	1	dokumen	6,100,000,000	1	dokumen	150,000,000	1	dokumen	300,000,000	1	dokumen	300,000,000	1	dokumen	300,000,000
			FGD Pertanahan	Preyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan																
	Meningkatkan kinerja pelayanan				Nilai SAKIP	81.85	#####	82.67	11,936,279,000	83.5	12,730,010,000	84.33	13,355,900,000	85.17	14,013,092,000					

VI.VI-115

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	Perangkat Daerah																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai survey kepuasan internal	82,04		82,86		80,59		81,4		82,21						
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	%	100	%	80	%	85,00	%	90,00	%					
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100	%	100	%	100	%	100,00	%	100,00	%					
			Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	13	dokumen	937,305,000	13	dokumen	937,305,000	13	dokumen	984,130,000	13	dokumen	1,033,300,000	13	dokumen	1,084,920,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal (SPI)	Jumlah dokumen evaluasi	7	dokumen	502,435,000	7	dokumen	502,435,000	7	dokumen	527,530,000	7	dokumen	553,890,000	7	dokumen	581,550,000

VI.VI-116

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat																
			Penyusunan Profil SKPD	Penyusunan Profil Perangkat Daerah																
				Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi																
			Penyusunan/ Reviu Standar Pelayanan	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan																
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4	dokumen	145,700,000	4	dokumen	145,700,000	4	dokumen	152,980,000	4	dokumen	160,620,000	4	dokumen	168,650,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	Jumlah dokumen RKA	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah dokumen perubahan RKA	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah dokumen DPA	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,250,000	1	dokumen	10,762,500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11,865,000

VI.VI-117

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah dokumen perubahan DPA	1	dokumen	10250000	1	dokumen	10250000	1	dokumen	10762500	1	dokumen	11300000	1	dokumen	11865000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Renja/RKT dan Renstra;	2	dokumen	248,170,000	2	dokumen	248,170,000	2	dokumen	260,570,000	2	dokumen	273590000	2	dokumen	287,260,000
					Jumlah peserta sosialisasi	200	orang		200	orang		200	orang		200	orang				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen laporan keuangan dan capaian kinerja yang disusun tepat waktu	6	dokumen	601,426,000	6	dokumen	601,426,000	6	dokumen	631,490,000	6	dokumen	663050000	6	dokumen	696,200,000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah ASN	135	orang	206715500	135	orang	206715500	135	orang	217,050,000	135	orang	355800000	135	orang	239,295,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan	2	dokumen	206,715,500	2	dokumen	206,715,500	2	dokumen	217,050,000	2	dokumen	100000000	2	dokumen	239,295,000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah verifikasi keuangan	2500	berkas	187,995,000	2500	berkas	187,995,000	2500	berkas	197,390,000	2500	berkas	207,250,000	2500	berkas	217,610,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah bulan pelayanan urusan pemerintahan	2	lokasi	4226476125			4226476125			4437775000	12	bulan	4659645000	12	bulan	4892600000
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	10000	surat	486,275,000	10000	surat	486,275,000	10000	surat	510,580,000	10000	surat	536,100,000	10000	surat	562,900,000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan belanja telpon, air dan listrik	48	tagihan	1,627,500,000	48	tagihan	1,627,500,000	48	tagihan	1,708,870,000	48	tagihan	1,794,310,000	48	tagihan	1,884,020,000

VI.VI-118

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20	jenis	1,790,169, 250	20	jenis	1,790,169,250	20	jenis	1,879,670,00 0	20	jenis	1,973,650,00 0	20	jenis	2,072,320,0 00
			Peringatan/Ke giatan Insidentil	Peringatan/Kegia tan Insidentil																
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	3880	m2	322,531,87 5	3880	m2	322,531,875	3880	m2	338,655,000	3880	m2	355,585,000	3880	m2	373,360,00 0
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah bulan terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	12	bula n	176570687 5	12	bula n	1765706875	12	bulan	1853965000	12	bula n	1946635000	12	bula n	204394000 0
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah peralatan kebersihan	32	jenis	322,531,87 5	32	jenis	322,531,875	32	jenis	338,655,000	32	jenis	355,585,000	32	jenis	373,360,00 0
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	43	jenis	459,120,00 0	43	jenis	459,120,000	43	jenis	482,070,000	43	jenis	506,170,000	43	jenis	531,470,00 0
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30	jenis	108,570,00 0	30	jenis	108,570,000	30	jenis	113,990,000	30	jenis	119,680,000	30	jenis	125,660,00 0
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah makanan dan minuman	7348 dan 366	kota k dan dos	213,387,50 0	7348 dan 366	kota k dan dos	213,387,500	7348 dan 366	kotak dan dos	224,055,000	7348 dan 366	kota k dan dos	235,255,000	7348 dan 366	kota k dan dos	247,015,00 0
		Fasilitas Kunjungan Tamud	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman fasilitas tamud	6674 dan 331	kota k dan dos	213,387,50 0	6674 dan 331	kota k dan dos	213,387,500	6674 dan 331	kotak dan dos	224,055,000	6674 dan 331	kota k dan dos	235,255,000	6674 dan 331	kota k dan dos	247,015,00 0
		Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	32	kali	448,710,00 0	32	kali	448,710,000	32	kali	471,140,000	32	kali	494,690,000	32	kali	519,420,00 0

VI.VI-119

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	12	bulan	3,524,000,000	12	bulan	3,524,000,000	12	bulan	3,700,190,000	12	bulan	3,885,180,000	12	bulan	4,079,430,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan diproses perizinannya	60	kendaraan	1,256,000,000	60	kendaraan	1,256,000,000	60	kendaraan	1,318,790,000	60	kendaraan	1,384,710,000	60	kendaraan	1,453,940,000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																
			Pengadaan bbm dan pelumas	Pengadaan bbm dan pelumas	Jumlah bbm dan pelumas yang di sediakan selama 1 tahun							62.600,20.000,500,100	liter pertamax, liter solar non subsidi, liter oli mesin, liter oli gardan	62.600,20.000,500,100				62.600,20.000,500,100	liter pertamax, liter solar non subsidi, liter oli mesin, liter oli gardan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	16	jenis	2,268,000,000	16	jenis	2,268,000,000	16	jenis	2,381,400,000	16	jenis	2,500,470,000	16	jenis	2,625,490,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah bulan terpeliharanya barang milik daerah	12	bulan	533,200,000	12	bulan	533,200,000	12	bulan	559,860,000	2	lokasi	587,850,000	2	lokasi	617,240,000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Pemeliharaan Taman Perkantoran	Jumlah taman yang dipelihara	2	lokasi	533,200,000	2	lokasi	533,200,000	2	lokasi	559,860,000	2	lokasi	587,850,000	2	lokasi	617,240,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	20	orang	348,165,000	20	orang	348,165,000	20	orang	562,600,000	20	orang	580,240,000	20	orang	598,762,000

VI.VI-120

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Program/ Kegiatan (2019)	Program/ Kegiatan (2020- 2023)	Indikator	Target														
						2019		2020		2021		2022		2023						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Keterampilan dan Kemampuan Teknis Aparatur	Peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	15	orang	348,165,000	15	orang	348,165,000	20	orang	562,600,000	20	orang	580,240,000	20	orang	598,762,000

Adapun program dan kegiatan indikatif Tahun 2018-2023 dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

A. Tahun 2019

Program dan kegiatan DPUPRPKP pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan pedestrian
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)
- II. Program pengembangan/ Rehabilitasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
- III. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)
- IV. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang
 1. Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)

B. Tahun 2020-2023

Program dan kegiatan pada tahun 2020 telah ditetapkan sebagai berikut:

- I. Program Bina Marga
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)
 2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
- II. Program Cipta Karya
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK)
 2. Pembangunan SPAM BJP atau Peningkatan SPAM BJP Tidak Terlindungi menjadi BJP Terlindungi dengan Modul Sumur Dangkal (DAK)
- III. Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 1. Peningkatan Kualitas Perumahan
 2. Penunjang DAK Peningkatan Kualitas Perumahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 5 Oktober 2020, maka DPUPRPKPPKP telah melakukan pemutakhiran nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan DAK pada tahun 2021-2023 sebagai berikut :

- I. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- II. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

III. Program Pengembangan Permukiman

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.4

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Malang Tahun 2018 – 2023
Sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan	
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran					
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			URUSAN WAJIB																				
			PEKERJAA N UMUM DAN PENATAAN RUANG - PERUMAHA N DAN KAWASAN PEMUKIMA N					34.380 .620.5 00		37.843 .150.0 00		38.38 2.500 .000		34.38 2.500. 000		30.136.2 50.000							
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)		3,75									4,5								
	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman		N/A	3,65	34.380 .620.5 00	3,8		3,95		4,1		4,25								
			Program Bina Marga																				
				Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik					91,18%	30.000.000.000	92,41%	25.000.000.000	94,46%	21.000.000.000	96,91%	18.000.000.000							
		1 03 1.0 0 0 3 7 9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)	Jumlah panjang jalan yang dibangun/ direhabilitasi					10,364 KM	30.000.000.000	8,630 KM	25.000.000.000	7,240 KM	21.000.000.000	6,200 KM	18.000.000.000							

VI.VI-124

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi	Sumber Dana	Keterangan
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggaran				
					2017	2018	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik					100,0%	319.263,15	100,00%	845.000,00	100,00%	980.000,00	100,00%	1.094.000,00						
		1 03 1.0 1 0 3 1 0 2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	Jumlah Lokasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya					20.29 Ha	319.263,15	61.71 Ha	845.000,00	55.27 Ha	980.000	47.41 Ha	1.094.000						
		1 03 1.0 3	Program Perencanaan, Pembangunan/ Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan pedestrian	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	85,04%	87,72%	10.364 KM	22.741.804.000														
		1 03 1.0 0 0 3 7 9	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Berkala Jalan di Kota Malang (DAK)	Jumlah panjang jalan yang dibangun/ direhabilitasi		6 lokasi	10.364 KM	22.741.804.000														
		1 03 1.0 3	Program pengembangan/ Rehabilitasi dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	50,00%	96,81%	416.9 meter	950.123.000														
		1 03 1.0 0 2 3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)	Luasan/ Panjang rehabilitasi saluran Irigasi			416.9 meter	950.123.000														
			Program Cipta Karya							7.620.000.000		7.620.000.000		7.620.000.000		7.620.000.000						

Tabel 6.5

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPUPRPKP Kota Malang Tahun 2018 – 2023
 Sesuai Pemutakhiran Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
 Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Program / Kegiatan 2019	Program/ Kegiatan 2020-2023	Indikator Perubahan renstra	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penan g gung Jawab	Lok asi	Sum ber Dana	Keter anga n							
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggara n											
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	3.65		3.8		3.95		4.1		4.25		4.25												
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Program Cipta Karya	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84.86	%	5,883,348,000	85.02	%	6,000,000,000	85.17	%	6,000,000,000	85.32	%	6,000,000,000	85.47	%	6,000,000,000	85.47	%	6,000,000,000	Bidang Cipta karya				
		1.3.5.2.0 1.12	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			Jumlah Saluran Rumah (SR) yang direhabilitasi/dikembangkan	850	SR	5,883,348,000	1000	SR	6,000,000,000	1000	SR	6,000,000,000	1000	SR	6,000,000,000	1000	SR	6,000,000,000	1000	SR	6,000,000,000					
		1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan/Rchabilitasi instalasi Air Minum	Program Cipta Karya	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	90.21	%	3,555,140,000	93.71	%	1,620,000,000	94.01	%	1,620,000,000	94.01	%	1,620,000,000	94.16	%	1,620,000,000	94.16	%	1,620,000,000	Bidang Cipta karya				
		1.3.3.2.0 1.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan Pengembangan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Minum	Pembangunan, Pengembangan/Rehabilitasi instalasi Pengolahan Air Minum	Jumlah SR yang dibangun/dikembangkan dan direhabilitasi	155	SR	3,555,140,000	600	SR	1,620,000,000	700	SR	1,620,000,000	700	SR	1,620,000,000	750	SR	1,620,000,000	750	SR	1,620,000,000					
		1.03.07	Program Pengembangan Permukiman		Program Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	50	%	1,015,000,000	55	%	23,150,000	65.00	%	5,512,500,000	75.00	%	5,512,500,000	80.00	%	4,266,250,000	80	%	4,266,250,000	Bidang PKP				
		1.04.03.2 .03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kualitas Perumahan	Penataan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah yang ditingkatkan kualitasnya	58	unit	1,015,000,000	126	unit	23,150,000	300	unit	5,512,500,000	300	unit	5,512,500,000	230	unit	4,266,250,000	230	unit	4,266,250,000					
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Program Perencanaan, Pembangunan/ Pengembangan, Rehabilitasi / pemeliharaan	Program Bina Marga	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	89,13	%	22,741,804,000	91,18	%	30,000,000,000	92,41	%	25,000,000,000	94,46	%	21,000,000,000	96,91	%	18,000,000,000	96,91	%	18,000,000,000	Bidang Bina Marga				

VI.VI-128

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Program / Kegiatan 2019	Program/ Kegiatan 2020-2023	Indikator Perubahan renstra	Target										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penan gung Jawab	Lok asi	Sum ber Dana	Keter anga n					
							2019		2020		2021		2022		2023		Target	Anggara n									
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
				jalan dan pedestria n																							
		1.03.10.2 .01.09	Rehabilitasi Jalan	Rehabilit asi/ Pengemb angan jalan di Kota Malang	Pembangun an/Rehabilit asi/Pengem bangan Jalan di Kota Malang	Panjang Jalan yang direhabilitasi dan dikembangkan	10. 364	km	22,741,80 4,000	10.364	km	30,000,00 0,000	8.63	km	25,000 ,000,0 00	7.24	km	21,00 0,000 ,000	6.2	km	18,000,0 00,000	6.2 km	18,000, 000,000				

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, maka sesuai dengan

- Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
- Tujuan 2 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan
- Sasaran : 1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu
2. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

VI.VII-2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75					4,5	4,5
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	N/A	3,65	3,80	3,95	4,10	4,25	4,25
3	Persentase Area Kawasan Kumuh	2.64%	2.00%	1.20%	1.15%	1.05%	1.00%	1.00%
4	Persentase Penurunan titik genangan	16,00%	53.85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	24.72%	26.72%	28.72%	25.63%	25.63%	25.63%	25.63%
6	Nilai SAKIP	81.04	81.85	82.67	83.50	84.33	85.17	85.17

Tabel 7.2

Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Formula Perhitungan	Definisi
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Survei IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) diukur sebagai cerminan keberhasilan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Kota Malang (skala indeks 0-5).
2	Persentase Penurunan titik genangan	Jumlah titik genangan tahun n-1 dikurangkan jumlah titik genangan tahun n dibagi jumlah titik genangan tahun n-1 dikali 100%	Pada tahun 2018 ditetapkan 26 lokasi titik genangan dan di tahun 2020 ditetapkan tambahan 10 lokasi titik genangan. Setiap tahun seluruh lokasi genangan harus dilakukan penanganan melalui pembangunan maupun rehabilitasi drainase kota.
3	Persentase Area Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Kota Malang dikali seratus persen	Luas Kawasan Kumuh yaitu area lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota yang masih belum tertangani.
4	Persentase Ketaatan Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang sudah memiliki keterangan rencana kota dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah peta yang di lengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu persil. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Malang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 Februari 2020, maka proses pengajuan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dialihkan ke Disnaker PMPTSP.
5	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Penilaian oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2020, terdapat program yang belum ada indikatornya sehingga diajukan usulan indikator kinerja program baru.

Adapun rekapitulasi indikator kinerja program DPUPRPKP Kota Malang yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

VI.VII-4

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	87,72%	89,13%	91,18%	92,41%	94,46%	96,91%	96,91%
2	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	93,73%	94,90%	96,09%	92,06%	93,65%	95,24%	95,24%
3	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	N/A	88,32%	89,93%	91,53%	93,14%	94,74%	94,74%
4	Persentase fasilitas penerangan jalan	56,10%	56,31%	67,23%	78,15%	89,08%	100,00%	100,00%
5	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%	82,50%	83,01%	83,51%	84,01%	84,52%	84,52%
6	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	60,00%	100,00%	100,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	N/A	0,00%	23,22%	24,55%	47,45%	71,45%	71,45%
8	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,41%	84,86%	85,02%	85,17%	85,32%	85,47%	85,47%
9	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	93,12%	90,21%	93,71%	94,01%	94,01%	94,16%	94,16%
10	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	81,87%	84,70%	84,80%	89,87%	94,93%	100,00%	100,00%
11	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	20,49%	35,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

VI.VII-6

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
25	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	33,33%	44,40%	-	-	-	-	-
26	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/ kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	N/A	36,20%	-	-	-	-	-
27	Persentase jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	N/A	100,00%	-	-	-	-	-
28	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Prioritas di Kota Malang	N/A	1,27%					
29	Persentase dokumen perencanaan dan sistem informasi tata ruang	N/A	80,00%					
30	Persentase penurunan titik genangan air	N/A	28,00%					
31	Persentase pelayanan keterangan rencana kota sesuai SOP	N/A	80,00%					

VI.VII-7

Tabel 7.4

Formula, Definisi dan Baseline Data

Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Lama	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Mengukur tingkat kemantapan jalan yaitu panjang jalan kewenangan kota yang mantap dibagi panjang jaringan jalan di Kota Malang dikali seratus persen	Jaringan jalan kewenangan kota sesuai SK Walikota Nomor 188.45/414/35.73.112/2017 Tentang Penetapan Jalan Kota Jalan yang mantap meliputi jalan dalam kondisi baik dan sedang.	Panjang jaringan jalan di Kota Malang = 1.221.292 meter
	Lama	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Mengukur tingkat kemantapan jembatan yaitu jumlah jembatan dalam kondisi mantap dibagi jumlah jembatan di Kota Malang dikali seratus persen	Jembatan yang mantap meliputi jembatan dalam kondisi baik dan sedang.	Jumlah jembatan di Kota Malang = 315 unit
	Lama	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Panjang jalan utama yang memiliki jalur pejalan kaki (pedestrian) dalam kondisi baik dibagi panjang jalan utama di Kota Malang yang memerlukan jalur pejalan kaki (pedestrian) dikali seratus persen	Pedestrian dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Panjang jalan utama yang memerlukan jalur pejalan kaki (pedestrian) = 608.885,90 meter
	Lama	Persentase fasilitas penerangan jalan	Jumlah fasilitas penerangan jalan dalam kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan fasilitas penerangan jalan di Kota Malang dikali seratus persen	Fasilitas penerangan jalan dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Jumlah kebutuhan total fasilitas penerangan jalan di Kota Malang = 36.450 titik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Lama	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	Panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi panjang total drainase di Kota Malang dikali seratus persen	Drainase kota dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Panjang drainase kota di Kota Malang = 1.785.694,20 meter
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Lama	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara dibagi luas daerah irigasi kewenangan kota dikali seratus persen	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang irigasi kota di Kota Malang = 15.073 meter Luas irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi = 278 Ha

VI.VII-8

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
	Baru	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Jumlah debit sumur resapan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan debit sumur resapan di Kota Malang dikali seratus persen	Bangunan penampung merupakan bangunan yang dibuat untuk menampung agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah guna menjaga tinggi muka air tanah yang berdampak bisa mengendalikan banjir.	Jumlah kebutuhan debit sumur resapan = 8.642,86 meter kubik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Lama	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah di Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi layak yang telah dilakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT.	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Lama	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali seratus persen	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit

VI.VII-9

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Lama	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Jumlah gedung milik daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah total gedung milik daerah kewenangan dinas dikali seratus persen	Kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas = 354 unit
	Lama	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi dibagi jumlah pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dikali seratus persen	Sertifikat laik fungsi yaitu sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan	Jumlah pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung setiap tahun.
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Baru	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat pelatihan yaitu sertifikat yang menyatakan kompetensi dalam bidang konstruksi tertentu yang diadakan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Malang sd tahun 2023 = 272 orang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Lama	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	Jumlah luas pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Kawasan prioritas yaitu kawasan yang diutamakan pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan fungsi strategis dan aspek lainnya.	Luas Kota Malang = 110.060.000 meter persegi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Lama	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran tata ruang di Kota Malang melalui pengaduan maupun monitoring dikali seratus persen	Pelanggaran tata ruang yaitu pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.	Jumlah pengaduan pelanggaran tata ruang setiap tahun.

VI.VII-10

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
	Lama	Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	Jumlah pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang dibagi jumlah pengajuan keterangan rencana kota di Kota Malang dikali seratus persen	SIPR yaitu Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pemanfaatan SIPR setiap tahun.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Lama	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah tinggal layak huni dibagi jumlah rumah tinggal di Kota Malang dikali seratus persen	Rumah tinggal layak huni yaitu apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
	Baru	Prosentase penanganan infrastruktur permukiman	Luas area permukiman yang ditata dengan baik dibagi Luas area permukiman di Kota Malang dikali seratus persen	Area permukiman yang ditata yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghunianya	Luas area permukiman di Kota Malang = 44.056.900 meter persegi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Lama	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal di Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Rumah tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Baru	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Luas area kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota Malang dikali seratus persen	Luas area kawasan kumuh yang tertangani yaitu area lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota, yang telah dilakukan penanganan.	Luas Kawasan Kumuh (Berdasarkan SK Walikota)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Lama	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dibagi jumlah perumahan di Kota Malang dikali seratus persen	Lingkungan yang sehat dan aman yaitu kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, aman dan terjangkau. Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yaitu unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni	Jumlah perumahan di Kota Malang = 356 unit. Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit.

VI.VII-11

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Baru	Presentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Jumlah kelurahan yang sudah terinventarisasi tanah kosong dalam data base dibagi jumlah kelurahan di Kota Malang dikali seratus persen	Tanah kosong yaitu a. tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai ;b. tanah Hak Pengelolaan; danc. tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hakatas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuanpemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998)	Jumlah kelurahan di Kota Malang = 57 kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lama	Nilai survey kepuasan internal	Rata-rata nilai IKM semester 1 dan 2 di tahun n	IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik	
	Lama	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana Dinas dalam kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Dinas dikali seratus persen	Sarana dan prasarana operasional dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	
	Lama	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan dikali seratus persen	Dokumen perencanaan kinerja, laporan keuangan dan pelaporan kinerja sesuai juknis.	

BAB VIII
PENUTUP

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra DPUPRPKP yang penyusunannya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2018 – 2023 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Perubahan Renstra DPUPRPKP menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Selanjutnya disamping sebagai pedoman, Perubahan Renstra ini merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan pada DPUPRPKP.

Perubahan Renstra DPUPRPKP ini juga diharapkan menjadi sebuah produk perencanaan yang akan memberikan arah untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman lima tahun mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Malang, 2021

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, maka sesuai dengan

- Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
- Tujuan 2 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan
- Sasaran : 1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kota secara terpadu
2. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

VI.VII-2

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75					4,5	4,5
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	N/A	3,65	3,80	3,95	4,10	4,25	4,25
3	Persentase Area Kawasan Kumuh	2.64%	2.00%	1.20%	1.15%	1.05%	1.00%	1.00%
4	Persentase Penurunan titik genangan	16,00%	53.85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase Ketaatan terhadap Tata Ruang	24.72%	26.72%	28.72%	25.63%	25.63%	25.63%	25.63%
6	Nilai SAKIP	81.04	81.85	82.67	83.50	84.33	85.17	85.17

Tabel 7.2

Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Formula Perhitungan	Definisi
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai Survei IKLI Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) diukur sebagai cerminan keberhasilan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat Kota Malang (skala indeks 0-5).
2	Persentase Penurunan titik genangan	Jumlah titik genangan tahun n-1 dikurangkan jumlah titik genangan tahun n dibagi jumlah titik genangan tahun n-1 dikali 100%	Pada tahun 2018 ditetapkan 26 lokasi titik genangan dan di tahun 2020 ditetapkan tambahan 10 lokasi titik genangan. Setiap tahun seluruh lokasi genangan harus dilakukan penanganan melalui pembangunan maupun rehabilitasi drainase kota.
3	Persentase Area Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh dibagi Luas Kota Malang dikali seratus persen	Luas Kawasan Kumuh yaitu area lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota yang masih belum tertangani.
4	Persentase Ketaatan Tata Ruang	Jumlah luas lahan yang sudah memiliki keterangan rencana kota dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	Keterangan Rencana Kota (KRK) adalah peta yang di lengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu persil. Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Malang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 17 Februari 2020, maka proses pengajuan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) dialihkan ke Disnaker PMPTSP.
5	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Penilaian oleh Inspektorat atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tanggal 5 Oktober 2020, terdapat program yang belum ada indikatornya sehingga diajukan usulan indikator kinerja program baru.

Adapun rekapitulasi indikator kinerja program DPUPRPKP Kota Malang yang mengacu tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD 2018 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

VI.VII-4

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	87,72%	89,13%	91,18%	92,41%	94,46%	96,91%	96,91%
2	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	93,73%	94,90%	96,09%	92,06%	93,65%	95,24%	95,24%
3	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	N/A	88,32%	89,93%	91,53%	93,14%	94,74%	94,74%
4	Persentase fasilitas penerangan jalan	56,10%	56,31%	67,23%	78,15%	89,08%	100,00%	100,00%
5	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	82,73%	82,50%	83,01%	83,51%	84,01%	84,52%	84,52%
6	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	60,00%	100,00%	100,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
7	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	N/A	0,00%	23,22%	24,55%	47,45%	71,45%	71,45%
8	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	84,41%	84,86%	85,02%	85,17%	85,32%	85,47%	85,47%
9	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	93,12%	90,21%	93,71%	94,01%	94,01%	94,16%	94,16%
10	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	81,87%	84,70%	84,80%	89,87%	94,93%	100,00%	100,00%
11	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	20,49%	35,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

VI.VII-6

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2018	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
25	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor	33,33%	44,40%	-	-	-	-	-
26	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten/ kota pada sistem informasi pembinaan jasa konstruksi (SIPJAKI)	N/A	36,20%	-	-	-	-	-
27	Persentase jumlah pengujian yang diproses sesuai SOP	N/A	100,00%	-	-	-	-	-
28	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Prioritas di Kota Malang	N/A	1,27%					
29	Persentase dokumen perencanaan dan sistem informasi tata ruang	N/A	80,00%					
30	Persentase penurunan titik genangan air	N/A	28,00%					
31	Persentase pelayanan keterangan rencana kota sesuai SOP	N/A	80,00%					

VI.VII-7

Tabel 7.4

Formula, Definisi dan Baseline Data

Indikator Kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018 – 2023

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Lama	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Mengukur tingkat kemantapan jalan yaitu panjang jalan kewenangan kota yang mantap dibagi panjang jaringan jalan di Kota Malang dikali seratus persen	Jaringan jalan kewenangan kota sesuai SK Walikota Nomor 188.45/414/35.73.112/2017 Tentang Penetapan Jalan Kota Jalan yang mantap meliputi jalan dalam kondisi baik dan sedang.	Panjang jaringan jalan di Kota Malang = 1.221.292 meter
	Lama	Persentase jembatan kota dalam kondisi baik	Mengukur tingkat kemantapan jembatan yaitu jumlah jembatan dalam kondisi mantap dibagi jumlah jembatan di Kota Malang dikali seratus persen	Jembatan yang mantap meliputi jembatan dalam kondisi baik dan sedang.	Jumlah jembatan di Kota Malang = 315 unit
	Lama	Persentase jalan yang memiliki jalur pejalan kaki	Panjang jalan utama yang memiliki jalur pejalan kaki (pedestrian) dalam kondisi baik dibagi panjang jalan utama di Kota Malang yang memerlukan jalur pejalan kaki (pedestrian) dikali seratus persen	Pedestrian dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Panjang jalan utama yang memerlukan jalur pejalan kaki (pedestrian) = 608.885,90 meter
	Lama	Persentase fasilitas penerangan jalan	Jumlah fasilitas penerangan jalan dalam kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan fasilitas penerangan jalan di Kota Malang dikali seratus persen	Fasilitas penerangan jalan dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Jumlah kebutuhan total fasilitas penerangan jalan di Kota Malang = 36.450 titik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Lama	Persentase drainase kota dalam kondisi baik	Panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi panjang total drainase di Kota Malang dikali seratus persen	Drainase kota dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Panjang drainase kota di Kota Malang = 1.785.694,20 meter
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Lama	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara dibagi luas daerah irigasi kewenangan kota dikali seratus persen	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang irigasi kota di Kota Malang = 15.073 meter Luas irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi = 278 Ha

VI.VII-8

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
	Baru	Persentase ketersediaan debit air melalui penyediaan bangunan penampung	Jumlah debit sumur resapan yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan debit sumur resapan di Kota Malang dikali seratus persen	Bangunan penampung merupakan bangunan yang dibuat untuk menampung agar air hujan dapat meresap ke dalam tanah guna menjaga tinggi muka air tanah yang berdampak bisa mengendalikan banjir.	Jumlah kebutuhan debit sumur resapan = 8.642,86 meter kubik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Lama	Persentase rumah tinggal yang memiliki sarana/akses sanitasi layak	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah di Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi layak yang telah dilakukan penyedotan rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT.	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Lama	Persentase rumah tinggal berakses air bersih	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota dibagi jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut dikali seratus persen	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah.	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit

VI.VII-9

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Lama	Persentase Gedung Milik Daerah yang Menjadi Kewenangan Dinas dalam kondisi baik	Jumlah gedung milik daerah dalam kondisi baik dibagi jumlah total gedung milik daerah kewenangan dinas dikali seratus persen	Kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	Jumlah gedung milik daerah yang menjadi kewenangan dinas = 354 unit
	Lama	Persentase bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi syarat sertifikat laik fungsi dibagi jumlah pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung dikali seratus persen	Sertifikat laik fungsi yaitu sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan	Jumlah pengajuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung setiap tahun.
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Baru	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi yang bersertifikat	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis dibagi jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat pelatihan yaitu sertifikat yang menyatakan kompetensi dalam bidang konstruksi tertentu yang diadakan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Malang sd tahun 2023 = 272 orang
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Lama	Persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL	Jumlah luas pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL dibagi luas Kota Malang dikali seratus persen	RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Kawasan prioritas yaitu kawasan yang diutamakan pengembangan dan penanganannya dengan memperhatikan fungsi strategis dan aspek lainnya.	Luas Kota Malang = 110.060.000 meter persegi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Lama	Persentase Jumlah Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	Jumlah pelanggaran tata ruang yang tertangani dibagi jumlah pelanggaran tata ruang di Kota Malang melalui pengaduan maupun monitoring dikali seratus persen	Pelanggaran tata ruang yaitu pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.	Jumlah pengaduan pelanggaran tata ruang setiap tahun.

VI.VII-10

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
	Lama	Persentase pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang	Jumlah pemanfaatan SIPR dalam pemanfaatan ruang dibagi jumlah pengajuan keterangan rencana kota di Kota Malang dikali seratus persen	SIPR yaitu Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah pemanfaatan SIPR setiap tahun.
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Lama	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah tinggal layak huni dibagi jumlah rumah tinggal di Kota Malang dikali seratus persen	Rumah tinggal layak huni yaitu apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
	Baru	Prosentase penanganan infrastruktur permukiman	Luas area permukiman yang ditata dengan baik dibagi Luas area permukiman di Kota Malang dikali seratus persen	Area permukiman yang ditata yaitu sebagai tempat tinggal dan sekaligus tempat mencari nafkah bagi sebagian penghunianya	Luas area permukiman di Kota Malang = 44.056.900 meter persegi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Lama	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal di Kota Malang dikali seratus persen	Mengukur penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Rumah tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya	Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Baru	Persentase penanganan area kawasan kumuh	Luas area kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas kawasan kumuh sesuai SK Walikota Malang dikali seratus persen	Luas area kawasan kumuh yang tertangani yaitu area lingkungan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota, yang telah dilakukan penanganan.	Luas Kawasan Kumuh (Berdasarkan SK Walikota)
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Lama	Persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dibagi jumlah perumahan di Kota Malang dikali seratus persen	Lingkungan yang sehat dan aman yaitu kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat, aman dan terjangkau. Rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU yaitu unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni	Jumlah perumahan di Kota Malang = 356 unit. Jumlah rumah tinggal di Kota Malang pada tahun 2018 = 197.938 unit.

VI.VII-11

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Pemutakhiran	Status Indikator	Indikator	Formula	Definisi	Baseline Data
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Baru	Presentase kelurahan yang sudah terinventarisir tanah kosong dalam data base	Jumlah kelurahan yang sudah terinventarisasi tanah kosong dalam data base dibagi jumlah kelurahan di Kota Malang dikali seratus persen	Tanah kosong yaitu a. tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai ;b. tanah Hak Pengelolaan; danc. tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi belum diperoleh hakatas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,atau sebagainya, yang belum dipergunakan sesuai dengan sifat dan tujuanpemberian haknya atau Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998)	Jumlah kelurahan di Kota Malang = 57 kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lama	Nilai survey kepuasan internal	Rata-rata nilai IKM semester 1 dan 2 di tahun n	IKM : Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik	
	Lama	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana Dinas dalam kondisi baik dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Dinas dikali seratus persen	Sarana dan prasarana operasional dalam kondisi baik meliputi kondisi baik dan sedang.	
	Lama	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan dikali seratus persen	Dokumen perencanaan kinerja, laporan keuangan dan pelaporan kinerja sesuai juknis.	

BAB VIII
PENUTUP

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra DPUPRPKP yang penyusunannya merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2018 – 2023 adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yang selaras dengan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Perubahan Renstra DPUPRPKP menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Selanjutnya disamping sebagai pedoman, Perubahan Renstra ini merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan maupun lima tahunan pada DPUPRPKP.

Perubahan Renstra DPUPRPKP ini juga diharapkan menjadi sebuah produk perencanaan yang akan memberikan arah untuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kota dan lingkungan permukiman lima tahun mendatang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Malang, 2021

WALIKOTA MALANG

SUTIAJI